

EKONOMIKA MAKRO

Pengantar

Penulis :

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M
Sumiyarti - Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M
Dini Hariyanti - Sri Yani Kusumastuti
Dr. Nuraini Chaniago, M.M - Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE
Dr. Lavlimatria Esya, M.Si - Tri Kunawangsih
Dr. Ida Busnetty, M.M - Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE
Dalizanolu Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP
Dr. Endri Sentosa, S.E., M.M
Loso Judijanto, M.M

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

Penulis :

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M
Sumiyarti

Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M
Dini Hariyanti

Sri Yani Kusumastuti

Dr. Nuraini Chaniago, M.M

Dr. Harmaini, S.E., M.Si

Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE

Dr. Lavlimatria Esya, M.Si

Tri Kunawangsih

Dr. Ida Busnetty, M.M

Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE

Dalizanolo Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP

Dr. Endri Sentosa. S.E., M.M

Loso Judijanto, M.M

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

Penulis :

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M
Sumiyarti
Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M
Dini Hariyanti
Sri Yani Kusumastuti
Dr. Nuraini Chaniago, M.M
Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE
Dr. Lavlimatria Esya, M.Si
Tri Kunawangsih
Dr. Ida Busnetty, M.M
Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE
Dalizanolu Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP
Dr. Endri Sentosa. S.E., M.M
Loso Judijanto, M.M

ISBN : 978-623-514-589-1

Editor :

Sepriano

Penyunting :

Inayah Uzma

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “***EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR***”. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku "Ekonomika Makro Pengantar" menyajikan pemahaman dasar mengenai bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Buku ini membahas berbagai topik penting seperti pengenalan ekonomi makro, konsep-konsep dasar, pendapatan nasional, serta interaksi dalam perekonomian terbuka. Dua teori besar—Teori Klasik dan Teori Keynesian—dijelaskan secara rinci untuk memberikan perspektif yang seimbang dalam memahami dinamika ekonomi. Selain itu, isu-isu seperti pengangguran, inflasi, siklus bisnis, serta peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mengelola stabilitas ekonomi dijelaskan dengan contoh dan pendekatan kontekstual agar mudah dipahami.

Pembaca juga akan diperkenalkan pada sistem keuangan dan perbankan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta perdagangan internasional melalui pembahasan tentang neraca pembayaran dan nilai tukar. Buku ini turut menyoroti krisis ekonomi global dan strategi penanggulangannya, serta berbagai isu kontemporer seperti digitalisasi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tantangan perubahan iklim. Dengan bahasa yang lugas, ilustrasi kasus nyata, serta latihan soal, buku ini sangat cocok digunakan sebagai bahan ajar maupun referensi bagi mahasiswa, dosen, dan siapa saja yang ingin memahami fondasi ekonomi makro secara komprehensif dan aplikatif di era modern.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN 1 PENGENALAN EKONOMI MAKRO	1
A. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO.....	1
B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO.....	4
C. PERMASALAHAN DAN TUJUAN EKONOMI MAKRO	8
D. <i>CIRCULAR FLOW DIAGRAM</i> EMPAT SEKTOR DALAM KEGIATAN EKONOMI	13
BAGIAN 2 KONSEP-KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO.....	15
A. PENGERTIAN KONSEP-KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO	15
B. PENDAPATAN NASIONAL DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO	16
C. INFLASI DAN DEFLASI.....	17
D. KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN.....	19
E. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	22
F. PERTUMBUHAN EKONOMI.....	24
G. NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL	25
BAGIAN 3 PENDAPATAN NASIONAL.....	29
A. PENGERTIAN /KONSEP	29
B. MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL.....	30
C. PENDAPATAN NASIONAL NOMINAL DAN RIIL	40
D. KETERBATASAN KONSEP GDP.....	41
E. PELAKU DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA.....	42
F. KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL.....	
DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA	43
G. DAMPAK PEREKONOMIAN TERBUKA TERHADAP	
PENDAPATAN NASIONAL.....	44
BAGIAN 4 TEORI PEREKONOMIAN KLASIK	45
A. KONSEP DAN PRINSIP TEORI PEREKONOMIAN KLASIK	45
B. TOKOH PEREKONOMIA KLASIK	47

C.	IMPLIKASI TEORI PEREKONOMIAN KLASIK	54
D.	PENGARUH PEREKONOMIAN KLASIK PADA.....	
	PEREKONOMIAN MODERN.....	57
BAGIAN 5	TEORI KEYNESIAN	59
A.	KONSEP-KONSEP DASAR DALAM TEORI KEYNESIAN.....	59
B.	PENENTUAN OUTPUT (PENDAPATAN) KESEIMBANGAN	77
BAGIAN 6	PENGANGGURAN DAN INFLASI	81
A.	PENDAHULUAN	81
B.	PENGANGGURAN	82
C.	INFLASI	87
D.	HUBUNGAN ANTARA PENGANGGURAN DAN INFLASI.....	92
BAGIAN 7	SIKLUS BISNIS	95
A.	PENDAHULUAN	95
B.	KONSEP SIKLUS BISNIS.....	96
C.	TAHAP-TAHAP SIKLUS BISNIS.....	97
D.	MANFAAT SIKLUS BISNIS	101
E.	CARA MENGUKUR SIKLUS BISNIS.....	102
F.	FAKTOR-FAKTOR SIKLUS BISNIS.....	103
G.	STUDI EMPIRIS.....	103
BAGIAN 8		107
A.	PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL.....	107
B.	TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL.....	108
C.	FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL.....	110
D.	JENIS KEBIJAKAN FISKAL	113
E.	MACAM-MACAM KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL	114
F.	HUBUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
	NEGARA (APBN) DAN KEBIJAKAN FISKAL.....	116
G.	INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DAN STRATEGI.....	
	PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	119
H.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL.....	124
BAGIAN 9	KEBIJAKAN MONETER.....	128
A.	PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI.....	128
B.	TUJUAN KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA	131

C.	JENIS – JENIS KEBIJAKAN MONETER	134
D.	INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER	135
E.	MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER	138
F.	KEBIJAKAN MONETER DAN MAKRO EKONOMI	140
G.	IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER.....	145
BAGIAN 10 SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN.....		147
A.	SISTEM KEUANGAN	147
B.	PERBANKAN DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	148
C.	JENIS JENIS BANK.....	154
BAGIAN 11 PERTUMBUHAN EKONOMI		156
A.	ARTI DAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI.....	156
B.	TEORI PERTUMBUHAN	156
C.	INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI.	159
D.	KEBIJAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BERBAGAI	
	NEGARA.....	163
E.	KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA	165
F.	TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PERTUMBUHAN	
	EKONOMIF AKAN M	166
BAGIAN 12 NERACA PEMBAYARAN.....		170
A.	NERACA PEMBAYARAN.....	170
B.	STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN.....	172
C.	SISTEM MONETER INTERNASIONAL	178
D.	FIXED EXCHANGE RATE.....	178
E.	FLOATING EXCHANGE RATE.....	179
F.	PEGGED EXCHANGE RATE SYSTEM	180
G.	PASAR VALUTA ASING	181
H.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR.....	183
BAGIAN 13 EKONOMI TERBUKA DAN PERDAGANGAN.....		184
INTERNASIONAL.....		184
A.	PENGERTIAN EKONOMI TERBUKA	184
B.	PERDAGANGAN INTERNASIONAL	188
C.	PENTING PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	190
D.	SURPLUS NERACA PERDAGANGAN.....	193

BAGIAN 14 KRISIS EKONOMI GLOBAL	198
A. KRISIS EKONOMI	198
B. DEPRESI BESAR (1929-1939).....	198
C. KRISIS KEUANGAN ASIA (1997-1998).....	201
D. KRISIS KEUANGAN GLOBAL (2008)	202
E. KRISIS EKONOMI YUNANI (2010).....	204
F. PANDEMI COVID-19 (2020-2022)	206
G. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN.....	207
H. INDONESIA DAN KRISIS GLOBAL	209
BAGIAN 15 ISU-ISU KONTEMPORER DALAM EKONOMI MAKRO.....	214
A. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKONOMI MAKRO	214
B. INFLASI DAN TANTANGAN STABILITAS HARGA.....	218
C. KRISIS KEUANGAN DAN RESESI EKONOMI.....	222
D. PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DAN	
DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MAKRO	226
DAFTAR PUSTAKA	231
TENTANG PENULIS	244

BAGIAN 1

PENGENALAN EKONOMI MAKRO

A. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Bidang ekonomi sebenarnya telah menjadi perhatian pada masa Aristoteles (350 SM), pada waktu itu ekonomi dipelajari pada tingkat yang mendasar secara filosofis. Dalam kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sejak jaman primitif pada dasarnya juga merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan pertukaran atau barter sebelum ada alat tukar pada dasarnya melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi. Bidang ekonomi terbentuk sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation* atau sering disingkat dengan *The Wealth of the Nation* atau negara kesejahteraan. Adam Smith mencita-citakan bahwa suatu negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada diserahkan pada mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah hanya akan mengganggu mekanisme pengalokasian sumber daya secara efektif. Gangguan pada keseimbangan pasar akan diatasi secara otomatis oleh tangan yang tidak terlihat. Ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Adam Smith ini dikenal dengan kelompok klasik.

Di rentang waktu tahun 1920 dan 1930 terjadi depresi besar (*great depression*), yaitu adanya kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara industri terkemuka seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat sebagai indikasi awal terjadinya hal ini. Amerika Serikat menghadapi gejolak ekonomi yang parah. Nilai saham anjlok, kredit macet, perusahaan bangkrut, hingga ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi tabungan atau menyusun rencana di masa depan. Sebagai akibat dari kondisi tersebut maka pengangguran yang sangat tinggi berlaku dan industri-industri beroperasi jauh di bawah kapasitas normal. Sumber dari kemunduran ekonomi ini adalah kekurangan permintaan dalam masyarakat. Akibat adanya kejadian dari kemunduran ekonomi telah mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes untuk mengevaluasi pandangan pandangan ahli ekonomi klasik seperti pasca teori Adam Smith.

Berdasarkan evaluasi dari Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang kemudian menjadi dasar mengenai perkembangan teori ekonomi makro serta sebagai landasan dari teori ekonomi makro yang terdapat pada masa ini. Keynes dalam bukunya mengkritik klasik bahwa perekonomian cenderung untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (yaitu tenaga kerja yang tersedia sepenuhnya digunakan). Dalam kritik ini

menunjukkan kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan pada keyakinan para ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh serta pertumbuhan ekonomi yang kuat selalu dicapai. Keynes dalam hal ini juga menjelaskan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes menilai pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Keynes mengungkapkan bahwa solusinya pemerintah harus menjalankan kebijakan defisit anggaran dan melakukan pengeluaran untuk kerja publik yang akan menaikkan permintaan dan memulihkan kepercayaan. Keynes juga mengungkapkan bahwa pemerintah boleh melakukan pengeluaran yang tidak produktif misalnya pembangunan monumen atau untuk biaya perang. Pengeluaran tersebut dapat meningkatkan permintaan agregat serta dapat membantu perekonomian agar pulih kembali. (Darmawan, 2018). Jika kelompok klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap bahwa perlu adanya campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian berfungsi sebagai penyedia barang-barang dan jasa-jasa publik. Penyediaan barang dan jasa publik perlu dilakukan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak

mungkin melaksanakannya karena sektor tersebut tidak menjanjikan keuntungan dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Dalam teori Keynes, bukunya menunjukkan pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ini telah diterima oleh para ahli ekonomi. Kelompok yang menerima pendapat Keynes ini disebut dengan *Keynesian Economist* yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktikkan di banyak negara.

Sesuai dengan definisi makro yang berarti besar maka teori ekonomi makro dapat menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Analisisnya bersifat global dan tidak memerhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO

Aspek terpenting di dalam suatu negara salah satunya adalah ekonomi. Perekonomian suatu negara mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Sehingga dari sumber daya yang terbatas muncul permasalahan ekonomi yang disebabkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Inti dari masalah ekonomi yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sehingga

timbul adanya masalah kelangkaan (*scarcity*). Karena adanya kelangkaan sumber daya yang ada, manusia harus melakukan pilihan (*choice*) terhadap kebutuhan tersebut.

Ekonomi makro merinci mengenai analisis pengeluaran agregat kepada 4 komponen, antara lain: pengeluaran rumah tangga (konsumsi rumah tangga), pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan (investasi), ekspor dan impor. Terdapat juga empat pasar makro dalam perekonomian nasional sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu: pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja serta pasar luar negeri. Pasar dalam sistem perekonomian persaingan bebas akan menjawab permasalahan dasar ekonomi. Permasalahan dasar ekonomi dapat dibedakan menjadi: Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak (*what*); Bagaimana cara memproduksi barang tersebut (*how*); Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi (*for whom*). Berdasarkan ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bagian, meliputi:

1. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di pasar. Ekonomi mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang kepentingan unit-unit ekonomi terkecil, contohnya membahas mengenai perilaku rumah tangga konsumen, perilaku rumah tangga produsen serta perilaku pasar secara individual.

2. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi makro juga merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan secara agregatif. Masalah-masalah tersebut di antaranya berupa tingkat pendapatan atau produksi nasional, kesempatan kerja (pengangguran) dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ilmu Ekonomi makro mengupas mengenai perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan (agregat), mengarah kepada analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil perekonomian. Ilmu ekonomi makro tentunya dapat membahas terkait dengan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta pengaruhnya terhadap beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.

Prawoto (2019) mengatakan dalam teori ekonomi makro, menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar, antara lain:

1. Rumah tangga. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi juga dapat

di artikan sebagai penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal dan faktor produksi lainnya.

2. Produsen. Produsen merupakan organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
3. Pemerintah. Pemerintahan meliputi semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya.
4. Lembaga-lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan ialah setiap perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan dan kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mempermudah transaksi dalam kegiatan ekonomi.
5. Negara-negara Lain. Negara lain mempunyai peranan dalam perekonomian sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian suatu negara serta sebagai pembeli barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara. Dengan demikian terjadi transaksi ekonomi yang disebut sebagai ekspor dan impor barang dan jasa, sekaligus transaksi modal dan keuangan internasional.

C. PERMASALAHAN DAN TUJUAN EKONOMI MAKRO

Menurut Sukirno (2016), bahwa ada lima masalah utama di setiap negara dalam makroekonomi, meliputi:

1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk lingkup wilayah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian. Pemerintah dalam hal ini berkepentingan memantau perkembangan pertumbuhan PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap negara mempunyai kesempatan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional, karena faktor-faktor produksi yang ada di negaranya akan bertambah dari satu periode ke periode lainnya. Namun, belum tentu ekonomi terus meningkat seperti yang diharapkan, karena adanya masalah ekonomi contohnya pengangguran serta inflasi. Masalah ekonomi ini bila tidak diperhatikan oleh pemerintah, dalam jangka panjang mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.
2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, sering mengalami pasang suurt pada kegiatan ekonomi. Namun adakalanya pada suatu

periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga dapat menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut *konjungtor* atau siklus kegiatan perusahaan (*business cycle*). Dalam kurva *konjungtur* ekonomi, antara lain: masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (*peak of wealth*), masa kemunduran, masa keterpurukan (*peak of crises*). Setelah krisis dapat teratasi, akan terjadi masa pemulihan (*recovery*), pertumbuhan, dan seterusnya.

3. Masalah Pengangguran. Dalam industrialisasi yang melanda negara-negara berkembang saat ini, selain menciptakan suatu keberhasilan juga menimbulkan berbagai dampak yang sulit, yaitu masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Tidak hanya negara maju yang menghadapi masalah pengangguran dan kesempatan kerja, hampir semua negara di dunia, belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup memadai. Kurangnya lapangan kerja merupakan masalah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Maka dapat di simpulkan bahwa pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggu. Jika tingkat

pengangguran di suatu negara tinggi, maka kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karenanya, masalah pengangguran sangat buruk efeknya untuk perekonomian dan masyarakat, dan harus secara terus-menerus dilakukan solusi dari pemerintah untuk mengatasinya.

4. Masalah inflasi. Inflasi adalah salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Inflasi menunjukkan gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat jika tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam dua neraca penting suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran dapat menyebabkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit

sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor serta harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Dalam kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun dapat mengurangi kegairahan para pengusaha dalam melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru.

Dalam setiap kebijakan ekonomi, tujuannya untuk mengatasi masalah perekonomian. Selain menciptakan perekonomian yang seimbang serta ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi makro antara lain:

1. Menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi suatu negara dapat meliputi mengenai kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan dalam kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jika suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan lainnya, seperti mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai.
3. Mengendalikan inflasi. Kondisi meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terjadi secara berkala ini merupakan

pengertian dari inflasi. Apabila harga naik terjadi pada satu atau dua barang saja, hal itu tidak dapat disebut inflasi. Kondisi inflasi di suatu negara dapat menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Apabila terjadi kasus tersebut, inflasi menjadi tinggi dan sulit untuk dapat dikendalikan. Namun, biasanya inflasi terjadi lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, penambahan penawaran uang, serta kenaikan biaya produksi. Untuk mengatasi inflasi, diperlukan kebijakan ekonomi pemerintah mengenai kesejahteraan masyarakat.

4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang.
5. Menyeimbangkan neraca pembayaran dan nilai valuta asing. Dalam perdagangan internasional tentunya dapat berdampak pada neraca pembayaran internasional serta nilai mata uang asing. Pada neraca pembayaran yang tidak seimbang akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi permasalahan aliran dana ke luar negeri yang berakibat pada cadangan mata uang asing akan merosot dan nilai mata uang asing meningkat. Hal ini dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi dan

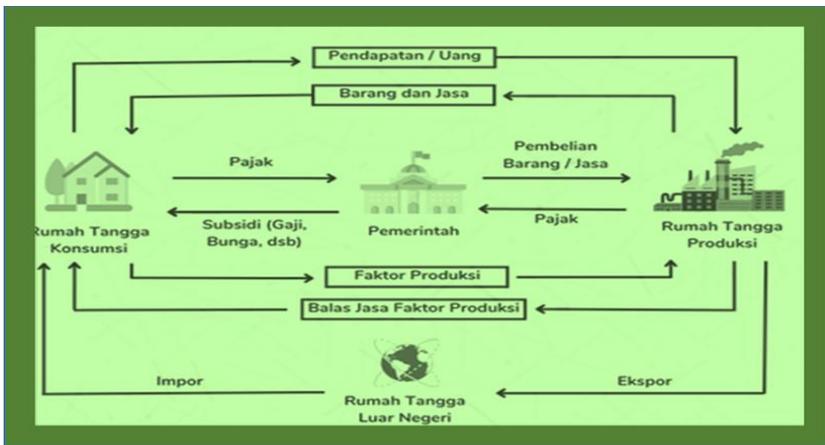
biaya produksi meningkat. Perubahan ini tentunya akan mengurangi kegiatan perekonomian di dalam negeri serta pengangguran meningkat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus memperhatikan kedudukan pada neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya.

D. *CIRCULAR FLOW DIAGRAM* EMPAT SEKTOR DALAM KEGIATAN EKONOMI

Definisi *circular flow diagram* adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Dapat diketahui bahwa pelaku ekonomi mempunyai peran yang sangat penting terhadap perekonomian suatu negara. Seperti konsumen dan produsen yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki peran tersendiri yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia serta kegiatan ekonomi di masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah.

Dalam perekonomian secara terbuka juga dapat melibatkan masyarakat dari luar negeri. Arus kegiatan ekonomi yang melibatkan empat sektor yaitu: rumah tangga konsumsi (RTK) atau konsumen, rumah tangga produksi (RTP) atau produsen, rumah tangga pemerintah (RTP) dan rumah tangga luar negeri (RTLN). konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi akan menjualnya kepada produsen dengan menerima

pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, keuntungan. Pihak produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi tujuannya menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada kosumen. Pemerintah berperan mengatur, mengendalikan serta mengadakan pengawasan perekonomian masyarakat melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Terlampir gambar 1.1 *circular flow diagram* empat sektor



Gambar 1.1 Circular Flow Diagram Empat Sektor

Sumber: Superadmin (2023)

BAGIAN 2

KONSEP-KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO

A. PENGERTIAN KONSEP-KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Ini berbeda dengan ekonomi mikro yang fokus pada perilaku individu dan perusahaan. Ekonomi makro mempelajari gambaran besar perekonomian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cakupan atau ruang lingkup ekonomi makro meliputi analisis ekonomi secara luas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah.

Konsep-konsep dasar ekonomi makro adalah prinsip-prinsip dan ide-ide utama yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena ekonomi makro. Konsep-konsep dasar ekonomi makro merupakan fondasi untuk memahami tentang bagaimana perekonomian suatu negara bekerja secara keseluruhan. Ekonomi makro adalah bidang yang luas, sehingga konsep dasarnya dapat dipecah menjadi beberapa sub-topik utama seperti pendapatan nasional atau output agregat, inflasi dan deflasi, sampai kepada topik neraca pembayaran dan perdagangan internasional.

Tujuan utama dari mempelajari konsep-konsep dasar ekonomi makro diantaranya adalah untuk:

6. memahami bagaimana perekonomian suatu negara beroperasi.
7. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan.
8. merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan tingkat pengangguran yang rendah.

B. PENDAPATAN NASIONAL DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

Pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam untuk menggambarkan ekonomi sebuah negara. Secara definisi, kedua istilah memiliki perbedaan dalam fokus dan cakupan. Fokus pendapatan nasional mengukur pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh para pemilik faktor produksi pada sebuah proses produksi. Komponen pendapatan nasional berupa kompensasi pekerja (upah dan gaji), laba perusahaan, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga, dan pendapatan perusahaan perseorangan. Sedangkan PDB berfokus pada pengukuran nilai total output atau barang dan jasa yang diproduksi sebuah di sebuah negara. Komponen utama PDB berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto (ekspor minus impor).

Dari aspek cakupan, pendapatan nasional mengukur total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya, pendapatan nasional mencakup produksi yang dihasilkan oleh warga negara yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak mencakup produksi yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Sedangkan PDB mencakup produksi yang terjadi di dalam negeri. Dalam hal ini PDB mengukur nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam batas wilayah suatu negara, tanpa memandang kewarganegaraan pemilik faktor produksi. Artinya, PDB mencakup produksi yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, tetapi tidak mencakup produksi yang dihasilkan oleh warga negara yang bekerja di luar negeri.

Pada tingkat penggunaan, PDB lebih sering digunakan untuk mewakili output agregat. Nilai output agregat menggambarkan aktifitas ekonomi di dalam negeri. Sementara, besarnya pendapatan nasional memberikan gambaran pendapatan yang diterima oleh warga negara, terlepas dari lokasi produksinya. Sehingga ukuran pendapatan nasional lebih sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi warga negara.

C. INFLASI DAN DEFLASI

Inflasi dan deflasi menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu

tertentu. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sedangkan deflasi adalah kebalikannya, yakni kondisi kecenderungan penurunan harga barang dan jasa secara umum. Tingkat harga umum adalah ukuran rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Konsep tingkat harga umum yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK):

IHK merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menghitung inflasi. Indeks harga ini mengukur perubahan harga rata-rata dari sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Karena itulah nilai IHK dapat mencerminkan biaya hidup rata-rata bagi konsumen.

2. Indeks Harga Produsen (IHP):

IHP merupakan ukuran lain yang bisa digunakan untuk mengukur inflasi. Pada dasarnya IHP mengukur perubahan harga rata-rata yang diterima oleh produsen untuk barang dan jasa mereka. IHP dapat memberikan indikasi awal tekanan inflasi di tingkat produsen, yang pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen.

3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB):

Deflator PDB mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Ukuran inflasi menggunakan deflator PDB ini adalah ukuran yang lebih luas daripada IHK karena mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi, bukan hanya yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Tingkat inflasi dan deflasi pada perekonomian menjadi isyarat tentang kondisi ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inflasi artinya ada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Adanya Inflasi berarti daya beli uang menurun. Dengan jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Tingkat inflasi menjadi indikator kesehatan perekonomian. Inflasi yang berjalan moderat menjadi penanda pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebalikannya, inflasi yang tinggi mengindikasikan adanya ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Biaya transaksi menjadi lebih mahal sehingga berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi.
2. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum. Namun deflasi seringkali dikaitkan dengan stagnasi ekonomi atau resesi. Ketika terjadi deflasi konsumen cenderung menunda pembelian barang dan investor menunda untuk investasi. Jika berlanjut maka deflasi dapat meningkatkan pengangguran.

D. KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN

Dalam konteks ekonomi makro, kesempatan kerja merujuk pada kondisi di mana tersedia lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ingin dan mampu bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Sedangkan dalam konteks

ketenagakerjaan, kesempatan kerja didefinisikan sebagai ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan kata lain, kesempatan kerja merujuk kepada ketersediaan lowongan pekerjaan yang bisa diakses oleh angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan atau telah bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang produksi berusia (biasanya 15-64 tahun) dan sedang bekerja dan yang belum bekerja (menganggur) atau aktif mencari pekerjaan.

Pengangguran merupakan konsep lain yang berkaitan dengan kesempatan kerja. Secara umum, pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja (usia produktif) ingin bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkannya. Dengan demikian tingkat pengangguran diukur dari rasio jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja dikalikan dengan 100%.

Tingkat Pengangguran = $(\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$

Menurut penyebabnya pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

1. **Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)**, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan pekerja antar pekerjaan atau karena pekerja baru memasuki pasar kerja. Pengangguran ini bersifat sementara dan merupakan bagian normal dari dinamika pasar tenaga kerja.

2. **Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)**, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia. Seringkali pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan teknologi atau perubahan struktur ekonomi.
3. **Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*)**, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Pengangguran siklikal biasanya meningkat saat ekonomi melambat dan menurun saat ekonomi pulih.
4. **Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)**, adalah pengangguran yang karena fluktuasi permintaan tenaga kerja yang bersifat musiman. Contohnya, pekerja di sektor pertanian atau pariwisata yang hanya bekerja pada musim tertentu.
5. **Pengangguran Teknologi**, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga kerja manusia dengan mesin akibat perkembangan teknologi.

Kesempatan kerja dan pengangguran merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi menjadi cerminan dari sehatnya perekonomian karena mampu menyediakan lapangan kerja yang mencukupi terhadap seluruh angkatan kerja yang siap bekerja. Sementara tingkat pengangguran yang tinggi merupakan penanda terjadinya masalah makro yang kompleks. Sebab kesempatan kerja dan pengangguran sangat berkaitan erat masalah ekonomi makro lainnya seperti stabilitas

ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

E. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama untuk mengelola ekonomi suatu negara. Melalui dua kebijakan tersebut, pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi menuju kondisi yang diharapkan. Kebijakan fiskal dan moneter seringkali digunakan secara bersamaan untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang diinginkan.

Beberapa hal penting terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter diuraikan sebagai berikut tersebut:

1. Kebijakan Fiskal

- a. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal ditujukan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran.
- b. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Pengeluaran pemerintah mencakup belanja pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan,

instrumen pajak dalam kebijakan fiskal mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya. Perubahan aturan perpajakan, misalnya kenaikan tarif pajak dapat mempengaruhi pendapatan disposabel masyarakat dan investasi yang nantinya mempengaruhi aktifitas ekonomi.

- c. Kebijakan fiskal yang berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi disebut kebijakan fiskal ekspansif, misalnya dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Sementara kebijakan fiskal yang berdampak kepada penurunan kegiatan ekonomi dinamakan kebijakan fiskal kontraktif, misalnya dalam bentuk kenaikan tarif pajak.

2. Kebijakan Moneter

- a. Kebijakan adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan dilakukannya kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang.
- b. Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen utama untuk digunakan. Instrumen pertama adalah suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Pengaturan suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan inflasi, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kedua

adalah operasi pasar terbuka. Melalui instrumen ini, bank sentral akan membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Instrumen ketiga adalah cadangan wajib minimum, dimana bank sentral dapat mengubah persyaratan cadangan wajib minimum bank komersial untuk mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan pinjaman.

- c. Kebijakan moneter yang ditujukan untuk merangsang ekonomi dengan menurunkan suku bunga atau meningkatkan uang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif. Sementara kebijakan moneter kontraktif (ketat) adalah kebijakan moneter yang dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi.

F. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi makro. Angka pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Definisi pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini mencakup peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan tolok ukur pertumbuhan PDB riil. PDB riil adalah ukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara yang telah disesuaikan dengan inflasi. Tingkat pertumbuhan PDB riil menunjukkan persentase perubahan PDB riil dari tahun ke tahun. Secara rumus pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{[(\text{PDB riil tahun ini} - \text{PDB riil tahun sebelumnya}) / \text{PDB riil tahun sebelumnya}] \times 100\%}{}$$

G. NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Neraca Pembayaran (*Balance of payments*)

Neraca pembayaran adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode waktu tertentu. Pencatatan transaksi dalam neraca pembayaran mencakup semua transaksi, baik yang melibatkan barang, jasa, pendapatan, maupun transfer keuangan. Neraca pembayaran terdiri dari dua komponen utama, yakni:

a. Neraca Berjalan (*Current Account*)

Neraca berjalan mencatat transaksi ekonomi riil antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Transaksi riil ini mencakup

perdagangan barang atau ekspor-impor barang (neraca perdagangan); transaksi jasa seperti jasa transportasi, pariwisata, jasa keuangan, dan jasa lainnya dan jasa (neraca jasa); pendapatan yang diperoleh dari investasi di luar negeri, seperti dividen, bunga, dan laba (pendapatan investasi); dan transfer dana atau barang tanpa imbalan langsung, seperti bantuan luar negeri, kiriman uang dari pekerja migran, dan hadiah (transfer unilateral). Neraca berjalan memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.

b. Neraca modal dan keuangan (*Capital and Financial Account*)

Neraca modal mencatat transfer modal yang tidak terkait dengan produksi barang dan jasa. Pencatatan transaksi ini mencakup transfer kepemilikan aset non-keuangan dan transfer modal lainnya, serta mencakup transfer dana untuk investasi modal. Contoh transaksi modal adalah transaksi yang terkait dengan transfer kepemilikan aset tetap seperti tanah dan bangunan; atau aset tidak berwujud, seperti hak paten dan merek dagang. Sementara neraca keuangan mencatat transaksi yang berhubungan dengan investasi portofolio, investasi langsung, dan cadangan devisa. Beberapa contoh transaksi dalam neraca keuangan antara lain investasi dalam pembangunan pabrik atau akuisisi

perusahaan; investasi dalam aset keuangan, seperti saham dan obligasi; dan sebagainya.

Neraca modal memberikan gambaran tentang aliran modal yang terkait dengan investasi jangka panjang dan transfer aset. Sedangkan neraca keuangan memberikan gambaran tentang aliran modal jangka pendek dan jangka panjang yang mempengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar mata uang.

2. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di seluruh dunia. Perdagangan internasional mencakup kegiatan ekspor (penjualan barang dan jasa ke luar negeri) dan impor (pembelian barang dan jasa dari luar negeri). Kegiatan perdagangan lintas negara ini melibatkan berbagai pelaku, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, dan organisasi internasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, diantaranya adalah:

- a. Perbedaan sumber daya alam, sehingga perlu saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan
- b. Perbedaan teknologi, sehingga antar negara perlu saling melengkapi
- c. Spesialisasi dan Keunggulan Komparatif, yang memungkinkan negara-negara dapat memperoleh

- keuntungan dengan fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki biaya produksi relatif lebih rendah
- d. Globalisasi, yang telah meningkatkan integrasi ekonomi antarnegara, memfasilitasi perdagangan internasional melalui penurunan hambatan perdagangan dan peningkatan teknologi komunikasi.

Adapun manfaat perdagangan internasional yang dapat dinikmati oleh negara-negara terlibat, antara lain:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Perdagangan internasional memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong inovasi, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen
Konsumen memiliki akses ke berbagai macam barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.
- c. Menciptakan Lapangan Kerja
Sektor ekspor dan impor menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi.
- d. Transfer Teknologi
Perdagangan internasional memfasilitasi transfer teknologi antarnegara, yang dapat membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas.

BAGIAN 3

PENDAPATAN NASIONAL

A. PENGERTIAN /KONSEP

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Konsep-konsep dasar dalam ekonomi makro, pendapatan nasional merupakan bagian penting dari ekonomi makro. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Produksi nasional atas pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu misalnya dalam satu tahun. Dalam konsep yang lebih spesifik, pendapatan nasional dibedakan atas dua pengertian yang berbeda yaitu 1. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP), yaitu produk nasional yang diwujudkan melalui faktor-faktor produksi milik warga negara di suatu negara tertentu.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Bruto (GDP) yaitu produksi nasional yang diwujudkan melalui faktor-faktor produksi di dalam negeri milik warga negara dan orang asing (warga negara lain) yang ada dalam suatu negara.

Dari pengertian 2 konsep ini, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini merupakan ukuran besarnya kemampuan suatu negara

dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu.

B. MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kebanyakan data makroekonomi berasal dari laporan data pendapatan dan produk nasional (*national Income and product account*), yaitu data yang diterbitkan oleh pemerintah yang mendeskripsikan berbagai komponen pendapatan dan output nasional dalam suatu perekonomian. Konsep utama dalam laporan tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), yaitu nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu yang berasal dari faktor-faktor produksi yang berada pada suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung atau mengukur Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu :

- a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)
- b. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)
- c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional.

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Definisi PDB/GDP berdasar pada konsep barang dan jasa akhir (*final goods and services*), yaitu barang yang diproduksi untuk

penggunaan akhir. Banyak barang yang diproduksi dalam suatu perekonomian tidak dikelompokkan sebagai barang akhir, melainkan sebagai barang antara (*intermediate goods*). yaitu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses berikutnya atau oleh perusahaan lain. Atau dapat juga produksi dari suatu sektor misalnya sekor pertanian, menjadi input atau bahan baku (*barang perantara/ intermediary goods*) untuk sektor industri. Sehingga ketika menghitung nilai jualnya akan terjadi perhitungan ganda (*multiple counting*). Nilai barang perantara tidak dihitung dalam PDB/ GDP. Perhitungan ganda dapat dihindari dengan hanya menghitung nilai yang ditambahkan pada suatu produk oleh tiap perusahaan dalam proses produksinya. Nilai ini disebut sebagai nilai tambah (*value added*). Jadi berarti nilai tambah (*value added*) adalah selisih antara nilai barang ketika keluar darisuatu tahap produksi dengan biaya barang itu ketika memasuki tahap produksi tersebut.

Contoh berikut menunjukkan nilai tambah dalam tahap-tahap produksi.

Tabel 3.1

Nilai tambah dalam produksi satu unit roti (angka hipotetis)

Tahap Produksi	Nilai Penjualan	Nilai Tambah
(1) Pertanian gandum	Rp 9.000	Rp 9.000
(2) Pabrik terigu	9..500	500
(3) Industri Roti	10.000	500

(4) Penjualan eceran	11.000	1000
Nilai tambah Total	Rp 39.500	Rp 11.000

Sumber : data diolah, 2025

Dari tabel 3.1 tersebut kita dapat melihat bahwa ketika nilai suatu produksi akhir ditetapkan maka nilai penjualannya dalam hal ini harga produk roti sebesar Rp 39.500 dan pada nilai tersebut sudah terjadi perhitungan ganda karena pada setiap tahap produksi tentu ada biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya pengolahan gandum menjadi terigu, biaya transportasi dari pabrik ke industri dan lain-lain. Sehingga nilai penjualannya menjadi sangat tinggi, karena sudah terjadi perhitungan berkali-kali. Sedangkan pada perhitungan nilai tambah nilainya jauh lebih realistis.

Dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB), kita tidak menggunakan nilai penjualan total dalam perekonomian untuk mengukur jumlah output yang telah diproduksi, melainkan dapat menggunakan dasar perhitungan nilai tambah (*value Added = VA*) yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah tiap tahap atau sektor produksi. Jika diasumsikan seluruh perusahaan yang ada dalam suatu perekonomian dikategorikan secara umum menjadi 3 kategori besar sektor ekonomi seperti sektor pertanian meliputi seluruh unit usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan, kemudian kategori sektor industri, mencakup perusahaan di bidang industri pengolahan dan sebagainya serta kategori sektor jasa yang

meliputi unit usaha perdagangan, transportasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan sebagainya, maka perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat ditunjukkan dengan persamaan identitas sebagai berikut

$$\text{PDB} = \text{VA Sektor Pertanian} + \text{VA Sektor Industri} + \text{VA Sektor Jasa}$$

2. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Cara menghitung pendapatan Nasional dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran atas semua barang akhir selama periode waktu tertentu.

Terdapat empat kategori utama pengeluaran yaitu :

- a. Pengeluaran konsumsi masyarakat (*Consumption Expenditure = C*) yaitu pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang konsumsi.
- b. Pengeluaran Investasi bruto (*Gross Investment = I*) yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan (swasta) untuk pembiayaan modal seperti pabrik, peralatan, persediaan, bahkan untuk pemukiman baru
- c. Pengeluaran Pemerintah atau *Government Spending = G*) yaitu pengeluaran atau belanja pemerintah berupa pengeluaran untuk gaji pegawai pemerintah, pengeluaran untuk program-program pembangunan.

- d. Pengeluaran bersih atas Ekspor dan Impor ($\text{Net Exp} = X - M$) yaitu selisih pengeluaran untuk menghasilkan barang ekspor dengan pengeluaran atas pembelian barang impor.

Dengan demikian dapat dirumuskan menghitung PDB pendekatan pengeluaran adalah :

$$\text{PDB/ GDP} = C + I + G + (X - M)$$

Dirasakan perlu untuk memahami lebih lanjut tentang masing-masing pengeluaran tersebut secara terperinci. Berikut adalah penjelasannya.

(1) Pengeluaran Konsumsi (*consumption expenditure*)

Adalah pengeluaran oleh konsumen atas pembelian barang dan jasa. Barang-barang yang dibeli ini terdiri dari :

- a. Barang tahan lama (*durable goods*): barang-barang yang dapat digunakan dalam waktu relatif lama contohnya mobil, peralatan rumah tangga
- b. Barang tidak tahan lama (*nondurable goods*) yaitu barang-barang yang dapat habis dengan segera contohnya makanan, minuman, pakaian.
- c. Jasa (*services*) yaitu produk yang tidak bersifat fisik tetapi berupa layanan hukum, tenaga medis, dan pendidikan.

(2) Pengeluaran Investasi

Investasi swasta ini terdiri dari

- a. Investasi bukan perumahan (*non residential investment*) contohnya untuk membangun pabrik, membeli peralatan mesin-mesin dan sebagainya
- b. Investasi perumahan (*residential investment*) contohnya pengeluaran memperbaiki atau membangun rumah baru atau apartemen.
- c. Persediaan (*Inventories*) yaitu barang yang diproduksi sekarang, tetapi untuk dijual kemudian. Jadi persediaan ini dihitung sebagai modal karena memiliki nilai di masa depan.

Perlu dipahami bahwa Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi dengan penyusutan nilai asset pada suatu periode tertentu.

(3) Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, contoh untuk membangun sekolah, jalan raya, taman, tempat ibadah, lampu lalu lintas, selain itu juga pengeluaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah, gaji anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan gaji militer dan penjaga keamanan.

(4) Pengeluaran Net ekspor

Merupakan selisih bersih antara ekspor (penjualan barang jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri kepada orang asing) dengan impor (pembelian barang dan jasa dari luar negeri oleh masyarakat dalam negeri). Angkanya ini bisa positif bisa negatif

3. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan pendapatan, (Produk Domestik Bruto) adalah pendapatan total yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara. Jadi pendapatan nasional adalah jumlah dari beberapa pendapatan dari faktor produksi antara lain :

- a. Pendapatan pekerja (*compensation of employee*) meliputi upah (wages), gaji (salaries), kontribusi perusahaan pada asuransi sosial, dana pensiun dari perusahaan atau pemerintah.
- b. Pendapatan perusahaan perseorangan (*proprietors' income*) yaitu Pendapatan usaha yang **tidak** berbentuk **perseroan**.
- c. Pendapatan sewa (*rental income*) yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik sumber daya apakah itu lahan/tanah, Gedung maupun property lain dalam bentuk sewa.
- d. Laba Korporasi/perseroan (*corporate profit*) pendapatan usaha bisnis korporasi
- e. Bunga Neto (*net interest*) yaitu bunga yang dibayarkan oleh bisnis.
- f. Pajak tak langsung dikurangi subsidi (*indirect taxes minus subsidies*) . Pajak seperti pajak penjualan, bea cukai, yang dikurangi subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, tanpa pemerintah menerima barang atau jasa sebagai imbalannya.
- g. Pembayaran transfer (*transfer payment*) yaitu pembayaran transfer oleh unit usaha atau juga pemerintah kepada pihak lain

h. Surplus perusahaan pemerintah (*surplus of government enterprises*) yaitu pendapatan perusahaan pemerintah.

Setelah Produk Domestik Bruto (PDB) dikurangi dengan penyusutan di pembahasan sebelumnya, maka akan menghasilkan **Produk Nasional Neto (PNN)** atau *Net National Product (NNP)*. PNN ini nilainya sama dengan pendapatan nasional, walaupun ada sedikit perbedaan, biasanya karena perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Berdasarkan contoh dari *Bureau of economic Analysis*, Amerika Serikat, ditunjukkan pada tabel 3.2 .

Pendapatan nasional atau NNP ini dikurangi dengan pajak tidak langsung minus *subsidies (indirect taxes minus subsidies)* menghasilkan **Pendapatan Nasional Neto (PNN)** atau *Net National Income (NNI)*. Dalam pendekatan pendapatan , PNN ini akan dikurangi

Tabel 3.2

GDP, GNP, NNP dan Pendapatan Nasional, 2017

Keterangan	Million \$ US
GDP atau Poduk Domestik Bruto	19.390,6
(+) Penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri (<i>Net Factor Income from Abroad (NFIFA)</i>)	+934,7
(-) Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri (<i>Net Factor Income to Abroad (NFITA)</i>)	<u>-707,9</u>
GNP atau Produk Nasional Bruto	19.607,4
(-) Penyusutan	<u>-3.034,7</u>
NNP atau Produk Nasional Neto	16.572,7
(-) Statistical Discrepancy	<u>-(-35,0)</u>
	16.607,7

sama dengan Pendapatan Nasional	
Sumber : US bureau of Economic Analysis, 28 Maret 2018	

ataupun ditambahkan oleh beberapa pendapatan faktor seperti pembayaran sewa, bunga yang harus dibayarkan, laba yang dibagi, asuransi sosial, dana pensiun, transfer payment dan sebagainya. Hasil nya disebut sebagai **Pendapatan Individu** atau *Personal Income (PI)*.

Pendapatan Individu ini merupakan pendapatan total rumah tangga. Pada perekonomian yang terdapat campur tangan pemerintah atau perekonomian tiga sektor, pendapatan individu ini dikenakan pajak langsung (*direct taxes*) contohnya pajak penghasilan. Setelah dikurangi dengan pajak langsung ini maka hasilnya disebut **Pendapatan Disposable** Individu yang artinya pendapatan yang dapat dibelanjakan atau *Disposable personal Income (DI)*.

Dari Pendapatan yang dapat dibelanjakan ini, umumnya tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi, sisa dari pendapatan *disposable* yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi ini disebut dengan tabungan individu atau *Personal Saving*.

Tabel 3.3

Pendapatan Nasional, Pendapatan Perorangan, Pendapatan untuk dibelanjakan dan Tabungan Perorangan

Keterangan	Million \$
NNI atau Pendapatan Nasiional	16.607,7
(-) Jumlah pendapatan nasional yang tidak sampai ke rumah tangga	<u>-180,4</u>
Personal Income (PI)	16.427,3
(-) direct Taxes /pajak penghasilan perorangan	<u>-2.048,3</u>
DI atau Dispaoable Income	14.379,0
(-) Konsumsi perorangan	-13.395,5
(-) Pembayaran bunga	-300,5
(-) Pembayaran transfer	<u>-197,0</u>
Saving atau Tabungan perorangan	485,9
Percentage Personal Saving dari pendapatan perorangan	3,4%
Sumber : Bureau of Economic Analysis, 28 Maret 2018	

Tabel 3.3 menunjukkan contoh dari *Beareau Of Economic, Analyiss US*, yang mengganbarkan mulai dari Pendapatan Nasional Bersih (INNI), sampai ke Pendapatan Personal atau *Personal Income* hingga Pendapatan yang dapat dibelanjakan serta tabungan individu dimana tabungan individu sebesar 3,4 % dari pendapatan yang dapat dibelanjakan.

C. PENDAPATAN NASIONAL NOMINAL DAN RIIL

Pendapatan nasional Nominal adalah GDP atau PDB yang diukur dengan uang atau harga saat ini (*current price*) yaitu harga saat ini yang kita bayar untuk barang dan jasa. Biasanya ketika sesuatu diukur dengan harga saat ini. Kita menggambarkannya sebagai suatu nilai nominal, sehingga GDP yang diukur dengan nilai uang saat ini disebut GDP Nominal atau Pendapatan Nasional Nominal.

Perhitungan GDP atau PDB nominal bukan merupakan ukuran yang bagus untuk menggambarkan pertumbuhan output secara agregat, dari waktu ke waktu, karena jika mengukur menggunakan GDP nominal, kita bisa keliru menganggap bahwa terjadi kenaikan output, padahal yang terjadi hanya kenaikan harga (inflasi). Lagipula ada berbagai macam barang dalam perekonomian, sehingga akan terjadi kompleksitas ketika melakukan penyesuaian terhadap perubahan harga.

Oleh sebab itu lebih tepatnya menggunakan konsep pembobotan (*weight*) tingkat kepentingan dari berbagai barang tersebut. Adapun pembobotan yang dilakukan tersebut berdasarkan konsep *fixed-weight procedur* atau Prosedur pembobotan tetap dimana merupakan prosedur yang menggunakan bobot dari tahun yang dijadikan tahun dasar (*base year*), yaitu tahun yang dipilih untuk diambil sebagai bobot atau dasar pertimbangan. GDP yang dihitung berdasarkan tahun dasar ini disebut dengan GDP riil atau GDP harga konstan.

D. KETERBATASAN KONSEP GDP

Terdapat beberapa keterbatasan konsep GDP sebagai perhitungan pendapatan nasional di antaranya :

1. GDP hanya mengukur aktivitas ekonomi saja tetapi tidak dapat menggambarkan ukuran kesejahteraan yang sebenarnya, karena beberapa bentuk eksternalitas dari ekonomi seperti pencemaran lingkungan akibat pengambilan sumber alam untuk kegiatan pembangunan, tingkat kriminalitas tidak tercermin dalam GDP. Secara aturan akuntansinya tidak melakukan penyesuaian terhadap produksi yang mencemari lingkungan
2. Beberapa aktivitas non pasar dan rumah tangga tidak dihitung, walaupun menghasilkan produksi.
3. *Underground Economy* atau aktivitas ekonomi yang bersifat illegal atau melanggar hukum seperti perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, penjualan minuman keras. GDP tidak menghitung aktivitas transaksi maupun pendapatan yang dihasilkan ini.
4. GDP tidak menjelaskan distribusi output di antara para individu di masyarakat. Apakah sebagian besar output terdistribusi hanya ke sebagian kecil masyarakat saja atau dibagi secara merata di masyarakat secara menyeluruh.

PEREKONOMIAN TERBUKA

E. PELAKU DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan barang dan jasa, aliran modal, dan pertukaran teknologi. Dalam perekonomian terbuka terdapat empat sektor utama atau pelaku utama dengan perannya masing-masing :

1. **Sektor Rumah tangga** yaitu konsumen rumah tangga dan individu yang membeli barang dan jasa-jasa serta menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja untuk perusahaan
2. **Sektor perusahaan** yaitu produsen yang menghasilkan barang dan jasa, menggunakan faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal, sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. **Sektor Pemerintah** yaitu pihak yang mengatur (*regulator*) kebijakan fiiskal dan moneter dalam mempengaruhi perekonomian. Perannya juga mencakup pengumpulan pajak dari rumah tangga maupun perusahaan, melakukan pengeluaran untuk menyediakan barang dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dan mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan tersebut.
4. **Sektor Luar negeri** yaitu unit rumah tangga dan unit usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional dan aliran

modal. Perannya digambarkan dengan adanya hubungan ekonomi dengan negara lain dalam bentuk aktivitas ekspor atau menjual barang dan jasa ke negara lain serta aktivitas impor atau membeli barang dan jasa dari negara lain. Lainnya juga adanya pencatatan neraca perdagangan dan neraca modal serta investasi asing.

F. KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional dicapai ketika total pengeluaran agregat sama dengan total output yang dihasilkan. Adapun persamaan keseimbangan tersebut dapat dituliskan sebagai :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Di mana :

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi (Swasta)

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Keseimbangan ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik (C, I, G) serta interaksi dengan ekonomi global melalui kegiatan ekspor dan impor.

G. DAMPAK PEREKONOMIAN TERBUKA TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL

Perekonomian terbuka memungkinkan negara untuk :

1. Memperluas Pasar : Kegiatan ekspor membuka akses ke pasar internasional, meningkatkan permintaan dan produksi dalam negeri.
2. Mendapatkan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri : Kegiatan Impor memungkinkan konsumen mendapat barang dan jasa yang tidak tersedia atau lebih mahal jika diproduksi di dalam negeri.
3. Terjadi aliran Modal: Investasi asing dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Akan tetapi perekonomian terbuka juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada kondisi ekonomi global. Fluktuasi Nilai tukar dan persaingan internasional. Dengan memahami konsep pendapatan nasional dan dinamika perekonomian terbuka, kita dapat mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAGIAN 4

TEORI PEREKONOMIAN KLASIK

A. KONSEP DAN PRINSIP TEORI PEREKONOMIAN KLASIK

Teori perekonomian Klasik merupakan aliran pemikiran ekonomi yang muncul pada awal abad ke 17 yakni tahun 1780 hingga abad 18 yakni pada tahun 1850. Kemunculan teori Ekonomi Klasik dianggap sebagai awal kemunculan ekonomi kapitalis. Adapun tokoh yang paling berpengaruh pada perekonomian Klasik diantaranya: Adam Smith (1729 – 1790), Jeremy Bentham (1748 – 1832), Thomas Robert Malthus (1766 – 1834), Jean Baptiste Say (1767 – 1832), Robert Owen (1771 – 1858), David Ricardo (1772 – 1833) dan John Stuart Mill (1806 – 1873).

Teori Ekonomi klasik berfokus pada prinsip utama diataranya:

1. Mekanisme Pasar

Ekonomi Klasik menekankan peran pasar bebas dalam menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Harga ditentukan dari interaksi antara penawaran dan permintaan dengan intervensi pemerintah yang minimal.

2. *Invisible Hand*

Konsep *invisible Hand* mengenai “tangan tidak terlihat” menunjukkan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi yang mana mereka secara tidak sengaja berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

3. Teori Nilai

Ekonom Klasik memandang nilai dalam hal tenaga kerja dan produksi. Menurut mereka, bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya yakni tenaga kerja.

4. Spesialisasi dan Pembagian Kerja.

Ekonom Klasik menganjurkan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja di perlukan untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan EKonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik menekankan pentingnya akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan Investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

6. Permintaan dan Penawaran

Fokus ekonom Klasik pada permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar; yang mana harga pasar akan menyesuaikan kelebihan permintaan atau penawaran sehingga akan mengarah pada kondisi keseimbangan.

7. Minimnya Intervensi Pemerintah

Ekonom Klasik umumnya mendukung intervensi pemerintah yang terbatas dalam perekonomian, terutama pada kebijakan untuk mendukung perdagangan bebas dan persaingan.

B. TOKOH PEREKONOMIA KLASSIK

Ada beberapa tokoh Perekonomian Klasik antara lain:

1. Adam Smith (1723 – 1790).

Adam Smith merupakan seorang ahli filsafat dan pelopor ilmu ekonomi modern dengan karya terkenalnya yang tertuang dalam buku “*An Inquiry into the nature and cause of the Wealth of Nation*”. Dalam bukunya, Adam Smith merupakan orang yang pertama kali mengemukakan filosofi ekonomi dari system yang jelas dan kebebasan alamiah. Dalam teori ekonomi, Adam Smith dikenal dengan konsep “*Laissez faire*” yang berarti ekonomi perdagangan bebas dimana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang dan jasa secara sukarela. Dalam system *laissez faire*, peranan pemerintah dalam perekonomian sangat minim.

Gagasan terpenting dari pemikiran Adam Smith lainnya adalah konsep “pembagian kerja” yang dibatasi oleh “luasnya pasar” artinya permintaan terhadap pertumbuhan menjadi kemajuan teknis dan bersifat endogen terhadap pertumbuhan permintaan efektif. Gagasan ini penting dalam membantu menjelaskan mengapa perlunya pembangunan industry kapitalis di Inggris pada abad 18 (Smith, 2023).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, Adam Smith menggabungkan kemajuan teknis dalam pemikiran ekonominya dan menjadi dasar bagi ekonom Klasik pada abad ke 19. Namun, pemikiran Smith gagal menyusun analisis tentang bagaimana tabungan dan investasi dapat menjelaskan permintaan aggregate dan output aggregate di sepanjang pertumbuhan. Selanjutnya, ada dua pendekatan yang secara teoritis mampu menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yakni pendekatan yang digerakan oleh penawaran neoklasik dan pendekatan permintaan oleh Keynes (Smith, 2023).

2. Jeremy Bentham (1748 – 1832)

Pemikiran J. Bentham dikenal sebagai pendiri *utilitarianisme* yang artinya setiap tindakan didasarkan pada utilitas yakni manfaat, keuntungan, kebaikan atau kebahagiaan dengan adanya keberagaman dalam membawa konsekuensi-konsekuensi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau ketidakberpihakan kepada pihak yang dipertimbangkan kepentingannya. *Utilitarianisme* sendiri merupakan teori etika normative yang menentukan kebaikan sebagai tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu. Untuk itu, utilitas dianggap sebagai prinsip utama yang dapat dikaitkan dengan akal untuk mendukung ilmu legislative rasional yang dapat dipahami dan tidak menindas.

Pemikiran Bentham mengenai utilitas berbeda dengan konsep teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, utilitas di identifikasikan sebagai kebaikan seseorang yang diukur dari “*preferensi-nya*” yang terungkap dalam pilihan atau perilakunya. Sementara utilitas menurut Bentham sebagai sifat tindakan, hukum, praktik atau institusi (Kolang, Al 2024).

3. Thomas Robert Malthus (1766–1834)

Thomas Roberth Malthus merupakan pakar demografi dan ekonom dalam bidang politik yang juga Professor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di *East India Comppany College di Hertordshire, London Utara*. (Wikipedia. org, 2025). Pemikiran Thomas dalam bukunya “*An Essay on The Principles of Population*” menjelaskan teorinya bahwa manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan akan meningkat sesuai dengan deret hitung. Teori Malthus menyatakan bahwa:

- a. Populasi pada dasarnya dibatasi oleh sarana penghidupan.
- b. Populasi akan selalu meningkat, kecuali jika di batasi oleh beberapa pengendalian yang sangat kuat dan riil.
- c. Pengendalian bertumpu pada kekuatan superior dari populasi guna menjaga pengaruhnya pada tingkat yang sama dengan sarana penghidupan.

Menurut Malthus, terdapat dua cara pengendalian jumlah penduduk; yang pertama adalah dengan “*Positive Checks*”

yakni mengenai bencana alam, kelaparan, wabah penyakit, perang dan perlakuan buruk terhadap perempuan yang akan menyebabkan mengurangi jumlah penduduk ke tingkat yang berkelanjutan dengan sumber daya yang tersedia. Kedua, adalah “*Preventive Checks*” yang secara eksplisit sebagai pengekangan moral seperti bagaimana cara mengendalikan angka kelahiran melalui pencegahan pernikahan usia dini dan memiliki sedikit anak sebagai cara untuk membatasi pertumbuhan penduduk dan mencegah terjadinya krisis. Tanpa adanya pengendalian tersebut, maka dunia akan menghadapi kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan secara meluas. Kesimpulannya, Malthus percaya bahwa meskipun ada pengendalian diri maka ketidakmampuan dalam meningkatkan pasokan pangan perlu dilakukan untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang dimungkinkan menyebabkan terjadinya kelebihan penduduk.

4. Jean Baptiste Say (1767–1832)

J.B. Say merupakan seorang ekonomi dan pebisnis yang berasal dari Perancis. Pemikirannya beraliran liberal Klasik yang mendukung persaingan dan perdagangan bebas serta adanya pembatasan dalam bisnis. Apabila ekonom Klasik memusatkan perhatiannya pada unsur unsur *Invisible hand* yang di kemukakan Adam Smith maka J.B. Say berfokus pada sisi penawaran terutama pada teori tentang modal yang mana modal sebagai penggerak utama dalam produksi. Selain itu,

factor yang sangat penting dimana pembagian kerja menjadi sangat efektif kecuali jika menggunakan banyak alat atau mesin.

Karyanya disebut juga Hukum Say's, dalam ilmu ekonomi yakni "*Say's its own demand*" yang menyatakan bahwa penawaran aggregate menciptakan permintaan aggregate atau penawaran mencerminkan permintaannya sendiri yang artinya permintaan sebagai satu-satunya motif produksi. Selain itu, menurut Say, manusia dapat menciptakan utilitas baru tetapi tidak materi baru. Sehingga yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah memproduksi kembali materi yang ada dalam bentuk lain yang dapat memberikan manfaat yang tidak dimiliki sebelumnya guna meningkatkan kegunaan yang sudah dimilikinya.

5. Robert Owen (1771–1858)

Robert Owen dianggap sebagai "Bapak Sosialis Inggris" dan juga seorang industrialis yang berlawanan dengan konsep Marxis mengenai "perjuangan kelas" (Wikipedia.com, 2025). Selain itu, Owen juga menjadi penggerak Koperasi dan mengacu pada prinsip tentang keadilan tingkat upah. Artinya, upah yang diberikan harus sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa factor; diantaranya: keterampilan, pengalaman, dan tanggung jawab serta memastikan upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Owen juga sukses dalam menyumbangkan banyak laba dan bisnisnya guna meningkatkan taraf hidup karyawannya. Para pekerja memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik dan pemegang saham perusahaan sehingga dapat mengumpulkan dana bagi pembangunan komunitas *Owenite* di masa depan.

6. David Ricardo (1772–1833)

David Ricardo merupakan pakar ekonomi politik Inggris yang paling berpengaruh bersama ekonom Klasik lainnya bersama dengan Adam Smith, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill. David Ricardo menentang teori Merkantilisme yang menekankan perdagangan internasional sebagai sarana meningkatkan kekayaan bagi suatu negara. Ricardo mengusung Teori Keunggulan Komparatif yang menyatakan sebuah negara harus memusatkan kegiatan ekonominya pada industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional serta melakukan perdagangan dengan negara lain guna memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi suatu negara secara nasional. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) juga membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif bagi perekonomian suatu negara.

Selain teori *Comparative Advantage*, Ricardo juga mengembangkan konsep hukum hasil yang semakin berkurang (*Diminishing Return*) pada sektor pertanian. Menurutnya, pada saat input variabel misalnya tenaga kerja di tambah pada lahan

yang tetap maka output marginalnya akan menurun. Hal ini juga berlaku pada teori produksi jangka pendek.

Dalam teori nilai tenaga kerja, Ricardo percaya bahwa nilai dari sebuah barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi termasuk tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi bahan baku. Sementara itu dalam teori distribusi, Ricardo menyatakan pada saat upah riil meningkat, keuntungan riil menurun karena pendapatan dari penjualan barang dibagi berdasarkan keuntungan dan upah.

7. John Stuart Mill (1806–1873).

John Stuart Mill merupakan pendukung Utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. J.S. Mill berkontribusi secara luas pada teori sosial politik dan ekonomi politik. Ada dua pemikiran yang berbeda mengenai *Utilitarianisme* antara J.S. Mill dan Bentham, yang pertama: tolok ukur mengenai nilai kebahagiaan dari banyak orang tidak dilihat dari banyaknya jumlah (kuantitatif), akan tetapi perlu juga melihat kualitasnya karena kebahagiaan memiliki standar kedudukan yang tinggi. Kedua, kesejahteraan secara lahir dan batin harus dimiliki oleh semua masyarakat (Muharrir dan Haryono, 2023).

Utilitarian relevansi terhadap perilaku ekonomi terletak pada representasi tindakan manusia yang memberikan kebermanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip optimalisasi.

C. IMPLIKASI TEORI PEREKONOMIAN KLASIK

Perekonomian Klasik atau dikenal dengan mazhab Klasik muncul pada masa revolusi industry antara akhir 1700-an hingga awal tahun 1900-an. Perhatian ekonom Klasik hampir pada semua bidang dengan meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu ekonomi. Adapun nilai dari pemikiran Mazhab Klasik dari aspek ekonomi diantaranya:

1. Nilai dan Distribusi.

Adam Smith dalam pemikiran ekonominya merancang teori nilai (*The Value of Theory*) guna menghasilkan teori harga relative yang didasarkan pada penjumlahan biaya per unit dari tenaga kerja, modal dan input tanah kedalam produksi, sementara penilaian input ditentukan secara terpisah. Smith juga menjelaskan nilai komoditas dalam keseimbangan jangka panjang dalam hal upah, laba dan sewa. Yang mana, harga berfluktuasi disekitar harga keseimbangan jangka panjang dan dieliminasi oleh mobilitas modal dalam merespon peluang memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Para ahli klasik beranggapan bahwa teori biaya produksi harus menyediakan teori penilaian jasa factor produksi guna menghindari penjelasan atas harga.

2. Uang

Teori moneter klasik berfokus pada uang emas, perak dan uang kertas, dan menganggap deposito bank sebagai alat untuk meningkat kecepatan sirkulasi (*velocity of circulation*). Tingkat

harga suatu negara adalah fungsi dari jumlah uang beredar. Sedangkan tingkat harga keseimbangan tergantung pada keseimbangan neraca pembayaran, yang mana jika harga terlalu tinggi, maka arus keluar logam akan mengurangi jumlah uang beredar (dan tingkat harga) kearah keseimbangan, dan sebaliknya. Sedangkan Emas dan perak tergantung pada biaya produksi, sedangkan nilai relative emas ditentukan oleh keseimbangan neraca pembayaran.

3. Perdagangan

Ciri yang paling menonjol dalam perekonomian klasik adalah pentingnya perdagangan, yang mana: 1). Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan output per individu. 2). Kebebasan perdagangan akan meningkatkan output per jam kerja akan tetapi dibatasi oleh luasnya pasar. Kebebasan perdagangan yang meningkat akan meningkatkan perluasan pasar sehingga memungkinkan pembagian kerja yang lebih besar. 3). Perdagangan internasional didasarkan pada sumber keunggulan absolute. 4). Teori *Vent for Suplus* yakni sebagai imbalan hasil atas barang (dan bahan mentah) yang diprouksi secara efisien di dalam negeri. 5). Tenaga harus bermigrasi untuk mencari produktivitas tinggi karena hasilnya harus di jual ke pasar yang sama di manapun ia bekerja.

4. Mekanisme Harga

Semua ekonom klasik mengikuti Adam Smith mengenai mekanisme harga. Harga dalam pandangan Klasik berevolusi

melalui persaingan antara pembeli dan penjual. Permintaan pasar adalah fungsi distribusi dari peminta harga yang diinginkan. Sedangkan penawaran pasar adalah distribusi dari harga yang ditawarkan oleh pemasok.

Apabila kuantitas barang yang dibawa kepasar melebihi apa yang pembeli bersedia beli dengan harga penawaran maka penjual bersedia menerima harga yang lebih rendah. Akibatnya, harga akan turun di bawah harga alamiahnya (biaya penjualan) sesuai dengan besarnya kelebihan. Oleh karenanya, optimasi muncul dari pasar karena tidak ada individu yang memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan. Karakteristik mekanisme pasar disebut "*Excess rent hypothesis*" yakni minimalisasi potensi yang diperlukan untuk menwujutkan keseimbangan kompetitif.

5. Pertumbuhan Ekonomi.

Teori pertumbuhan Adam Smith yang menggabungkan kemajuan teknis sebagai kemajuan besar dalam pemikiran ekonomi bagi ekonom Klasik abad ke 19. Akan tetapi, seperti ekonom klasik lainnya, Smith, gagal mengembangkan teori tentang output dan pertumbuhan yang mana belum dapat menjelaskan hubungan antara tabungan dan investasi untuk menjelaskan keseimbangan permintaan aggregate dan output aggregate sepanjang jalur pertumbuhan.

D. PENGARUH PEREKONOMIAN KLASIK PADA PEREKONOMIAN MODERN

Adam Smith dan David Ricardo adalah tokoh yang paling terkenal pada pertengahan 19 dalam mengembangkan teori nilai yang di dasarkan pada pendekatan biaya produksi yang mendominasi ilmu ekonomi. Nilai barang dan jasa di ukur oleh sejumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi. Fokusnya adalah peran harga relative dalam penyesuaian ekonomi, Permintaan dan utilitas juga memiliki peran yang penting hanya sebagai *peripheral* (abadi) untuk pemahaman yang lengkap dan menyeluruh sebagai fungsi perekonomian (Kates, 2020).

Selanjutnya, konsep *Laissez Faire* dan *invisible hand* yang di kemukakan Adam Smith merupakan landasan pemikiran ekonomi modern mengenai pasar dalam mengalokasikan sumber daya guna mencapai kesejahteraan. Harga di tentukan oleh kekuatan pasar yakni penawaran dan permintaan. Pasar bebas menciptakan alokasi sumber daya efisien karena mendorong kompetisi dan efisiensi. Dalam system pasar bebas menurut Adam Smith, individu bertindak atas dasar keuntungan pribadi sendiri dan secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perdagangan internasional, David Ricardo menyatakan bahwa keunggulan komparatif berbeda dengan keunggulan absolute. Dalam teori Keunggulan absolute Adam Smith, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya absolute yang

rendah dari pada negara lain. Sedangkan dalam keunggulan comparative, setiap negara memaksimalkan produksi dan konsumsinya sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih besar, dimana bagi negara yang kurang efisien dalam memproduksi semua barang dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang menguntungkan dengan adanya keunggulan comparative.

Konsep modal yakni akumulasi modal dan investasi yang di kemukakan oleh ekonomi Klasik juga dapat menjadi dasar pemahaman bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang dimaksud meliputi uang dan asset yang di investasikan oleh individu dan perusahaan yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau investasi dengan tujuan mencapai pertumbuhan modal atau penghasilan yang lebih tinggi di masa depan.

Pemikiran Klasik dalam mendukung pemerintah terbatas, akan tetapi peranan pemerintah dalam ekonomi tetap relevan dalam ekonomi modern karena peraturan dan pengawasan pemerintah juga diakui hal yang paling penting untuk menjalankan ekonomi pasar, meskipun ada batasan yang ketat terhadap intervensi pemerintah. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan harga atau alokasi sumberdaya karena pasar yang akan mengatur semuanya (*laissez faire*).

BAGIAN 5

TEORI KEYNESIAN

A. KONSEP-KONSEP DASAR DALAM TEORI KEYNESIAN

Konsep dasar makroekonomi Keynesian berputar di sekitar ide bahwa permintaan agregat adalah pendorong utama aktivitas ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Teori ini, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, muncul sebagai respons terhadap kegagalan ekonomi klasik dalam menjelaskan Depresi Besar tahun 1930-an. Berikut adalah poin-poin penting dari konsep dasar makroekonomi Keynesian.

1. Permintaan Agregat

Teori Keynesian menempatkan permintaan agregat, atau total belanja dalam perekonomian, sebagai faktor penentu utama output dan lapangan kerja dalam jangka pendek, sebuah pandangan yang berbeda dari ekonomi klasik yang lebih menekankan pada sisi penawaran.

Komponen permintaan agregat

a. Konsumsi rumah tangga (C)

Konsumsi rumah tangga, yang merupakan bagian penting dari permintaan agregat, mencakup seluruh pengeluaran individu dan keluarga untuk barang dan jasa, dari kebutuhan pokok hingga barang mewah.

Faktor yang memengaruhi konsumsi rumah tangga meliputi:

1. Pendapatan. Pendapatan adalah faktor penentu utama konsumsi. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar kemampuan mereka untuk mengkonsumsi. Pendapatan disposabel (pendapatan setelah pajak) adalah yang paling relevan dalam menentukan tingkat konsumsi.
2. Kekayaan. Kekayaan, seperti kepemilikan aset (misalnya, rumah dan saham), juga memengaruhi konsumsi. Rumah tangga dengan kekayaan yang lebih besar cenderung mengkonsumsi lebih banyak, bahkan jika pendapatan mereka tidak tinggi.
3. Ekspektasi konsumen. Ekspektasi tentang kondisi ekonomi masa depan memengaruhi keputusan konsumsi. Jika konsumen optimis tentang masa depan, mereka cenderung mengkonsumsi lebih banyak. Sebaliknya, jika mereka pesimis, mereka cenderung menabung lebih banyak.
4. Suku bunga. Suku bunga memengaruhi biaya pinjaman. Suku bunga yang rendah mendorong konsumsi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Ini terutama berlaku untuk pembelian barang tahan lama yang sering dibiayai dengan pinjaman.
5. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, seperti pajak dan transfer pendapatan, dapat memengaruhi pendapatan disposabel dan, oleh karena itu, konsumsi.

Misalnya, penurunan pajak dapat meningkatkan pendapatan disposabel dan mendorong konsumsi.

6. Faktor sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya juga memengaruhi pola konsumsi. Misalnya, tren mode dan gaya hidup dapat memengaruhi jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Fungsi konsumsi Keynes dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$C = a + bY_d$$

dimana:

C = Konsumsi rumah tangga

a = Konsumsi otonom (konsumsi saat pendapatan disposabel nol)

b = Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC)

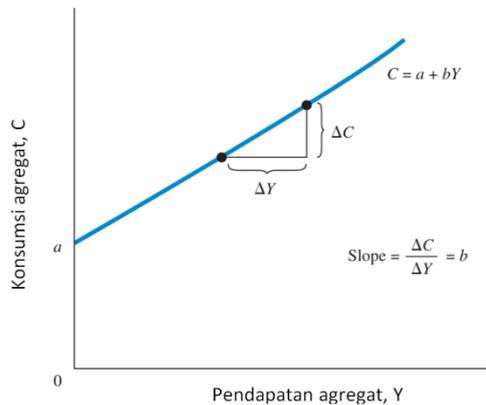
Y_d = Pendapatan disposabel

Konsumsi Otonom (a) adalah tingkat konsumsi minimum yang akan dilakukan oleh rumah tangga, bahkan jika pendapatan disposabel mereka nol. Konsumsi otonom mencakup pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.

Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal (MPC) mengukur seberapa besar perubahan konsumsi rumah tangga akibat perubahan pendapatan disposabel. Nilainya selalu berada antara 0 dan 1. Sebagai contoh, MPC sebesar 0,8 menunjukkan bahwa dari setiap penambahan pendapatan sebesar Rp1, rumah

tangga akan membelanjakan Rp0,80 dan menabung sisanya, yaitu Rp0,20..

Pendapatan Disposabel (Y_d) adalah pendapatan yang tersisa setelah pajak dan transfer pendapatan. Pendapatan disposabel adalah faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi.



Gambar 5.1 Fungsi Konsumsi Agregat

Teori konsumsi Keynes menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan konsumsi dan merangsang pertumbuhan ekonomi saat resesi.

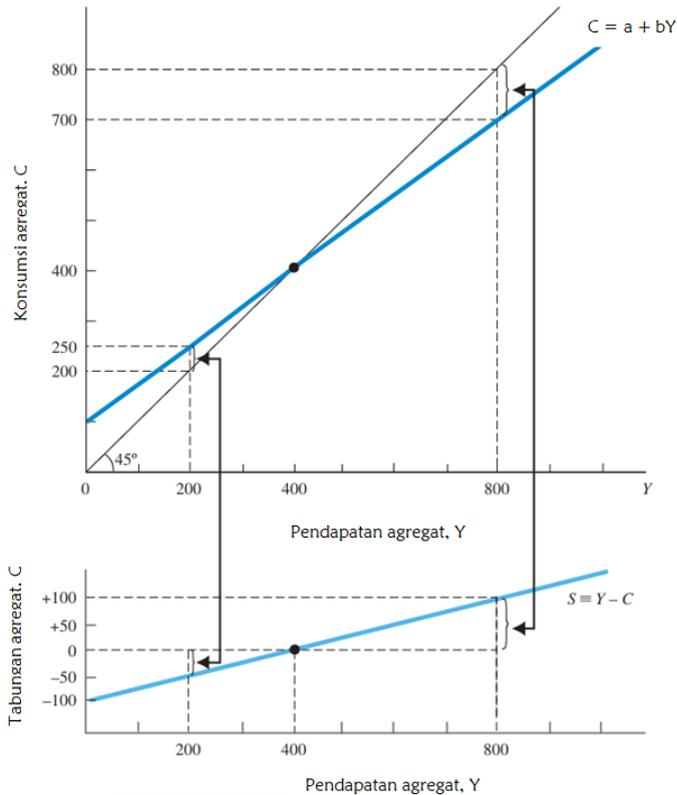
Tabungan agregat (S) dalam perekonomian adalah selisih antara pendapatan agregat dan konsumsi agregat.

$$S \equiv Y - C \equiv Y - (a + bY)$$

$$S \equiv Y - a - bY = -a + (1 - b)Y$$

Kecenderungan menabung marjinal ($MPS = 1 - b$) adalah bagian dari perubahan pendapatan yang ditabung atau $MPS = \Delta S / \Delta Y$. Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) dan MPS harus

berjumlah 1 atau $MPC + MPS = 1$. Setiap perubahan pendapatan akan dialokasikan antara konsumsi dan tabungan.



Gambar 5.2 Fungsi Konsumsi Agregat dan Tabungan Agregat

Gambar 5,2 (atas) menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi dalam ekonomi. Sumbu horizontal mewakili pendapatan total, sementara sumbu vertikal menunjukkan total konsumsi. Garis diagonal 45 derajat digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah konsumsi sama dengan pendapatan. Kurva biru yang naik dari kiri bawah ke kanan atas

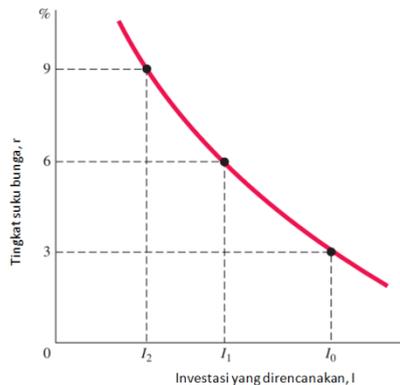
menggambarkan fungsi konsumsi, yang menunjukkan bahwa konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada tingkat pendapatan 200, konsumsi melebihi pendapatan, sedangkan pada tingkat pendapatan 800, konsumsi lebih rendah dari pendapatan.

Gambar 5.2 (bawah) menggambarkan hubungan antara pendapatan dan tabungan dalam ekonomi. Sumbu horizontal menunjukkan total pendapatan, sama seperti pada grafik sebelumnya, sementara sumbu vertikal menunjukkan total tabungan. Garis biru yang naik dari kiri bawah ke kanan atas mewakili fungsi tabungan, yang menunjukkan bahwa tabungan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada tingkat pendapatan 200, tabungan bernilai negatif, menunjukkan bahwa konsumsi melebihi pendapatan. Sebaliknya, pada tingkat pendapatan 800, tabungan bernilai positif, menunjukkan bahwa pendapatan melebihi konsumsi.

Grafik-grafik tersebut menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, di mana garis 45 derajat berfungsi sebagai pembanding visual. Titik potong antara garis konsumsi dan garis 45 derajat menandakan titik impas. Pada pendapatan rendah, konsumsi melebihi pendapatan (tabungan negatif), sementara pada pendapatan tinggi, konsumsi lebih rendah (tabungan positif).

b. Investasi (I)

Investasi dalam konteks ekonomi makro mencakup pengeluaran perusahaan untuk barang modal fisik baru, seperti mesin, bangunan, dan persediaan. Pengeluaran ini dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di masa depan, berbeda dengan investasi dalam aset keuangan.



Gambar 6.3 Investasi yang direncanakan, I

Faktor utama yang memengaruhi tingkat investasi meliputi:

1. Suku bunga. Suku bunga memengaruhi biaya pinjaman. Suku bunga yang rendah mendorong investasi karena membuat pinjaman lebih terjangkau. Perusahaan seringkali meminjam uang untuk membiayai investasi mereka, sehingga suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya investasi.
2. Ekspektasi keuntungan. Ekspektasi tentang keuntungan masa depan memengaruhi keputusan investasi. Jika

- perusahaan optimis tentang prospek bisnis mereka, mereka cenderung berinvestasi lebih banyak.
3. **Tingkat teknologi.** Kemajuan teknologi dapat mendorong investasi dalam barang modal baru yang lebih efisien. Perusahaan perlu berinvestasi untuk tetap kompetitif dalam lingkungan teknologi yang terus berubah.
 4. **Kebijakan pemerintah.** Kebijakan pemerintah, seperti insentif pajak dan subsidi, dapat memengaruhi keputusan investasi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk investasi dalam energi terbarukan.
 5. **Kondisi ekonomi.** Kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, memengaruhi keputusan investasi. Selama resesi, perusahaan cenderung mengurangi investasi karena permintaan yang lemah dan ketidakpastian ekonomi.

Peran investasi dalam ekonomi

- (1) Investasi merupakan komponen penting dari permintaan agregat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- (2) Investasi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.
- (3) Investasi dalam teknologi dan infrastruktur dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

c. Pengeluaran Pemerintah (G)

Sebagai bagian dari permintaan agregat, pengeluaran pemerintah (G) mencakup pembelian barang dan jasa oleh sektor publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur, human capital (pendidikan dan kesehatan), public goods (pertahanan), serta transfer payments (program sosial) dan operational expenditures (administrasi).

Faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah

1. Kebijakan Fiskal. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, yang mencakup keputusan tentang pengeluaran dan pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengurangi pengeluaran untuk mengendalikan inflasi.
2. Kondisi ekonomi. Selama resesi, pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung permintaan agregat. Selama boom ekonomi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mencegah inflasi.
3. Prioritas politik. Prioritas politik pemerintah juga memengaruhi pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemerintah yang menekankan pada pendidikan akan mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor tersebut.

4. Pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak, dan sektor lainnya akan mempengaruhi jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Peran pengeluaran pemerintah dalam ekonomi

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja.
2. Menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik, seperti infrastruktur dan pendidikan, yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta.
3. Mendistribusikan pendapatan. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan mengurangi ketidaksetaraan.
4. Menstabilkan perekonomian. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi fluktuasi siklus bisnis.

d. Ekspor Neto (NX)

Ekspor neto (NX) adalah salah satu komponen penting dari permintaan agregat dalam ekonomi makro. Ini mengacu pada selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara.

Ekspor neto (NX) dihitung dengan mengurangi nilai impor dari nilai ekspor:

$$NX = \text{Ekspor (X)} - \text{Impor (M)}$$

Kegiatan ekspor melibatkan penjualan produk dalam negeri ke pasar internasional, sedangkan impor mencakup pembelian produk asing untuk konsumsi domestik. Selisih antara kedua aktivitas ini menghasilkan ekspor neto. Nilai ekspor neto yang positif menandakan surplus perdagangan, di mana negara tersebut memperoleh lebih banyak pendapatan dari penjualan luar negeri daripada pengeluaran untuk pembelian luar negeri. Sebaliknya, nilai ekspor neto yang negatif menandakan defisit perdagangan, di mana pengeluaran untuk impor melebihi pendapatan dari ekspor.

Faktor yang memengaruhi ekspor neto meliputi:

Nilai tukar. Nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing memengaruhi daya saing ekspor dan impor. Mata uang domestik yang lemah membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, yang dapat meningkatkan ekspor neto. Sebaliknya mata uang domestik yang kuat membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah, itu akan menurunkan ekspor neto.

Pendapatan luar negeri. Pendapatan negara-negara mitra dagang memengaruhi permintaan terhadap ekspor domestik. Jika pendapatan negara-negara mitra dagang meningkat, permintaan terhadap ekspor domestik juga cenderung meningkat.

Pendapatan domestik. Pendapatan domestik yang meningkat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa impor.

Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan pemerintah, seperti tarif dan kuota, dapat memengaruhi ekspor dan impor. Tarif yang tinggi dapat mengurangi impor, sementara subsidi ekspor dapat meningkatkan ekspor.

Selera Konsumen. Selera konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi permintaan ekspor dan impor.

Inflasi. Inflasi suatu negara yang relatif lebih tinggi dari negara lain akan membuat barang produksi dalam negeri lebih mahal di pasar internasional, dan membuat barang impor lebih murah.

Ekspor neto, yang merupakan selisih antara ekspor dan impor, memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan agregat, produksi ekonomi, dan tingkat pekerjaan suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ekspor neto sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang efektif.

2. Intervensi Pemerintah

Keynes percaya bahwa pasar bebas tidak selalu dapat mencapai keseimbangan pada tingkat lapangan kerja penuh, terutama selama resesi atau depresi. Oleh karena itu, ia menganjurkan

intervensi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengangguran.

a. Kebijakan Fiskal

Melalui kebijakan fiskal, yang melibatkan perubahan pengeluaran dan pajak, pemerintah berupaya memanipulasi permintaan agregat. Saat ekonomi melemah, peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak dapat meningkatkan permintaan. Sebaliknya, saat ekonomi terlalu kuat, pengurangan belanja atau kenaikan pajak dapat mengurangi permintaan dan mencegah inflasi.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter melibatkan penggunaan suku bunga dan pasokan uang untuk mempengaruhi permintaan agregat. Bank sentral (misalnya, Bank Indonesia) dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Suku bunga yang rendah membuat pinjaman lebih murah, yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru dan rumah tangga untuk membeli barang-barang tahan lama. Bank sentral juga dapat meningkatkan pasokan uang untuk menurunkan suku bunga dan merangsang perekonomian. Selama boom ekonomi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga atau mengurangi pasokan uang untuk mendinginkan perekonomian dan mencegah inflasi.

Intervensi pemerintah dapat membantu menstabilkan perekonomian dan mengurangi dampak resesi atau depresi. Namun, penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter dengan hati-hati untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, seperti inflasi atau peningkatan utang publik.

3. Kekakuan Harga dan Upah

Perbedaan utama antara pandangan Keynesian dan ekonomi klasik terletak pada asumsi fleksibilitas harga dan upah. Ekonomi klasik meyakini harga dan upah sepenuhnya fleksibel, otomatis menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan pasar dengan lapangan kerja penuh. Sebaliknya, Keynes berpendapat bahwa harga dan upah cenderung "kaku ke bawah" selama resesi, menghambat penyesuaian pasar yang cepat.

Ada beberapa alasan mengapa harga dan upah cenderung kaku ke bawah:

- a. Kontrak jangka panjang. Banyak kontrak upah dan harga ditetapkan dalam jangka panjang, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dalam waktu singkat.
- b. Biaya menu. Perusahaan mungkin enggan menurunkan harga karena biaya yang terkait dengan perubahan harga, seperti biaya mencetak ulang daftar harga atau mengubah label.

- c. Upah efisiensi. Perusahaan mungkin enggan menurunkan upah karena khawatir menurunkan moral pekerja dan produktivitas.
- d. Serikat Pekerja. Serikat pekerja sering kali menentang penurunan upah, sehingga sulit bagi perusahaan untuk menurunkan upah.
- e. Ekspektasi. Ekspektasi para pekerja, yang seringkali tidak ingin upah nominalnya turun, walau secara riil mungkin saja tidak mengalami penurunan daya beli.

Kekakuan harga dan upah memiliki dampak penting pada perekonomian:

- a. Pengangguran yang berkepanjangan. Selama resesi, ketika permintaan agregat turun, kekakuan upah mencegah upah turun untuk menyesuaikan diri dengan permintaan tenaga kerja yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pengangguran yang berkepanjangan.
- b. Peran intervensi pemerintah. Karena pasar tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat, Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi pengangguran.

Dengan demikian, konsep kekakuan harga dan upah memainkan peran penting dalam teori Keynesian dan memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian.

4. Pengangguran tidak sukarela

Perbedaan mendasar antara pandangan Keynesian dan ekonomi klasik terletak pada interpretasi mereka terhadap pengangguran. Ekonomi klasik meyakini bahwa pengangguran adalah hasil dari pilihan individu untuk tidak bekerja pada tingkat upah yang berlaku, dan pasar tenaga kerja akan selalu menyesuaikan diri untuk mencapai lapangan kerja penuh melalui penurunan upah. Sebaliknya, Keynes berpendapat bahwa pengangguran, terutama saat resesi, sering kali bersifat tidak sukarela, di mana banyak individu bersedia bekerja namun tidak dapat menemukan pekerjaan akibat kurangnya permintaan agregat. Dalam pandangan Keynes, intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja.

Penyebab pengangguran tidak sukarela adalah:

- a. Kurangnya permintaan agregat. Penyebab utama pengangguran tak sukarela adalah kurangnya permintaan agregat. Ketika permintaan agregat rendah, perusahaan mengurangi produksi dan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Hal ini dapat terjadi selama resesi atau depresi, ketika konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran mereka.
- b. Kekakuan upah. Kekakuan upah dapat menyebabkan pengangguran ketika perusahaan tidak dapat menurunkan upah sebagai respons terhadap penurunan permintaan

tenaga kerja, sehingga mereka mengurangi jumlah pekerja. Menurut pandangan Keynesian, pengangguran terutama disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan permintaan melalui peningkatan pengeluaran, pengurangan pajak, atau penurunan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi, yang pada akhirnya mengurangi pengangguran. Konsep ini menekankan peran penting pemerintah dalam mengatasi pengangguran selama resesi.

5. Peran Ekspektasi

Menurut Keynes, harapan atau ekspektasi terhadap kondisi ekonomi di masa depan sangat memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi saat ini. Terutama, ekspektasi negatif dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi.

Perusahaan akan meningkatkan investasi ketika mereka merasa yakin tentang prospek keuntungan di masa depan, dan sebaliknya. Demikian pula, konsumen akan meningkatkan pengeluaran ketika mereka merasa optimis tentang kondisi keuangan mereka, dan akan menabung lebih banyak dalam situasi ketidakpastian.

Ekspektasi yang pesimis dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat, karena perusahaan mengurangi investasi dan konsumen mengurangi konsumsi. Penurunan permintaan agregat ini dapat memperburuk resesi atau depresi.

Keynes menekankan bahwa ekspektasi memainkan peran krusial dalam ekonomi, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk membangun kepercayaan dan ekspektasi positif. Kebijakan fiskal dan moneter yang dapat dipercaya dan efektif adalah kunci untuk mendorong investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, dalam kerangka Keynesian, pemahaman tentang bagaimana ekspektasi memengaruhi perilaku ekonomi sangat penting untuk menjelaskan fluktuasi ekonomi dan merancang kebijakan yang tepat.

6. Multiplier (Pengganda)

Dalam pandangan Keynesian, konsep pengganda menjelaskan bagaimana perubahan pengeluaran otonom, seperti investasi atau belanja pemerintah, menghasilkan dampak yang lebih besar pada pendapatan nasional. Pengganda ini mengukur responsivitas pendapatan nasional terhadap perubahan pengeluaran otonom.

Ketika pengeluaran otonom meningkat, dana yang dibelanjakan akan berputar dalam perekonomian, menciptakan efek domino yang meningkatkan permintaan agregat dan output secara keseluruhan. Besarnya pengganda dipengaruhi oleh kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC), yaitu proporsi pendapatan tambahan yang dibelanjakan untuk konsumsi. Semakin tinggi MPC, semakin besar pengganda.

Dalam ekonomi sederhana, pengganda dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pengganda} = 1 / (1 - \text{MPC})$$

Misalnya, jika MPC adalah 0,8, maka pengganda adalah $1 / (1 - 0,8) = 5$. Ini berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran otonom sebesar Rp1, pendapatan nasional akan meningkat sebesar Rp5.

Konsep pengganda menjelaskan bahwa perubahan dalam pengeluaran otonom, terutama pengeluaran pemerintah, memiliki efek yang lebih besar pada produksi dan lapangan kerja. Pemerintah dapat memanfaatkan hal ini untuk menstimulasi perekonomian selama resesi. Perubahan kecil dalam pengeluaran dapat menghasilkan dampak yang signifikan karena efek berantai, dan pengganda juga menjelaskan mengapa resesi dapat menjadi sangat parah. Konsep ini merupakan alat penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif.

B. PENENTUAN OUTPUT (PENDAPATAN) KESEIMBANGAN

Pendapatan keseimbangan dalam model dua sektor ditentukan oleh interaksi antara pengeluaran agregat (konsumsi dan investasi) dan produksi agregat (pendapatan nasional). Keseimbangan tercapai ketika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional, atau ketika tabungan sama dengan investasi.

Dalam model dua sektor, pengeluaran agregat (AD) terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga (C) dan Investasi Perusahaan (I)

$$AD = C + I$$

Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan disposabel (dalam model dua sektor, pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposabel). Fungsi konsumsi dapat ditulis sebagai:

$$C = a + bY$$

Dalam model sederhana ini, investasi diasumsikan otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Investasi dianggap konstan (otonom):

$$I = I_0$$

Dengan menggabungkan fungsi konsumsi dan investasi, kita mendapatkan pengeluaran agregat:

$$AD = a + bY + I_0$$

Pendapatan nasional (Y) berada dalam keseimbangan ketika pengeluaran agregat (AD) sama dengan produksi agregat (Y).

$$Y = AD$$

$$Y = a + bY + I_0$$

Untuk menemukan pendapatan keseimbangan, kita selesaikan persamaan di atas untuk Y:

$$Y - bY = a + I_0$$

$$Y(1 - b) = a + I_0$$

$$Y = (a + I_0) / (1 - b)$$

$(1 / (1 - b))$ adalah pengganda (multiplier), yang menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan nasional akibat perubahan pengeluaran otonom (a atau I_0).

Keseimbangan juga dapat dicapai ketika tabungan (S) sama dengan investasi (I).

$$S = Y - C = Y - (a + bY) = -a + (1 - b)Y$$

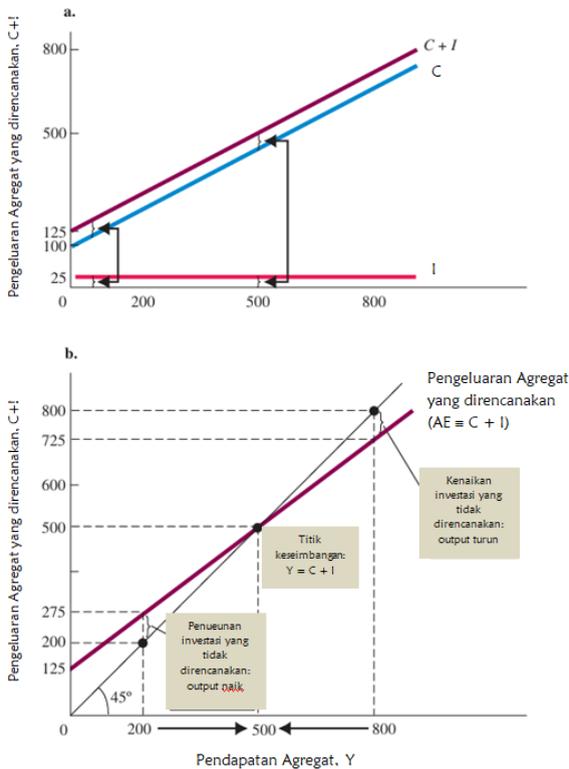
Keseimbangan: $S = I$

$$-a + (1 - b)Y = I_0$$

$$(1 - b)Y = a + I_0$$

$$Y = (a + I_0) / (1 - b)$$

Gambar 6.4 memperlihatkan model ekonomi dua sektor yang menganalisis penentuan pendapatan keseimbangan. Pada bagian (a), grafik mengilustrasikan bagaimana konsumsi dan investasi, sebagai komponen, membentuk total pengeluaran agregat. Bagian (b) menunjukkan bahwa titik keseimbangan tercapai ketika pengeluaran agregat setara dengan pendapatan agregat, yang ditentukan melalui interaksi kedua variabel tersebut. Penyesuaian menuju keseimbangan ini terjadi melalui perubahan inventaris yang tidak terduga.



Gambar 5.4 Keseimbangan output agregat

Keseimbangan ekonomi tercapai saat pendapatan total (Y) sama dengan pengeluaran total (AE), ditandai dengan titik E. Jika pendapatan lebih rendah dari titik ini, pengeluaran melebihi produksi, menyebabkan stok barang tak terduga berkurang, sehingga perusahaan meningkatkan produksi dan pendapatan naik. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi titik keseimbangan, pengeluaran lebih rendah dari produksi, menyebabkan stok barang tak terduga bertambah, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan pendapatan turun.

BAGIAN 6

PENGANGGURAN DAN INFLASI

A. PENDAHULUAN

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dua aspek penting yang sering menjadi perhatian dalam kajian ekonomi makro adalah pengangguran dan inflasi. Kedua variabel ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara serta kesejahteraan masyarakatnya. Pengangguran mengacu pada kondisi di mana individu yang siap bekerja dan aktif mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran sering kali menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara.

Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar potensi permasalahan sosial dan ekonomi, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, memahami penyebab, jenis, dan dampak pengangguran penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Di sisi lain, inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Inflasi yang terkendali dapat menjadi tanda pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi inflasi

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menimbulkan masalah. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat, sementara deflasi atau penurunan harga secara umum dapat menandakan lemahnya permintaan dalam perekonomian. Oleh karena itu, memahami mekanisme inflasi dan cara pengukurannya menjadi hal yang sangat penting bagi pembuat kebijakan ekonomi.

B. PENGANGGURAN

Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang berusia 16 tahun atau lebih, mampu bekerja, dan aktif mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks ekonomi, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian.

Menurut Bureau of Labor Statistics (BLS), seseorang dapat dikategorikan sebagai:

1. Bekerja (Employed): Jika bekerja minimal satu jam dalam seminggu sebagai pekerja berbayar atau bekerja tanpa bayaran selama 15 jam atau lebih dalam usaha keluarga.
2. Menganggur (Unemployed): Jika tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan secara aktif dalam empat minggu terakhir.
3. Tidak dalam Angkatan Kerja (Not in Labor Force): Jika tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, misalnya karena pensiun,

menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, atau putus asa mencari pekerjaan (discouraged workers).

Tingkat pengangguran diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

1. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya:

a. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)

Terjadi ketika seseorang sedang dalam masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau baru memasuki dunia kerja.

Contoh: Lulusan baru yang mencari pekerjaan atau karyawan yang pindah kerja untuk mendapatkan posisi yang lebih baik.

b. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)

Disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Contoh: Tenaga kerja di industri manufaktur yang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan kemajuan teknologi.

c. Pengangguran Siklis (Cyclical Unemployment)

Disebabkan oleh fluktuasi dalam siklus ekonomi, terutama saat resesi di mana permintaan tenaga kerja menurun.

Contoh: Banyak pekerja kehilangan pekerjaan saat krisis ekonomi global.

d. Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Terjadi ketika pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu.

Contoh: Petani atau pekerja pariwisata yang hanya bekerja pada musim panen atau liburan.

e. Pengangguran Terselubung (Hidden Unemployment)

Terjadi ketika seseorang bekerja tetapi tidak memanfaatkan keterampilannya secara optimal atau bekerja dengan produktivitas rendah.

Contoh: Seorang lulusan sarjana yang bekerja sebagai buruh kasar karena tidak sesuai dengan bidangnya.

2. Faktor Penyebab Pengangguran

Pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Beberapa faktor utama penyebab pengangguran adalah:

- a. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi
- b. Perkembangan Teknologi
- c. Resesi Ekonomi
- d. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan
- e. Perubahan Pola Konsumsi dan Produksi
- f. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

3. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, baik dari segi sosial maupun ekonomi

a. Dampak Ekonomi

Penurunan Daya Beli: Masyarakat yang menganggur kehilangan pendapatan sehingga daya beli mereka menurun, yang berdampak pada rendahnya permintaan barang dan jasa.

Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi: Jika banyak orang menganggur, produksi barang dan jasa berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Beban Fiskal Pemerintah Meningkat: Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk bantuan sosial, tunjangan pengangguran, dan program pelatihan kerja.

b. Dampak Sosial

Meningkatnya Kemiskinan: Pengangguran yang berkepanjangan dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Tingkat Kriminalitas yang Lebih Tinggi: Keterbatasan akses terhadap pekerjaan dapat menyebabkan meningkatnya angka kejahatan.

Ketidakstabilan Sosial dan Politik: Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang berujung pada demonstrasi atau ketegangan politik.

4. Upaya dan Kebijakan Mengatasi Pengangguran

Pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi tingkat pengangguran. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan:

a. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Meningkatkan Investasi Infrastruktur: Pemerintah dapat meningkatkan belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Subsidi bagi Perusahaan: Memberikan insentif pajak atau bantuan keuangan bagi perusahaan yang membuka lebih banyak lapangan kerja.

Menurunkan Suku Bunga: Mendorong investasi dan konsumsi dengan menurunkan suku bunga agar perusahaan lebih mudah mendapatkan modal usaha.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan Kejuruan: Mengembangkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Pelatihan dan Sertifikasi Profesi: Memberikan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi atau pergeseran industri.

c. Dukungan bagi Kewirausahaan

Kredit Usaha Mikro dan Kecil: Memberikan pinjaman berbunga rendah bagi UMKM agar dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja.

Pendidikan Wirausaha: Mendorong budaya kewirausahaan melalui program pelatihan bisnis dan akses pasar bagi wirausahawan baru.

d. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Reformasi Peraturan Ketenagakerjaan: Menyesuaikan regulasi tenaga kerja agar lebih fleksibel bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja baru.

Program Insentif bagi Pekerja Paruh Waktu: Memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka.

e. Peningkatan Investasi dan Inovasi Teknologi

Menarik Investasi Asing: Menciptakan iklim investasi yang kondusif agar lebih banyak perusahaan asing menanamkan modalnya di dalam negeri.

Pengembangan Industri Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja baru.

C. INFLASI

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang meningkat sementara pendapatan belum tentu naik secara proporsional.

Inflasi diukur menggunakan beberapa indeks harga, seperti:

- a. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI): Mengukur perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
- b. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI): Mengukur perubahan harga yang diterima produsen dalam berbagai tahapan produksi.
- c. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB Deflator): Mengukur perubahan harga untuk semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian.

Tingkat inflasi dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{CPI Tahun (n)} - \text{CPI Tahun (n-1)}}{\text{CPI Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

1. Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan dan penyebabnya:

a. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Komponennya

Inflasi Umum (Headline Inflation): Inflasi seluruh barang/jasa yang diawasi secara periodik. Inflasi umum adalah gabungan dari inflasi inti, inflasi administered prices, dan inflasi volatile goods.

Inflasi Inti (Core Inflation): Dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi makro seperti nilai tukar. Bersifat lebih permanen, mencerminkan tren inflasi jangka panjang.

Inflasi yang Diadministrasikan (Administered Price Inflation): Terjadi pada barang atau jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti BBM. Sering dipengaruhi oleh kebijakan terkait subsidi dan regulasi harga.

Inflasi Bergejolak (Volatile Goods/Volatile Foods Inflation): Terjadi pada barang yang harganya sering berfluktuasi akibat faktor musiman atau gangguan eksternal. Umumnya terjadi pada bahan makanan seperti beras.

b. Berdasarkan Tingkat Bobotnya

Inflasi Ringan (Mild Inflation): Inflasi yang berada di bawah 10% per tahun. Umumnya masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu perekonomian.

Inflasi Sedang (Moderate Inflation): Inflasi berkisar antara 10% hingga 30% per tahun, mulai mengganggu daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Inflasi Tinggi (Gallopning Inflation): Inflasi di atas 30% per tahun yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Hiperinflasi (Hyperinflation): Inflasi yang sangat tinggi, biasanya di atas 100% per tahun, di mana uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat.

c. Berdasarkan Penyebab

Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation): Terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi.

Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation): Disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja.

Inflasi Struktural (Structural Inflation): Terjadi akibat ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi, seperti sistem distribusi yang tidak efisien atau kurangnya pasokan bahan pokok.

2. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Berikut beberapa penyebab utama inflasi:

- a. Permintaan Agregat yang Meningkat (Demand-Pull Inflation)
- b. Kenaikan Biaya Produksi (Cost-Push Inflation)
- c. Peningkatan Jumlah Uang Beredar
- d. Ekspektasi Inflasi
- e. Krisis Ekonomi dan Faktor Eksternal

3. Dampak Inflasi terhadap Perekonomian

Inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian, meskipun dalam beberapa kasus inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

- a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
- b. Mengurangi Beban Utang

- c. Menurunnya Daya Beli Masyarakat
- d. Ketidakstabilan Ekonomi
- e. Kenaikan Suku Bunga
- f. Defisit Neraca Perdagangan

4. Strategi dan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Pemerintah dan bank sentral memiliki berbagai strategi dan kebijakan untuk mengendalikan inflasi agar tidak merugikan perekonomian.

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga.

Menaikkan Suku Bunga (Tight Monetary Policy): Dengan menaikkan suku bunga, pinjaman menjadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi menurun, yang pada akhirnya menekan inflasi.

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO): Bank sentral menjual surat berharga untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar.

Meningkatkan Cadangan Wajib Bank: Bank sentral dapat meningkatkan jumlah dana yang harus disimpan oleh bank komersial, sehingga mengurangi jumlah uang yang bisa dipinjamkan ke masyarakat.

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pajak untuk mengendalikan inflasi.

Mengurangi Pengeluaran Pemerintah: Mengurangi belanja negara untuk mengendalikan peredaran uang.

Meningkatkan Pajak: Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sehingga menekan inflasi.

c. Kebijakan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang

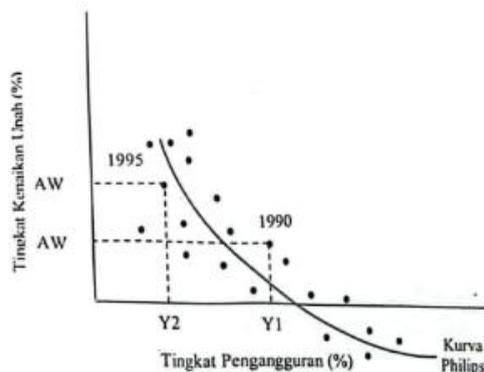
Subsidi untuk Barang Pokok: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk bahan pokok agar harga tetap terjangkau.

Stabilisasi Pasokan Barang: Memastikan distribusi barang yang lancar untuk menghindari kelangkaan.

D. HUBUNGAN ANTARA PENGANGGURAN DAN INFLASI

Pengangguran dan inflasi merupakan dua indikator utama dalam ekonomi makro yang memiliki hubungan saling mempengaruhi. Hubungan ini dijelaskan melalui Kurva Phillips, yang menunjukkan trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran.

1. Kurva Phillips: Trade-off antara Pengangguran dan Inflasi



Kurva Phillips menggambarkan hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Menurut konsep ini:

- a. Ketika pengangguran rendah, perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja, sehingga upah naik. Peningkatan upah menyebabkan biaya produksi naik, yang kemudian mendorong kenaikan harga.
- b. Ketika pengangguran tinggi, daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa melemah, sehingga inflasi cenderung turun.

Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi sering kali dihadapkan pada pilihan antara menurunkan pengangguran dengan risiko inflasi yang lebih tinggi, atau menekan inflasi dengan risiko meningkatnya pengangguran.

Contoh: Jika pemerintah ingin mengurangi pengangguran, mereka bisa menggunakan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga atau menambah jumlah uang beredar. Hal ini meningkatkan konsumsi dan investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi inflasi akan meningkat.

2. NAIRU dan Dinamika Inflasi

Konsep NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) berperan penting dalam memahami hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. NAIRU adalah tingkat pengangguran terendah yang dapat dipertahankan tanpa menyebabkan inflasi meningkat secara

terus-menerus. Kurva Phillips dalam jangka pendek menunjukkan hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran, ketika pengangguran menurun, inflasi meningkat, dan sebaliknya. Namun, dalam jangka panjang, teori NAIRU menyatakan bahwa hubungan ini tidak berlaku karena ekspektasi inflasi masyarakat akan berubah. Jika pemerintah mencoba menekan pengangguran di bawah NAIRU, maka pekerja dan perusahaan akan mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi dan menyesuaikan upah serta harga.

- a. Karena itu, inflasi akan terus meningkat meskipun pengangguran tetap rendah.
- b. Dalam kondisi ini, kurva Phillips jangka pendek akan bergeser ke atas, menciptakan tingkat inflasi yang lebih tinggi untuk tingkat pengangguran yang sama.
- c. Sebaliknya, jika pengangguran berada di atas NAIRU, inflasi cenderung menurun karena lemahnya permintaan tenaga kerja dan rendahnya daya beli masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Pengangguran dan Inflasi

Hubungan antara pengangguran dan inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Ekspektasi Inflasi.
- b. Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Perubahan Struktural dalam Ekonomi.
- d. Kebijakan Moneter dan Fiskal.

BAGIAN 7

SIKLUS BISNIS

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diamati melalui perkembangan jumlah output yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap jumlah output yang dihasilkan, menyebabkan perekonomian mengalami pasang surut atau disebut juga dengan fluktuasi ekonomi.

Setiap negara didunia ini pasti mengalami pasang surut (fluktuasi) dalam perekonomian. Fluktuasi jangka pendek disebut dengan siklus bisnis, fluktuasi jangka Panjang disebut dengan konjungtur. Fluktuasi ekonomi diartikan sebagai ketidak seimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik turun secara tidak pasti. Penyebab ketidakstabilan ini bisa jadi karena naik turunnya variabel nilai tertentu akibat perubahan mekanisme pasar. Dalam teori ekonomi mikro dijelaskan bahwa besar kecilnya output dipengaruhi oleh jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Secara makro didefinisikan output adalah jumlah barang dan jasa total yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu (Case et al., 2020). Seandainya dalam perekonomian terjadi penurunan tingkat konsumsi

masyarakat yang disebabkan oleh penurunan pendapatan, maka para produsen akan menyikapi dengan cara mengurangi kegiatan produksi. Apabila kegiatan produksi turun maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan sehingga terjadi pengangguran. Fluktuasi kinerja perekonomian tersebut dinamakan dengan siklus bisnis. Perekonomian suatu negara kadang-kadang menunjukkan kinerja baik, namun dilain waktu mengalami penurunan, kemudian membaik lagi dan mampu mencapai puncak, turun lagi dan seterusnya.

B. KONSEP SIKLUS BISNIS

Siklus bisnis erat kaitannya dengan output perekonomian jangka Panjang dan fluktuasi yang terjadi dalam jangka pendek. Dalam hal ini siklus bisnis didefinisikan sebagai penyimpangan output perekonomian dari tren pertumbuhannya (Hodrick & Prescott; Lucas, 1977 dalam Warsito, 2023). Tren pertumbuhan disini dianggap sebagai level perekonomian dalam jangka Panjang sedangkan penyimpangan output menunjukkan adanya fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek.

Siklus bisnis adalah fluktuasi alami dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada priode waktu tertentu, baik pada tingkat makro (ekonomi negara) maupun mikro (perusahaan). Adapun faktor yang mempengaruhi siklus bisnis adalah biaya produksi, investasi, suku bunga dan perdagangan. Pada umumnya organisasi

keuangan mengukur siklus bisnis dengan maksud untuk mengetahui naik-turunnya Produk Domestik Bruto (PDB), serta pengaruh biaya produksi dan perdagangan terhadap PDB. Mithal (2004) dan Botha (2004) dalam Lestari, (2011) mendefinisikan siklus bisnis sebagai deviasi dari output terhadap tren. Dalam konteks ini timbul priode ekspansi dan kontraksi terhadap aktifitas perekonomian. Menurut mereka siklus bisnis berdampak terhadap inflasi, pengeluaran pemerintah, ketenagaan kerjaan, penjualan, produksi dan beberapa aspek perekonomian (Botha,2004 dalam Lestari, 2011).

C. TAHAP-TAHAP SIKLUS BISNIS

Tahap-Tahap siklus bisnis ditunjukkan pada gambar 1 dengan kategori sebagai berikut : (Purnamaningrum et al., 2015)

1. Fase lembah (trough).

Tahap ini kinerja perekonomian sedang berada dibawah dari kondisi ideal yang diinginkan. Indikasi dari kondisi ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pengangguran tinggi, produksi rendah, keuntungan rendah, keyakinan terhadap prospek ekonomi rendah dan kapasitas menganggur (*idle capacity*)

2. Pemulihan (Recovery)

Tahap ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, indikasi yang ditunjukkan dengan tanda-tanda sebagai berikut : Kesempatan kerja mulai bertambah, pendapatan dan belanja

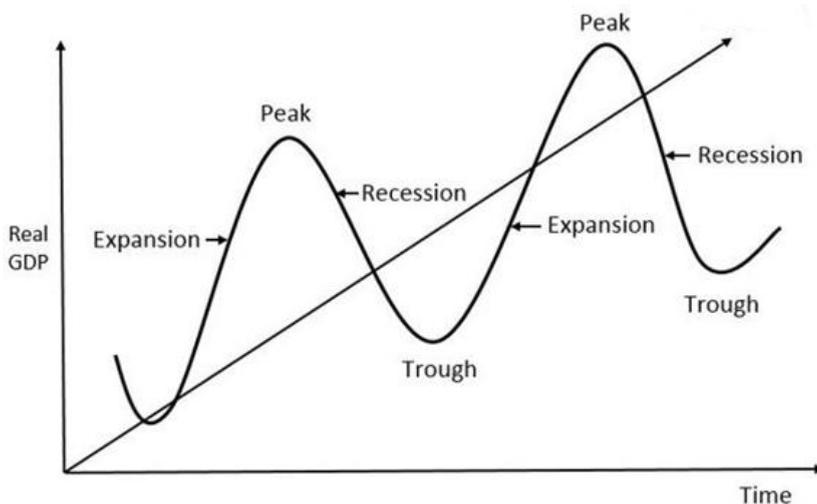
konsumsi mulai meningkat, penjualan dan laba meningkat dan investasi meningkat.

3. Puncak (Peak)

Tahap ini menggambarkan posisi siklus paling tinggi, yakni tampak dari kinerja ekonomi yang sangat kondusif dengan ciri-ciri sebagai berikut: Kapasitas yang digunakan secara penuh, Kekurangan tenaga kerja terutama tenaga kerja trampil dan bahan baku, kenaikan permintaan, biaya produksi naik, dan harga naik.

4. Resesi (Recession)

Setelah mencapai puncak, hanya ada satu jalan yaitu turun kebawah. Seperti halnya masa keemasan yang pernah dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 1920-1929, kemudian harus melewati masa penurunan kegiatan ekonomi yang cukup drastic pada akhir tahun 1929, tanda-tandanya adalah sebagai berikut: penurunan GNP riil, mesin-mesin yang sudah tua menjadi tidak ekonomis, pengangguran mulai meningkat dan bila parah menjadi depresi. Pada fase ini aktivitas ekonomi mulai melambat, permintaan turun, dan perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan laba.



Tahap-tahap Siklus Bisnis menurut Etty, et al (2011) adalah :

1. Fase ekspansi

Merupakan fase awal dimana perekonomian mengalami ekspansi melebihi ketinggian siklus sebelumnya. Didalam ekspansi terdapat beberapa priode termasuk priode peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan siklus pertumbuhan. Ekspansi merupakan suatu priode dimana permintaan dan produksi mengalami peningkatan dan kepercayaan konsumen juga meningkat sehingga terjadi peningkatan angka penjualan. Inflasi dan suku bunga juga mengalami kenaikan selama priode ekspansi.

2. Fase kontraksi.

Ekspansi bisnis meningkat sampai puncaknya setelah itu diikuti fase kontraksi. Selama fase ini beberapa factor seperti penjualan, harga, produksi dan penggunaan tenaga kerja mulai menurun. Penurunan ini biasanya diikuti oleh penurunan suku bunga. Apabila penurunan ini terjadi secara drastic dan dalam jangka Panjang maka akan terjadi resesi. Resesi ini biasanya didefinisikan sebagai penurunan Siklus Bisnis dalam dua kuartal berturut-turut. Ini terjadi biasanya kurang dari satu tahun sampai satu tahun dan berimbas pada kontraksi beberapa sector ekonomi. Resesi dimulai pada puncak siklus bisnis dan berakhir di titik terendah (*trough*).

3. Fase pemulihan (*recovery*).

Kadang kala dalam sebuah perekonomian terjadi pengurangan permintaan dan kenaikan produksi. Fase *recovery* bergerak sampai ekspansi periode baru dan siklus bisnis dimulai kemabli. *Recovery* merupakan fase transisional yang dimulai dari titik ekonomi terendah (*trough*) sampai perekonomian pulih kembali dan kembali ke semula. Secara umum, pertumbuhan yang paling paling kuat terjadi pada fase *recovery* namun durasinya paling pendek dibandingkan resesi (Botha,2004 dalam Lestari, 2011). Menurut teori siklus bisnis, saat terjadi *booming* ekonomi, kredit akan bergerak tak terkendali, moral *hazard* tumbuh sehingga masa kemakmuran akan berbalik menjadi krisis. Siklus bisnis dianggap sebagai irama ekonomi dan juga sebagai bagian dari ketidakseimbangan moneter.

Tahap-tahap siklus bisnis menurut (Warsito, 2023) :

1. Ekspansi

Ekspansi adalah keadaan dimana output terus tumbuh dan berada di atas tren jangka panjang. Pertumbuhan ini terus terjadi hingga mencapai puncak (*peak*).

2. Kontraksi

Kontraksi terjadi dari titik puncak, output perekonomian terus mengalami penurunan hingga kembali ke level

D. MANFAAT SIKLUS BISNIS

1. Membantu memudahkan dalam mengidentifikasi perubahan serta tren ekonomi yang sedang terjadi.
2. Dengan memahami siklus bisnis, membantu dalam pembuatan keputusan yang tepat dan lebih baik dalam keuangan perusahaan.
3. Membantu perusahaan mendapatkan pelanggan dan investor dalam jumlah yang besar.
4. Memperoleh ekspansi cakupan bisnis yang signifikan bagi perusahaan.
5. Mengurangi terjadinya resiko kerugian di masa depan.

E. CARA MENGUKUR SIKLUS BISNIS

1. Berdasarkan perspektif waktu. Untuk mengukur waktu pada siklus bisnis, baik negara serta perusahaan perlu menetapkan tanggal dalam setiap siklus bisnis.
2. Berdasarkan tingkat keparahan. Dalam mengukur tingkat keparahan pada siklus bisnis dilakukan dengan menghitung tahap ekspansi maupun resesi secara terpisah. Cara mengukur tingkat keparahan pada tahap resesi dilakukan berdasarkan tiga metrik, yaitu:
 - a. Kedalaman: Berapa jumlah intensitas pada tahap resesi.
 - b. Difusi: Seberapa luas tingkat resesi pada perekonomian nasional.
 - c. Durasi: Berapa lama umumnya tahap resesi akan berlangsung.

Ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghitung tiga metrik, misalnya untuk menentukan tingkat keparahan pada tahap ekspansi, yaitu :

- a. *Pronounced* : Seberapa signifikan tahap ekspansi?
- b. *Pervasif* : Seberapa besar pencapaian aspek ekonomi pada tahap ekspansi ?
- c. *Persistent* : Apakah saat ini tahap ekspansi berlangsung lebih lama dari biasanya ?

F. FAKTOR-FAKTOR SIKLUS BISNIS

Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi Siklus Bisnis, yaitu:

1. Ketersediaan Modal

Salah satu faktor yang mempengaruhi siklus bisnis adalah ketersediaan modal, yaitu seberapa besar perusahaan atau individu memiliki dana untuk investasi, belanja atau membayar utang. Jika sebuah perusahaan mempunyai modal yang cukup, maka bisnis mereka dapat ditingkatkan dengan lebih efektif.

2. Penawaran dan Permintaan.

Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga pada priode tertentu. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga pada priode tertentu. Penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan jasa dan ketersediaan barang dipasar. Permintaan dan penawaran mempengaruhi siklus bisnis.

G. STUDI EMPIRIS

1. Penelitian Warsito, 2023 yang berjudul “Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”. Salah satu *shock* yang secara signifikan mengganggu tren perekonomian global adalah Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara didunia harus terdistraksi oleh pandemic yang disebabkan oleh virus Covid-19 dengan berbagai varian. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi

perdagangan volume perdagangan global. Saat krisis mulai terjadi, tekanan pandemic membuat transaksi perdagangan mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelum pandemic baik dari segi konektivitas maupun volume perdagangan (Richard & Tomiura, 2020). Pada tahun 2020, volume perdagangan global tumbuh minus yaitu -8,2%. Pembatasan ekspor dan impor selama pandemic dibanyak negara dan lemahnya permintaan global menjadi pemicu kontraksi perdagangan. Fluktuasi perekonomian dan perdagangan juga terjadi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga turun seiring dengan terjadinya resesi akibat covid-19 (Suryahadi et al., 2020) Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2021), konsumsi rumah tangga turun sebesar 2,63% dan investasi perusahaan turun 4,95% dibanding periode sebelumnya. Walaupun konsumsi pemerintah naik 1,94%, secara umum covid-19 menekan output perekonomian. Covid-19 menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pada 5 tahun sebelum Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5%, namun pada tahun 2020 berkontraksi dan mencatat minus -2,07% (BPS, 2021). Menurut catatan Badan kebijakan fiskal (2022), pada tahun 2022, pada tahun 2021 perekonomian Indonesia dapat tumbuh 3,7% dan pada tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh lebih cepat yaitu pada rentang 5,1% - 5,4%. Nilai dan volume perdagangan Indonesia juga terdampak Covid-19 (BPS, 2021) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan -2,61%

sedangkan volume ekspor turun 11,13%. Dari sisi impor juga mengalami hal serupa. Nilai impor turun 17,34% dan volume impor juga turun 6,61% disbanding periode sebelum Covid-19.

Metode yang digunakan adalah dekomposisi Produk Domestik Bruto (PDB) riil kuartalan Indonesia periode 2000-2022 kedalam tren pertumbuhan dan fluktuasi jangka pendek dengan Hodrick-Prescott (HP) Filter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi dan diikuti resesi pada kuartal berikutnya. Setelah itu terjadi pemulihan ekonomi dan kembali mencapai output optimal jangka Panjang setelah 1,5 tahun. Karakteristik resesi dan pemulihan ekonominya mengikuti bentuk W (W-Shaped) karena adanya tekanan baru saat proses pemulihan berupa varian Delta yang menyebabkan terjadi resesi baru. Dengan melihat siklus bisnis perekonomian, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat baik fiscal maupun moneter pada setiap fase.

2. Penelitian (Lestari, 2011), yang berjudul “Intensitas Perdagangan Dan Keselarasan Siklus Bisnis Di Asean-4 Dan Uni Eropa”. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris bagaimana siklus bisnis pada perekonomian di ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina) dipengaruhi oleh meningkatnya perdagangan dengan Uni Eropa. Peningkatan perdagangan dapat mempengaruhi pergerakan siklus bisnis mitra dagang menjadi konvergen atau divergen. Metode yang

digunakan dan vectorautoregression (VAR). Metode regresi berdasarakan sedangkan metode VAR berbasis pada analisis time series. Ada empat variabel yang digunakan yaitu siklus bisnis, intensitas perdagangan, koordinasi kebijakan fiscal dan koordinasi kebijakan moneter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa intensitas perdagangan dan koordinasi kebijakan moneter merupakan factor dominan yang menyebabkan siklus bisnis pada perekoomian ASEAN-4 menjadi lebih selaras. Kondisi ini berimplikasi pentingnya penggunaan mata uang bersama.

BAGIAN 8

KEBIJAKAN FISKAL

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

Pengertian Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian, sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan Fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. (Suparmoko, M. ,2002)

Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur oleh beberapa faktor, salah satunya termasuk

produk domestik bruto (PDB), yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun. Faktor lainnya adalah permintaan agregat, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang diminta para pelaku ekonomi pada titik harga tertentu. Kurva permintaan agregat menyatakan bahwa pada tingkat harga yang lebih rendah, maka lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi. Kebijakan fiskal mempengaruhi pengukuran ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan PDB dan permintaan agregat secara berkelanjutan.

B. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi yang baik. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi dan harga yang stabil. (Prasetyo, E. ,2023).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Tentunya ini juga meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Mengurangi pajak adalah cara pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang cenderung meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis, yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

2. Lapangan Kerja

Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis. Secara bersamaan, hal ini dapat mendorong perekrutan dan meningkatkan pekerjaan.

3. Stabilitas Harga

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global, atau “booming,” diikuti oleh perlambatan ekonomi,

atau “busts.” Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti inflasi tinggi dengan meningkatkan pajak dan pemangkasan pengeluaran. Intinya, pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi konstan yang lebih stabil.

C. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL

Ada sejumlah fungsi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara dalam rangka mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

1. Fungsi Alokasi

Peran kebijakan fiskal berkaitan dengan fungsi alokasi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berhubungan

dengan penggunaan APBN semaksimal mungkin untuk perekonomian. Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan sumber daya yang terbatas oleh pemerintah untuk memprioritaskan dan mengalokasikan dana ke berbagai program, proyek, dan kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Peran kebijakan fiskal adalah mengalokasikan dana publik dari pendapatan pemerintah ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan sosial lainnya. Pemerintah harus membuat keputusan alokasi yang tepat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi kebijakan fiskal dalam distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Distribusi dalam konteks kebijakan fiskal merujuk pada cara pendapatan, kekayaan, dan sumber daya dipersiapkan, dikelola, dan didistribusikan di dalam masyarakat. Salah satu peran kebijakan fiskal adalah mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan sistem pajak yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan, untuk memperbaiki kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat. Distribusi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial. Kebijakan fiskal dapat dirancang untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang kurang mampu

dan terpinggirkan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang cukup dari negara, misalnya melalui program-program bantuan sosial atau subsidi. Melalui penggunaan pajak, subsidi, dan transfer pembayaran, kebijakan fiskal dapat membantu dalam redistribusi kekayaan di masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mempromosikan kesetaraan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berhubungan dengan distribusi kekayaan.

3. Fungsi Stabilitas

Salah satu fungsi kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah untuk menyeimbangkan perekonomian nasional. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi fluktuasi yang berlebihan dalam siklus bisnis. Fungsi kebijakan fiskal adalah mengendalikan tingkat inflasi dalam perekonomian. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menyesuaikan belanja publik dan tarif pajak agar sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Selain mengendalikan inflasi, kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatasi deflasi atau penurunan harga yang berlebihan dalam perekonomian. Pemerintah dapat meningkatkan belanja publik atau mengurangi tarif pajak untuk merangsang permintaan agregat dan mencegah terjadinya deflasi yang merugikan.

Selain itu, fungsi kebijakan fiskal membantu pemerintah menetapkan prioritas dalam penggunaan dana publik, dengan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan investasi atau dukungan paling mendesak. Ini bisa mencakup peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan akses ke layanan kesehatan dasar, atau investasi dalam penelitian dan inovasi. Dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi suatu negara. Misalnya, investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan teknologi dapat membantu meningkatkan kapasitas manusia dan inovasi. Fungsi kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan energi di daerah-daerah yang terpinggirkan atau kurang berkembang, sehingga membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

D. JENIS KEBIJAKAN FISKAL

Ada dua jenis utama kebijakan fiskal: ekspansif dan kontraktif. Berikut adalah penjelasannya :

1. Kebijakan fiskal ekspansif, dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi.
2. Kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.

E. MACAM-MACAM KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL

Secara umum, *fiscal policy* terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan pengelolaan utang. Masing-masing komponen memiliki

1. Kebijakan Perpajakan

Secara spesifik dapat dikatakan bahwa kebijakan perpajakan merupakan komponen utama dari *fiscal policy*. Hal tersebut dikarenakan karakteristik pajak sebagai sumber pembangunan, yang bersifat memaksa, dan tercantum dalam konstitusi. Pajak sendiri, baik pajak langsung maupun tak langsung, merupakan pendapatan terbesar pemerintah suatu negara. Penetapan

kebijakan ini untuk menjaga pajak agar tetap progresif, melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada menurunnya produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila tarif pajak turun, masyarakat akan gencar membelanjakan hartanya, sehingga inflasi meningkat.

2. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah pada APBN, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Selain untuk bidang-bidang tersebut, di dalam pengeluaran modal ini juga termasuk bunga internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan belanja yang efektif dan efisien pada suatu negara. Hal tersebut bisa digunakan untuk pelunasan pada pembiayaan yang mengalami defisit, dalam mengisi selisih antara pendapatan dan belanja negara.

3. Kebijakan Investasi

Tingkat optimalisasi atas investasi domestik maupun asing sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan laju ekonomi tetap pada jalurnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi maka optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan, karena melalui arus modal internasional, perekonomian

domestik dapat diintegrasikan secara layak dan bersinergi dengan ekonomi global.

4. Kebijakan Pengelolaan Utang

Kondisi anggaran pada saat pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, maka keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus, namun sebaliknya, kalo pengeluaran pemerintah lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, keadaan ini disebut dengan defisit. Kondisi defisit pada anggaran, maka untuk menutupnya pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan obligasi negara atau Surat Utang Negara. Tentu saja, itu berarti akan menambah jumlah utang dan bunga. Pilihan lain, apabila terlalu mendesak, pemerintah bisa mencetak uang secara berlebih untuk membiayai utang. (Mardiasmo, D., & Suhardjanto, H. , 2023).

F. HUBUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DAN KEBIJAKAN FISKAL

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Keterkaitan antara APBN dan kebijakan fiskal sangat erat, karena kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

APBN disusun dari rencana anggaran belanja dulu baru kemudian ditentukan pendapatan negara. Setelah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambatnya 6 bulan tahun anggaran berakhir. Presiden menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan. Ada 7 indikator yang digunakan Pemerintah untuk menyusun APBN yang sering disebut Asumsi Dasar Ekonomi Makro yaitu : Produk Domestik Bruto (PDB), Pertumbuhan ekonomi tahunan, Inflasi, Nilai tukar rupiah per USD, Suku bunga SBI 3 bulan, Harga minyak dunia, dan Produksi minyak dunia, sebagai contoh Asumsi Dasar Ekonomi Makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 %, rata-rata nilai tukar

Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7%, kemudian Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Sementara, *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. , 2024)

Peran strategis APBN semakin nyata terutama dalam periode mulai 2020 sampai dengan 2024. APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. Strategi tersebut diwujudkan dengan komitmen untuk terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya. Di sisi lain rancang bangun APBN akan tetap diupayakan juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

G. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DAN STRATEGI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ada dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu pendapatan negara (terutama pajak) dan belanja negara. Kedua instrumen ini bekerja saling berkaitan untuk mencapai tujuan fiskal yang diinginkan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran.

1. Pajak dan Penerimaan Negara

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan menjadi instrumen fiskal yang paling signifikan. Pemerintah menggunakan kebijakan pajak untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembiayaan belanja negara. Kebijakan pajak dapat berupa pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak barang dan jasa).

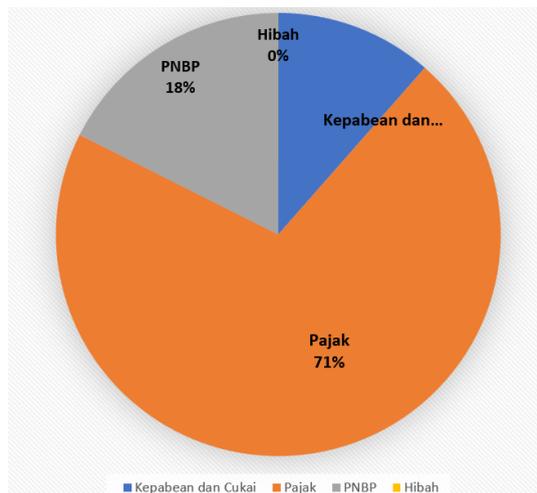
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mendorong atau mengendalikan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian.

- a. **Pajak Langsung:** Pajak yang dibebankan langsung kepada individu atau badan hukum, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. Dengan menyesuaikan tarif pajak ini, pemerintah dapat mengatur tingkat pendapatan masyarakat dan mengarahkan konsumsi atau tabungan.
- b. **Pajak Tidak Langsung:** Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai. Pemerintah sering menggunakan pajak tidak langsung ini

untuk mempengaruhi harga barang tertentu atau untuk tujuan sosial, seperti mengurangi konsumsi barang berbahaya seperti rokok dan alkohol.

Sejalan dengan proyeksi perekonomian domestik yang disertai upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia usaha, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau 71% dari total penerimaan negara. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan proyeksi ekonomi, efektivitas implementasi UU HPP, dan Peningkatan Kepatuhan Dan Integrasi Teknologi, meskipun perlu juga diwaspadai tantangan terutama risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; serta perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau. Penerimaan negara dari Kepabean dan Cukai sebesar Rp321,0 triliun atau 11% dari total penerimaan negara. Selanjutnya PNBP ditargetkan sebesar Rp492,0 triliun atau memberikan kontribusi kepada penerimaan negara sebesar 18%.. Beberapa faktor yang akan memengaruhi PNBP pada tahun 2024 adalah fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batu bara. Sementara itu, kontribusi Pendapatan dari Kekayaan Negara

Dipisahkan diproyeksikan meningkat. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (*Momerandum of Understanding*).



Gambar 8.1 Kontribusi Sumber Penerimaan Negara Tahun 2024

2. Belanja Negara

Belanja negara adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai proyek infrastruktur, subsidi, dan program sosial. Pemerintah dapat menggunakan belanja negara untuk meningkatkan perekonomian, terutama selama periode resesi, karena melalui kebijakan belanja, pemerintah dapat merangsang permintaan

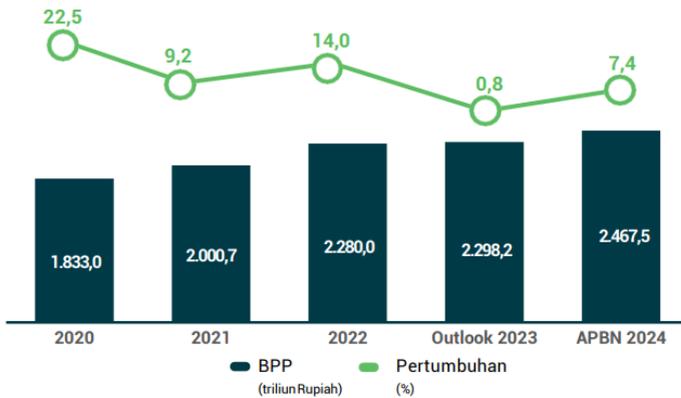
agregat dengan meningkatkan belanja publik, yang akan mendorong konsumsi dan investasi.

- a. Belanja Investasi: Pengeluaran untuk proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
- b. Belanja Konsumsi: Pengeluaran pemerintah untuk kegiatan yang tidak langsung menghasilkan aset produktif, seperti subsidi, gaji pegawai negeri, dan program kesejahteraan sosial. Belanja ini sering kali digunakan untuk merangsang perekonomian dalam jangka pendek.

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Maka dari itu, belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, belanja negara pada periode 2019-2023 telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. (Rahayu, S. , 2023). Di tengah dinamika yang terjadi, APBN melalui belanja negara tetap menjalankan perannya sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan tema RKP

dan Kebijakan Fiskal tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2024 diarahkan untuk: (1) Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

- a. Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- b. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program *perlinsos* melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
- c. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal regional; dan
- d. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. (Kementerian Keuangan, 2025)



Gambar 8.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024

Belanja negara atau Belanja Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 2.467,5 triliun, atau tumbuh sebesar 7,4% dibandingkan Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp 2.298,2 triliun. Kenaikan Belanja Negara tahun 2024 digunakan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi

H. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal membantu menciptakan dan memelihara stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal membantu menghindari fluktuasi yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi, seperti resesi atau inflasi yang tinggi. (Setiawan, B. ,2023).Kebijakan pajak dapat juga

melalui pemotongan atau peningkatan pajak serta pengeluaran publik, kebijakan fiskal dapat membantu mengendalikan laju inflasi atau deflasi yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

Berikut adalah beberapa implementasi kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia.

1. Pemotongan Pajak Untuk Kelompok Menengah Rendah

Pemerintah dapat memutuskan untuk memberlakukan pemotongan pajak bagi individu atau kelompok pendapatan menengah rendah sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan sosial. Implementasi kebijakan fiskal dilakukan dengan mengenakan pajak tinggi pada kalangan ekonomi ke atas, ini dikenal dengan skema pajak progresif. Sesuai PP No 55 Tahun 2022, warga masyarakat yang gajinya di bawah Rp4,5 juta, per bulan tidak dikenakan pajak atau bebas pajak. Aturan ini menetapkan bahwa PTKP yang berlaku saat ini masih tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. (<https://klikpajak.id>)

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi bersifat tarif progresif untuk Penghasilan kena pajak sebagai berikut:

- a. hingga Rp 60 juta dikenakan pajak 5%.

- b. antara Rp 60 juta dan Rp 250 juta dikenakan pajak 15%.
- c. Rp 250 juta sampai Rp 500 juta dikenakan pajak 25%.
- d. Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenakan pajak 30%.
- e. lebih dari Rp 5 miliar dikenakan pajak 35%.

2. Pajak Atas Barang-Barang Mewah

Pemerintah dapat memberlakukan pajak tambahan atau tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, atau properti mewah sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Ini juga merupakan bagian dari contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Tujuannya selain membatasi konsumsi barang-barang tertentu terutama impor, juga bisa jadi upaya pemerataan pendapatan. Pemerintah resmi memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang menyasar barang mewah mulai 1 Januari 2025. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2024 tentang pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah. (<https://www.pajak.com>)

3. Stimulus Fiskal Dalam Krisis Ekonomi

Dalam situasi resesi atau krisis ekonomi, salah satu kebijakan fiskal adalah pemerintah dapat mengeluarkan paket stimulus fiskal yang mencakup insentif pajak, program pengurangan pajak, atau pengeluaran publik tambahan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Contoh

kebijakan fiskal di Indonesia ini misalnya penerapan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* dan keringanan pajak bagi investor asing.

4. Penghapusan Subsidi BBM

Untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, pemerintah dapat menghapus subsidi untuk bahan bakar fosil dan memperkenalkan insentif untuk energi terbarukan. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah kebijakan pemerintah yang beberapa kali memangkas subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor lainnya.

BAGIAN 9

KEBIJAKAN MONETER

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang mengatur pergerakan siklus keuangan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini berpengaruh pada variabel makroekonomi yang menciptakan ukuran keuangan yang dinamis, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter berfokus pada pengaturan peredaran uang atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah atau otoritas moneter melalui perubahan jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga untuk memengaruhi permintaan agregat serta mengendalikan ketidakstabilan dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga keberlanjutan perekonomian, sehingga dapat menjaga stabilitas harga.

Bank sentral merupakan lembaga yang independen dan memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan target inflasi dan suku bunga acuan. Inflasi di

Indonesia harus berada dalam rentang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Jika inflasi melebihi batas yang ditentukan, Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dikenal dengan kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, jika inflasi berada di bawah target, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan suku bunga acuan.

Berbagai definisi kebijakan moneter dari berbagai ahli diantaranya:

1. M. Natsir adalah Kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi perkembangan variabel-variabel moneter, seperti jumlah uang yang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, guna mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Perry Warjiyo adalah Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral terhadap agregat moneter, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, karakteristik ekonomi suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi mendasar lainnya.
3. Muana Nanga adalah Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk

memengaruhi tingkat permintaan agregat serta mengurangi ketidakstabilan ekonomi.

4. Mishkin Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter yaitu: uang beredar, suku bunga kredit dan nilai tukar, untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.
5. Sadono Sukirno adalah Kebijakan moneter merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mengawasi jenis-jenis pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dua makna terkait kebijakan moneter. Makna pertama merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas publik lainnya yang memengaruhi jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Sementara itu, makna kedua mengacu pada keputusan yang diambil oleh bank sentral mengenai penawaran uang, dengan tujuan agar perekonomian dapat tumbuh lebih cepat, salah satunya dengan memberikan lebih banyak kredit pada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka dan menurunkan persyaratan cadangan dari sistem perbankan.

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatur perekonomian negara secara keseluruhan guna mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik, dengan cara

mengontrol jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang sehat dapat dilihat dari stabilitas harga, yang tercermin dalam pengendalian inflasi. Secara umum, kebijakan moneter adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar di suatu negara agar mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan pekerjaan penuh, atau meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini dapat mencakup pengaturan tingkat suku bunga pinjaman, persyaratan margin, kapitalisasi bank, atau bertindak sebagai peminjam terakhir, bahkan melalui negosiasi dengan pemerintah negara lain. Secara khusus, Pasal (1) Ayat 10 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, mendefinisikan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan/atau suku bunga.

B. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA

Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan) serta keseimbangan eksternal (neraca pembayaran yang seimbang). Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan

ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui tingkat kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dengan cara merangsang kondisi ekonomi.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Stabilitas nilai rupiah dapat dipahami sebagai kestabilan terhadap harga barang dan jasa, yang tercermin dalam tingkat inflasi. Untuk mencapai hal ini, sejak 2005, Bank Indonesia telah memperkenalkan kebijakan moneter dengan menargetkan inflasi sebagai tujuan utama, melalui penerapan sistem nilai tukar mengambang. Stabilitas nilai tukar memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dan menjaga nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan moneter dengan menetapkan target moneter (seperti jumlah uang beredar dan suku bunga) demi mencapai tujuan utama, yaitu menjaga target inflasi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menerapkan pengendalian moneter sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Secara singkat, tujuan kebijakan moneter antara lain adalah: (Solihin, 2023)

1. **Stabilitas Ekonomi:** Stabilitas ekonomi merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan terkontrol dan berkelanjutan.
2. **Kesempatan Kerja:** Peningkatan kesempatan kerja terjadi seiring dengan peningkatan produksi. Biasanya, peningkatan produksi juga diikuti dengan perbaikan kondisi para pekerja, baik dalam hal upah maupun keselamatan kerja.
3. **Kestabilan Harga:** Kestabilan harga terlihat dari ketahanan harga barang seiring berjalannya waktu. Ketika harga stabil, masyarakat percaya bahwa harga barang saat ini akan tetap sama di masa depan, atau daya beli uang tidak berubah.
4. **Neraca Pembayaran Internasional:** Neraca pembayaran dianggap seimbang apabila nilai ekspor setara dengan nilai impor. Untuk mencapai keseimbangan dalam neraca pembayaran, pemerintah sering mengimplementasikan kebijakan moneter.
5. **Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menjaga kestabilan harga dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, terutama jika negara melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

C. JENIS – JENIS KEBIJAKAN MONETER

Pengendalian jumlah uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, kebijakan moneter pemerintah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*):

Merupakan kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan moneter ekspansif ini sering digunakan untuk merangsang atau mendukung pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan moneter longgar atau *Easy Money Policy*.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*):

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, atau tindakan moneter yang menjaga suku bunga jangka pendek tetap lebih tinggi dari biasanya, serta mengurangi atau bahkan memperlambat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan oleh otoritas moneter ketika ekonomi makro mengalami inflasi. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan moneter ketat atau *Tight Money Policy*.

D. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Instrumen kebijakan moneter adalah variabel yang dapat dikendalikan secara langsung oleh Bank Sentral atau paling tidak dapat diarahkan untuk mencapai target yang sangat mendekati sasaran yang ditetapkan (Parkin, 2018). Instrumen ini mencakup alat atau media yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur operasi moneter, yang bertujuan mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah.

Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar (JUB), yang dilaksanakan oleh bank sentral. Dalam upaya mengendalikan jumlah uang beredar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter yang umumnya digunakan, antara lain:

Tabel 9.1

Instrumen Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kualitatif

Instrumen Kuantitatif	Instrumen Kualitatif
a. Operasi pasar terbuka	a. Kredit selektif
b. Suku bunga diskonto	b. Bujukan moral
c. Tingkat cadangan wajib	

Operasi pasar terbuka (*open market operation*) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Keputusan untuk membeli atau menjual surat berharga tersebut ditentukan oleh bank sentral, disesuaikan dengan situasi perekonomian yang sedang terjadi.

Dalam situasi perekonomian yang lesu, bank sentral akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Pembelian surat berharga ini akan mengakibatkan bank sentral membayar sejumlah surat berharga yang dibeli, yang pada gilirannya akan menambah cadangan di bank-bank umum. Dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar, diharapkan aktivitas ekonomi dapat meningkat. Sebaliknya, dalam kondisi *overemployment*, bank sentral akan menjual surat berharga yang dimilikinya, yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar karena sejumlah uang akan masuk ke rekening bank sentral, sementara tabungan giral masyarakat dan cadangan bank umum akan berkurang. Ada dua syarat agar instrumen operasi pasar terbuka ini efektif dalam mengatasi masalah *overemployment* dan *underemployment*, yaitu:

1. Bank umum tidak memiliki cadangan berlebih. Cadangan berlebih yang dimiliki bank umum dapat digunakan untuk membeli surat berharga dari bank sentral.
2. Tersedia cukup banyak surat berharga yang dapat diperdagangkan. Dengan banyaknya surat berharga yang tersedia dan dimiliki oleh bank sentral, maka bank sentral memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga.

Suku bunga diskonto (*Discount Rate*) adalah tingkat bunga yang ditentukan oleh pemerintah untuk bank-bank umum yang meminjam dana dari bank sentral. Ketika bank-bank umum menghadapi situasi yang mengharuskan mereka meminjam dana, pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*) adalah persentase cadangan yang harus disimpan oleh bank. Jika persentase cadangan wajib ini dikurangi, maka bank akan memiliki lebih banyak dana yang bisa disalurkan ke masyarakat melalui pemberian pinjaman.

Bank komersial diwajibkan untuk memiliki cadangan minimum di bank sentral dan di brankas mereka. Hal ini penting sebagai perlindungan terhadap risiko. Dari total simpanan yang diterima, bank umum tidak menggunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman. Mereka menyisihkan sebagian tertentu dari deposito sebagai cadangan, sesuai dengan ketentuan dari bank sentral. Misalnya, jika bank sentral menetapkan rasio cadangan wajib sebesar 10%, maka bank komersial harus menyimpan \$10 dari setiap.

Imbauan moral (*Moral Persuasion*) merupakan instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara

memberikan imbauan kepada bank-bank umum, seperti untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjaman.

E. MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, yang pada akhirnya bertujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Taylor (1995) dalam Warjiyo (2004) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah "*The process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation*".

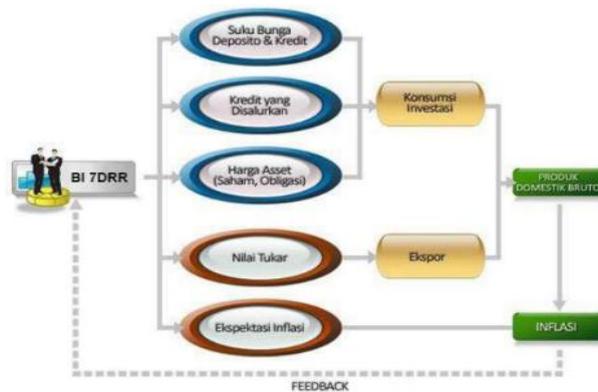
Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan melalui beberapa saluran, seperti suku bunga, kredit, nilai tukar, dan harga aset (Miskin, 2019). Dalam sektor keuangan, transmisi ini mempengaruhi perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan kredit, sedangkan dalam sektor riil, dampaknya terlihat pada perilaku konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor dan impor.

Sistem keuangan menjadi dua komponen utama: pasar keuangan dan lembaga intermediasi keuangan. Pasar keuangan memungkinkan penyaluran dana langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman, sedangkan lembaga intermediasi keuangan

berperan sebagai perantara yang mengumpulkan dana dari tabungan dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

Bank Indonesia memperkuat kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan baru, yaitu BI 7-Day Repo Rate, yang mulai berlaku efektif pada 19 Agustus 2016. Meski BI Rate yang ada saat ini masih digunakan, pengenalan suku bunga kebijakan baru ini tidak mengubah arah kebijakan moneter yang tengah diterapkan.

Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan BI 7DRR sebagai instrumen utama kebijakan untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mengendalikan inflasi. Namun, proses transmisi dari keputusan BI 7DRR hingga tercapainya sasaran inflasi sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*).



Gambar 9.1

Transmisi Kebijakan Moneter Sumber: www.bi.go.id

F. KEBIJAKAN MONETER DAN MAKRO EKONOMI

Keterkaitan Kebijakan moneter dengan makro ekonomi dapat dijelaskan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya

dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan. Perdebatan antara pendekatan klasik dan Keynesian dalam kebijakan moneter telah menjadi inti dari studi ekonomi makro selama beberapa dekade terakhir. Pendekatan klasik, yang didorong oleh pandangan ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, menegaskan bahwa pasar bebas memiliki kemampuan alami untuk mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme harga dan persaingan. Mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter dapat menyebabkan distorsi pasar dan menghambat proses penyesuaian harga dan kuantitas.

Di sisi lain, pendekatan Keynesian, yang dipelopori oleh pemikiran ekonomi John Maynard Keynes, menyoroti peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam mengatasi resesi atau depresi. Keynesianisme menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam meningkatkan pengeluaran agregat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Mereka percaya bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan menstabilkan perekonomian.

Dalam konteks kebijakan moneter, perdebatan antara pendekatan klasik dan Keynesian terutama berkisar pada efektivitas instrumen kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga atau jumlah uang beredar dalam memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pendukung pendekatan klasik cenderung mengutamakan kebijakan moneter yang pasif dan menekankan pentingnya pasar bebas dalam menentukan tingkat suku bunga dan alokasi sumber daya. Di sisi lain, pendukung pendekatan Keynesian menganjurkan kebijakan moneter yang aktif, dengan intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran dan stagnasi.

Kritik terhadap pendekatan klasik mencakup ketidakmampuannya untuk mengatasi krisis ekonomi secara cepat dan efektif, terutama dalam menghadapi resesi yang dalam atau depresi. Mereka juga dikritik karena sering mengabaikan ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian. Namun, pendukung pendekatan klasik menekankan bahwa pasar bebas dapat menyediakan solusi jangka panjang yang lebih efisien daripada intervensi pemerintah yang berlebihan.

Dalam praktiknya, banyak negara menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan dalam merumuskan kebijakan moneter mereka, mengakui bahwa tidak ada pendekatan yang sempurna dan bahwa konteks ekonomi yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula. Terlepas dari perbedaan pendapat, perdebatan antara pendekatan klasik dan Keynesian terus memainkan peran

penting dalam pengembangan teori ekonomi dan pembuatan kebijakan.

Kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi inflasi adalah pengendalian jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan mengatur laju pertumbuhan uang, misalnya melalui operasi pasar terbuka atau kebijakan cadangan minimum. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar, bank sentral dapat mengontrol tingkat inflasi, karena peningkatan jumlah uang yang beredar cenderung meningkatkan permintaan agregat, mendorong kenaikan harga. Selain itu, tingkat suku bunga juga merupakan alat penting dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mendorong tabungan daripada pengeluaran konsumen dan investasi. Dengan mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, inflasi dapat ditekan karena permintaan *agregat* menurun. Namun, strategi ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi belanja konsumen dan investasi perusahaan.

Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mempengaruhi investasi, konsumsi, dan produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang melalui kebijakan moneter yang mendukung penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong investasi perusahaan, karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga

meningkatkan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, konsumen juga cenderung meningkatkan pengeluaran mereka karena kredit menjadi lebih murah, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan konsumen.

Kebijakan moneter juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika suku bunga dinaikkan secara drastis untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi pengeluaran investasi dan konsumsi, yang kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ini dapat terjadi karena biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, menyebabkan perusahaan dan konsumen lebih berhati-hati dalam menghabiskan uang mereka.

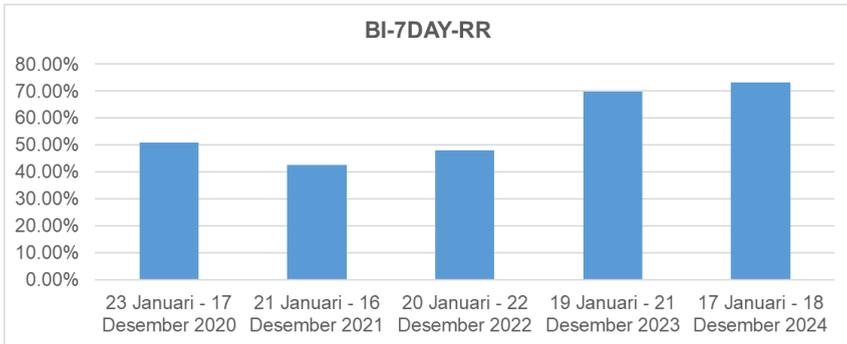
Selain itu, kebijakan moneter juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan akses terhadap kredit. Misalnya, bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi likuiditas di pasar keuangan dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau memperketat atau melonggarkan persyaratan kredit. Langkah-langkah ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan untuk investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tindakan kebijakan moneter yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa memicu inflasi yang merugikan.

Oleh karena itu, bank sentral perlu memperhitungkan berbagai faktor ekonomi dan mengambil tindakan yang seimbang untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

G. IMPLIKASI KEBIJAKAN MONETER

Salah satu alat kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah kebijakan BI *Rate*. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi dan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jika harga-harga barang dan jasa mengalami lonjakan, BI akan memperketat peredaran uang, karena banyaknya uang yang beredar dapat memicu inflasi. Lembaga perbankan cenderung memilih menyimpan uangnya di BI daripada meminjamkannya kepada nasabah. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, diharapkan inflasi dapat turun secara bertahap. Ketika inflasi terkendali, stabilitas finansial akan tercapai, dan BI dapat menurunkan BI *Rate*, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kebijakan moneter ini, melalui saluran transmisi moneter, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama menurunkan dan menstabilkan inflasi. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, tingkat inflasi mengalami kenaikan sekitar 73,25 persen.



Gambar 9.2

Tingkat Inflasi Sepanjang Tahun 2020 - 2024 Sumber: bi.go.id

BAGIAN IO

SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN

A. SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem keuangan yang kuat akan mampu menopang pilar-pilar ekonomi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

UU Nomor 4 tahun 2023, Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Sistem keuangan yang stabil akan mampu menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti guncangan resesi ataupun krisis. Hal ini akan membuat publik percaya terhadap lembaga keuangan sehingga aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Dengan didukung oleh regulasi yang kuat dan transparan, maka akan terhindar dari praktik-praktik keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan dilakukan oleh berbagai otoritas yaitu: Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Oleh karena itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang bank setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 4 tahun 2023, yang berperan aktif dalam sistem keuangan terdiri dari: Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Jasa Keuangan, Bank, Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, Perusahaan Asuransi dan lain-lain.

B. PERBANKAN DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank adalah lembaga yang menjembatani antara pihak pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak pihak yang membutuhkan dana.

Keberadaan bank memberikan manfaat kepada banyak pihak. Sebagai penyimpan, pemilik dana akan mendapat manfaat berupa pendapatan suku bunga. Bagi pihak yang membutuhkan dana kehadiran bank membantu menyediakan modal yang dapat

digunakan sebagai modal kerja dan untuk mengembangkan usahanya. Secara makro negara juga akan mendapatkan manfaat berupa penerimaan pajak, serta meningkatnya pendapatan nasional karena produksi meningkat. Sebagai dampak positif meningkatnya kegiatan produksi, maka ada penyerapan tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran.

Bank memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian yakni sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

1. *Agent of trust*.

Yang menjadi dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Aktivitas perbankan terkait dengan debit dan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa latin yakni *credere* yang artinya adalah percaya . Dengan demikian bank adalah lembaga yang dipercaya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Mengapa bank hingga saat ini terus beroperasi? Karena masyarakat percaya pada saat menitipkan dananya di Bank, tidak akan disalah gunakan. Masyarakat yakin bahwa dana yang dititipkan akan dikelola dengan baik dan bila sewaktu waktu membutuhkan, maka dana yang dimiliki akan dengan mudah untuk dicairkan.

Bank memastikan keamanan dana yang disimpan oleh nasabah melalui pengelolaan yang transparan dan sistem yang andal karena Bank beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu Bank memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah mengenai produk, layanan, dan risiko yang terkait. Bank memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi dan transaksi nasabah dari akses yang tidak sah. Dan yang terpenting Bank memastikan layanan yang diberikan kepada nasabah mencerminkan profesionalisme dan rasa tanggung jawab. Terjadinya *Rush* pada saat krisis moneter tahun 1998 merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank. *Rush* mengacu pada situasi di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana mereka dari bank dalam waktu yang singkat. Fenomena ini biasanya terjadi karena adanya kekhawatiran atau ketidakpercayaan nasabah terhadap kondisi keuangan bank, yang dapat dipicu oleh rumor, berita negatif, atau ketidakstabilan ekonomi.

2. *Agent of Development*

Dalam fungsi produksi salah satu faktor penting yang harus dimiliki perusahaan selain tenaga kerja adalah modal. Kegiatan bank dalam menyalurkan dana, memberikan pinjaman kepada para pengusaha, UMKM akan memperlancar perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

Sebagai *agent of development* Bank menyediakan kredit atau pembiayaan untuk proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan,

bandara, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank juga memberikan akses pembiayaan kepada UKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi, untuk membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Bank juga mempromosikan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan.

Untuk kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti di daerah terpencil, Bank memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (inklusi keuangan).

3. *Agent of service*

Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan hadirnya perbankan, karena Bank menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman dalam bentuk rekening tabungan, giro, atau deposito. Bank mendukung berbagai transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian secara digital atau fisik, menawarkan fasilitas kredit, baik untuk konsumsi, usaha, maupun investasi, guna mendukung kebutuhan nasabah.

Di era digital yang terus berkembang, Bank menyediakan layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan dompet digital, sehingga memudahkan akses ke layanan keuangan kapan saja.

Bank memberikan informasi, konsultasi, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan finansial nasabah.

Pada tahun 2011 ditetapkan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan Mengawasi Lembaga Keuangan: Bank maupun Non Bank atau Industri Keuangan Non Bank yang ditetapkan dimulai tahun 2013. Lembaga-lembaga yang masuk dalam kelompok industri keuangan non bank terdiri dari Perusahaan: Leasing, Asuransi, Modal ventura, Anjak Piutang, Pegadaian, Dana pensiun, Kartu kredit, Pasar modal.

1. Leasing adalah bentuk pembiayaan di mana pihak penyewa (lessee) menggunakan barang milik pihak yang menyewakan (lessor) dengan pembayaran dalam bentuk sewa selama periode tertentu. Secara sederhana, leasing merupakan bentuk sewa guna usaha. Jenis barang yang biasanya dibiayai melalui leasing adalah barang-barang dengan nilai tinggi, seperti kendaraan, mesin, atau peralatan berat.
2. Asuransi adalah perjanjian antara penyedia layanan asuransi (perusahaan asuransi) dan individu atau pihak yang diasuransikan (tertanggung), di mana tertanggung membayar premi sebagai imbalan perlindungan terhadap risiko tertentu. Ketika risiko atau kerugian yang dijamin terjadi, perusahaan asuransi memberikan kompensasi atau penggantian sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi.

3. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan barang bergerak dari nasabah. Dalam sistem pegadaian, nasabah dapat menggadaikan barang bernilai sebagai agunan, seperti perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik, untuk mendapatkan pinjaman tunai. Pegadaian berperan penting dalam memberikan solusi keuangan jangka pendek, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat.
4. Dana Pensiun adalah program yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial kepada seseorang setelah mereka pensiun dari pekerjaannya. Dana ini biasanya dikumpulkan selama masa kerja seseorang, melalui kontribusi yang dilakukan oleh individu itu sendiri, pemberi kerja, atau keduanya. Tujuan utama dana pensiun adalah memberikan keamanan finansial di usia tua, ketika seseorang tidak lagi memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya.
5. Pasar Modal adalah mekanisme atau tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor), yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan tertentu. Pasar modal memainkan peran penting dalam sistem keuangan karena menjadi sarana untuk memperoleh modal bagi perusahaan sekaligus tempat investasi bagi individu atau institusi.

C. JENIS JENIS BANK

Jenis bank cukup banyak yakni Bank Sentral , Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat , Bank Syariah, Bank Asing, Bank Daerah dan Bank Internasional

1. Bank Sentral

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 1968, Bank Indonesia adalah Bank Sentral milik Negara dan merupakan badan hukum, yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor Pusat di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank Indonesia dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan koresponden-koresponden di luar-negeri.

Bank Indonesia memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Bank Umum

Bank yang melayani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat, seperti simpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan. Contohnya adalah BRI, BNI, BTN, MANDIRI, BCA, PANIN

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR):

Bank yang memberikan layanan kredit dan tabungan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. BPR biasanya tidak

menyediakan layanan pembayaran seperti transfer antarbank dan jual beli valuta asing.

4. Bank Syariah:

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti bebas riba dan berfokus pada akad atau kontrak yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Bank Asing

Bank yang berasal dari luar negeri tetapi beroperasi di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC.

6. Bank Daerah

Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertujuan mendukung pembangunan daerah, seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jateng dan Bank Jabar.

7. Bank Internasional

Bank yang beroperasi di banyak negara dan memberikan layanan lintas negara, seperti JPMorgan Chase atau Standard Chartered.

BAGIAN 11

PERTUMBUHAN EKONOMI

A. ARTI DAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama ekonomi makro, dan merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi hal yang perlu diperhatikan adalah faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan teori teori yang menerangkan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Secara umum bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang, hal itu dilihat dari kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto(PNB) riil.

B. TEORI PERTUMBUHAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari bidang ekonomi makro yang sudah lama dibahas oleh para ahli ekonomi, pada abad 16 sampai akhir abad 17 yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Solow, Harrod Domar, Paul Romer dan lain sebagainya. Pendapat para ahli dikelompokkan menjadi :

1. Teori Klasik

a. Adam Smith (1776)

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena melalui mekanisme pasar bebas yang mendorong spesialisasi tenaga kerja, akumulasi modal dan ekspansi pasar.

- a. Spesialisasi dan Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja hal ini disebabkan dengan adanya spesialisasi tenaga kerja akan lebih fokus dan terampil dalam menghasilkan output contohnya dalam kelompok penghasil baju, jika dikerjakan oleh 1 orang hasilnya lebih sedikit ketika pekerjaan itu dibagi dalam tugas yang spesifik
- b. Akumulasi modal, setiap penambahan investasi untuk membeli mesin dan peralatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Ekspansi Pasar, semakin luas dan besar pasar akan semakin besar distribusi barang dan jasa , sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Peran Pemerintah yang terbatas, Smith sangat percaya “invisible Hand” karena pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah yang berlebihan.

b. David Ricardo

Menurut Ricardo, suatu negara akan cepat pertumbuhan ekonominya kalau negara tersebut melakukan perdagangan Internasional dengan spesialisasi pada perdagangan yang memiliki keunggulan komparatif, negara harus fokus pada barang barang yang memiliki keunggulan relatif dibandingkan negara lain karena perdagangan Internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal dan Investasi dalam bentuk tanah dan mesin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika Faktor produksi seperti tanah tetap, tenaga kerja dan modal bertambah, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat, ini yang disebut dengan hukum hasil yang semakin berkurang (The Law of Diminishing Returns).

2. Teori Neoklasik

a. Solow-Swan Model (1956)

Menurut pendapat Solow bahwa pertumbuhan ekonomi menitik beratkan pada peran modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi dan pertumbuhan itu bersifat konvergen, bahwa negara miskin dapat menjadi negara kaya ketika negara tersebut fokus terhadap perkembangan investasi dan teknologi. Perkembangan teknologi merupakan faktor eksternal yang mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Horrord Domar Model (1946)

Ahli ekonomi ini berpendapat bahwa pentingnya tingkat tabungan yang tinggi mencapai investasi yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tabungan yang tidak seimbang dengan investasi, kondisi perekonomian bisa mengalami inflasi atau deflasi.

c. Teori Endogen (Paul Romer dan Robert Lucas)

Faktor utama terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah inovasi, teknologi dan sumberdaya manusia. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan dan riset sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

C. INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (biasanya menghitung nilai akhir atau nilai tambah dari suatu tahapan produksi sehingga tidak terjadi penghitungan ganda dalam menghitung pendapatan nasional). Periode penghitungan pendapatan ini biasanya dihitung dalam 1 tahun atau perkuartal.

Penghitungan PDB ada 2 jenisnya, yaitu penghitungan PDB berdasarkan harga pasar saat ini tanpa disesuaikan dengan inflasi biasanya dikenal dengan istilah PDB Nominal, PDB riil

dihitung berdasarkan harga konstan dan telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. PDB riil lebih akurat dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi karena faktor atau pengaruh inflasi dihilangkan. PDB itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghitung PDB ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi yaitu dengan menghitung nilai tambah bruto dari semua sektor, pendekatan kedua adalah Pendekatan Pengeluaran, yaitu menjumlahkan Total Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan hasil akhir dari pengurang Eksport Import.

2. Produk Nasional Bruto (PNB)

PNB dapat dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi, secara defenisi PNB itu adalah total dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik yang berdomisili di dalam dan luar negri.

Perbedaan antara PDB dan PNB terletak pada perbedaan pendekatan, PDB hanya menghitung total produksi dan jasa di dalam suatu wilayah sedangkan PNB penghitungan total produksi barang dan jasa oleh warga negara yang di produksi baik di dalam maupun luar negri.

3. Pendapatan Perkapita

Merupakan pendapatan rata rata yang diterima setiap individu dalam suatu negara, Secara teori income perkapita adalah

Pendapatan Nasional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Contohnya, jika PDB Indonesia 2000 Triliun dan jumlah penduduknya 270 juta jiwa, maka income perkapita Indonesia adalah $270T / 270 \text{ juta penduduk} = \text{Rp } 74.000.000$ pertahun. Jika pendapatan perkapita meningkat, berarti standart hidup masyarakat lebih membaik, negara maju income perkapitanya lebih tinggi dari negara sedang berkembang.

4. Tingkat Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang modal, infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang. Pembelian barang modal bisa untuk pembelian mesin, gedung dan lain sebagainya.

Untuk investasi biasanya digunakan 2 pendekatan seperti Gross Fixed Capital Formation (GFCF) dan Foreign Direct Investment merupakan ukuran investasi asing yang langsung ke dalam negeri. Investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

5. Tingkat Konsumsi

Secara teori konsumsi itu merupakan pengeluaran rumah tangga untuk pembelian barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga biasanya menyumbang 50-70% dari PDB di banyak negara. Jika konsumsi meningkat maka secara langsung akan

terjadi peningkatan produksi barang dan jasa yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

6. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol akan mempercepat pengangkutan atau mobilitas barang dari tempat produksi ke pasar, begitu juga dengan subsidi pemerintah dan belanja pendidikan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang

7. Neraca Perdagangan

Secara umum arti dari neraca perdagangan adalah selisih dari ekspor dan import suatu negara. Dikatakan surplus perdagangan ketika nilai ekspor lebih besar dari import. Surplus perdagangan ini akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Defisit perdagangan jika nilai import lebih besar dari ekspor hal ini disebabkan oleh karena nilai produksi dalam negeri kecil atau ketergantungan ke pada barang import tinggi, hal ini memperlemah pertumbuhan ekonomi.

8. Tingkat Pengangguran

Secara teori tingkat pengangguran merupakan persentase jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja dibagi total angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa

investasi berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan menurun hal ini menyebabkan permasalahan dalam makro ekonomi.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan tidak hanya di ukur dengan kesejahteraan saja, tapi perlu mengukur dengan kualitas hidup manusia yang diukur melalui 3 indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita. Negara yang memiliki IPM yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil

D. KEBIJAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BERBAGAI NEGARA

Setiap negara memiliki struktur , kebijakan pemerintah, faktor produksi , inovasi, teknologi yang berbeda beda. Pembahasan pertumbuhan ekonomi pada bab ini membahas negara maju seperti Amerika, sebagai negara Industri dengan pertumbuhana ekonomi pesat adalah China sebagai negara komunis yang membuka diri dan Indonesia.

1. Konsep Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.

Amerika serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia, hal ini disebabkan karena Amerika mendorong Inovasi Teknologi, dengan menggelontorkan dana besar besaran terhadap Inovasi dan Teknologi. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi AS didominasi oleh inovasi dan kewirausahaan sedangkan manusia dan teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan

ekonomi AS Pemerintah mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Begitu juga dengan Pasar keuangan, pemerintah AS mendorong sistem keuangan yang efisien dan kuat seperti Wall street sehingga AS menjadi negara Kapitalis

2. Konsep Pertumbuhan China

Pertumbuhan ekonomi China **berbasis Industrialisasi**, China tumbuh cepat sejak reformasi ekonomi tahun 1978, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a. China menerapkan model *State Capitalism*, yaitu menerapkan kombinasi kapitalisme tapi di kontrol oleh negara.
- b. Untuk pertumbuhan Industri kebijakan pemerintah China fokus pada industri manufaktur dan orientasi ekspor dan China terkenal dengan praktik dumpingnya,
- c. Investasi Infrastruktur besar besaran, saat ini Negara China banyak membangun jalan di atas laut, kereta cepat, kota pintar dan robot
- d. Presiden China Den Xiaoping membuka Investasi Asing sebelumnya China adalah negara komunis yang menutup diri dari negara luar.

E. KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis Sumber daya Alam dan Konsumsi. Saat ini Batu Bara, gas Alam, Emas dan berbagai mineral lainnya dijadikan basis ekonomi Indonesia. 60% PDB berasal dari konsumsi masyarakat,

Kendala dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah korupsi dan ketimpangan pendapatan .Beberapa dekade ini Indonesia mengalami bonus demografi, ketika pendidikan dan produktivitas tenaga kerja tidak tercipta ini merupakan masalah besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan Konsep Pertumbuhan AS, China dan Indonesia seperti tabel dibawah ini :

Negara	Model Dominan	Faktor Utama	Tantangan
AS	Romer	Inovasi, Teknologi	Ketimpangan Ekonomi
China	Harrord Domar	Investasi, Manufaktur	Utang Tinggi
Indonesia	Horrord Domar	SDA, Konsumsi	Ketergantungan Komoditas

F. TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN M

Setiap negara memiliki permasalahan pembangunan yang berbeda-beda unik. Kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif akan mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam bab ini kita akan bahas 3 Negara yaitu Amerika Serikat, China dan Indonesia.

1. Amerika Serikat ,

Permasalahan

- a. Proteksionisme dan Perang dagang, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menerapkan proteksionisme dengan memberlakukan tarif import tinggi kepada negara China. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi produsen dalam negeri tapi yang terjadi justru meningkatnya inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi
- b. Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri, As menghadapi defisit anggaran yang signifikan, dengan utang Nasional mencapai \$30 Triliun lebih pada tahun 2024. Hutang yang tinggi ini mengakibatkan kemampuan pemerintah untuk investasi publik mengalami kendala untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
- c. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi terjadi, ketimpangan pendapatan tetap tinggi. Tahun 2023 10\$ penduduk terkaya menguasai lebih kurang

70% kekayaan nasional, hal ini menyebabkan disparitas pendapatan yang tinggi

Solusi

- a. Kebijakan Fiskal yang berkelanjutan, pemerintah akan melakukan peningkatan pendapatan pajak dan pengendalian pengeluaran pemerintah untuk mengurangi hutang nasional
- b. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan
Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan pendapatan.
- c. Kerja sama Internasional, meningkatkan negosiasi dan perjanjian Internasional untuk menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan harus mengurangi ketegangan antar negara.

2. China

Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh negara China saat ini adalah :

- a. Perang dagang dengan AS sejak tahun 2018, yang mengakibatkan penurunan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Transformasi ekonomi, saat ini China menghadapi tantangan karena peralihan dari ekonomi berbasis manufaktur berbiaya rendah ke ekonomi berbasis inovasi dan teknologi tinggi

- c. Masalah lingkungan, dengan pertumbuhan industri yang pesat di berbagai bidang menyebabkan polusi udara dan air . Hal ini mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan

Solusi

- a. Diversifikasi Ekonomi, mengembangkan sektor jasa dan teknologi tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur tradisional
- b. Investasi dalam Energi terbarukan, meningkatkan investasi untuk energi terbarukan dan mengharuskan penduduk untuk menggunakan kendaraan roda dua listrik, hal ini akan mengurangi polusi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
- c. Reformasi kebijakan Perdagangan, meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara ketiga untuk mengurangi dampak negatif dari perang dagang dengan AS.

3. Indonesia

Permasalahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Ketergantungan pada komoditas ekspor, saat ini ekonomi Indonesia sangat tergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit dan batu bara, membuatnya rentan terhadap fluktasi harga global.

- b. Infrastruktur yang kurang memadai, infrastuktur yang kurang memadai menghambat konektivitas dan efesiensi ekonomi terutama di luar pulau Jawa
- c. Tantangan Pendidikan dan Keterampilan, kualitas pendidikan dan ketempilan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri modern.

Dari berbagai permasalahan tersebut, langkah yang bisa di ambil oleh pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor jasa seperti Pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas.
- b. Melanjutkan proyek Infrastruktur besar untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk efesiensi.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, dan pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri

BAGIAN 12

NERACA PEMBAYARAN

A. NERACA PEMBAYARAN

Pengertian Neraca Pembayaran adalah ringkasan catatan yang sistimatis mengenai seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu, yang mencakup perdagangan barang dan jasa, arus modal, dan transfer sepihak.

Tujuan penyusunan Neraca Pembayaran antara lain adalah untuk:

1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik.
2. Mengetahui aliran sumber daya antarnegara. Dari Neraca Pembayaran ini dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal.

3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara Dengan mengamati perkembangan Neraca Pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain.
4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Dari catatan transaksi modal dan keuangan di Neraca Pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain.
5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit Neraca Pembayaran. Apabila terjadi surplus Neraca Pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit Neraca Pembayaran.
6. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa (*foreign exchange budget*) Dengan memperhatikan surplus atau defisit Neraca Pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan.
7. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional (*national account*) Statistik Neraca Pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan

nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam Neraca Pembayaran.

B. STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN

Dilihat dari strukturnya, Neraca Pembayaran dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan debit. Sisi kredit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dan sisi debit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain. Struktur Neraca Pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Transaksi Berjalan (*Current Account*)

- a. Perdagangan barang (*trade*)
 - Ekspor (*exports*)
 - Impor (*imports*)
- b. Jasa-jasa (*services*)
- c. Penghasilan (*income*)
- d. Transfer (*transfers*)

2. Transaksi Modal Dan Keuangan (*Capital And Financial Account*)

- a. Transaksi modal (*capital account*)
- b. Transaksi keuangan di luar cadangan devisa (*financial account*)
 - Penanaman modal langsung (*foreign direct investment*)
 - Investasi surat berharga (*portfolio investment*)
 - Investasi lainnya

3. Perubahan cadangan devisa (*Changes in Reserves*)

4. Selisih Perhitungan (*Errors And Omissions*)

Konsep keseimbangan Neraca Pembayaran bukan dilihat dari sisi neraca itu sendiri melainkan dilihat dari komponen tertentu yang ada dalam neraca pembayaran sehingga akan terlihat apakah Neraca Pembayaran mengalami surplus atau defisit.

Komponen yang menimbulkan terjadinya surplus atau defisit meliputi transaksi yang termasuk dalam transaksi berjalan (*current account*) dan transaksi yang termasuk dalam transaksi modal dan keuangan (*capital and financial account*) di luar cadangan devisa (*reserves assets*), dan disebut dengan “*autonomous transaction*”. Sementara itu, komponen yang menampung surplus atau membiayai defisit meliputi transaksi yang mengakibatkan perubahan cadangan devisa dan disebut “*accommodating transaction*”. Surplus pada *autonomous transaction* terjadi apabila sisi kredit dari transaksi-transaksi yang dicatat lebih besar daripada

sisi debetnya, demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit. Dalam literatur ekonomi dan keuangan internasional, *autonomous transaction* digolongkan dalam transaksi-transaksi yang disebut transaksi-transaksi “*above the line*” (di atas garis pemisah), sedangkan *accommodating transaction* merupakan transaksi-transaksi “*below the line*” (di bawah garis pemisah).

Secara umum, dikenal empat konsep keseimbangan Neraca Pembayaran, yaitu:

1. Konsep Keseimbangan Perdagangan (*Trade Balance*) Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam *autonomous transaction* atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang sehingga keseimbangan NP diukur dari besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Apabila ekspor lebih besar daripada impor maka NP negara bersangkutan mengalami surplus; demikian pula sebaliknya.
2. Konsep Keseimbangan Transaksi Berjalan (*Current Account Balance*) Untuk menentukan surplus atas defisit pada *autonomous transaction* selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan (*income*) dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer lebih besar daripada impor barang, jasa, penghasilan, dan transfer; demikian pula sebaliknya.

3. Konsep *Basic Balance*. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam *autonomous transaction* selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang.
4. Konsep *Overall Balance* Yang termasuk *autonomous transaction* dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Pada Tabel 11.1 Terlihat ringkasan rincian dari Neraca Pembayaran Indonesia dalam Juta USD dari tahun 2021, 2022, 2023*, dan 2024 (Triwulan III**). Data I. Total Transaksi Berjalan pada tahun 2021 tercatat 3,511 Juta USD (Surplus), naik cukup besar di tahun 2022 menjadi 13,215 Juta USD (Surplus), dan turun banyak di tahun 2023* menjadi -2,146 Juta USD (Defisit), dan berlanjut Defisit pada Triwulan III* yaitu sebesar -2,150 Juta USD.

Surplusnya Transaksi Berjalan pada tahun 2021, disebabkan besarnya Neraca Barang (43,806 Juta USD), tetapi Neraca Jasa Defisit (-14,599 Juta USD), dan Defisit Pendapatan Primer (-31,961 Juta USD).

Pada tahun 2022, Neraca Transaksi Berjalan Surplus sebesar 13,215 Juta USD, dengan Neraca Barang Surplus sebesar 62,672 Juta USD, tetapi Neraca Jasa Defisit (-19,957 Juta USD), dan Defisit Pendapatan Primer (-35,303 Juta USD).

Neraca Transaksi Berjalan untuk tahun 2023*, mengalami Defisit (-2,146 Juta USD), walau Neraca Barangnya Surplus sebesar 46,269, tetapi total Defisit Neraca Jasa (-17,783 Juta USD) dan Defisit Neraca Pendapatan Primer (-35,998 Juta USD) lebih besar dari Neraca Barang. Ini disebabkan oleh terjadinya perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, serta permintaan domestik yang kuat.

Neraca Transaksi Berjalan pada Triwulan III 2024** mencatat Defisit

(-2,150 Juta USD), dibandingkan dengan data Triwulan II 2024** (-3,246 Juta USD), dan data Triwulan I 2024** (-2,481 Juta USD).

Transaksi modal dan finansial tahun 2023 mencatat perbaikan signifikan dengan membukukan Surplus, ini ditopang oleh Surplus investasi langsung dan investasi potofolio di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Neraca Keseluruhan (*overall balance*), adalah total dari Neraca Transaksi Berjalan, Neraca Transaksi Modal, Neraca Transaksi Finansial, dan Selisih Perhitungan Bersih yang tercatat di semua tahun ini Surplus. Neraca Keseluruhan di Tahun 2021 (13,461 Juta USD), di Tahun 2022 (3,999 Juta USD), Tahun 2023 (6,301 Juta USD), dan tahun 2024 Triwulan III (5,867 Juta USD). Dimana Cadangan Devisa dan yang terkait itu bernilai sebanyak negatif dari nilai Neraca

Keseluruhan, yang juga dapat dinilai Neraca Pembayaran Keseluruhan itu adalah Surplus.

TABEL 1
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
RINGKASAN
(Juta USD)

Nov 2024

ITEMS	2021						2022						2023*						2024*					
	Total		Tw.I		Tw.III		Tw.IV		Total		Tw.I		Tw.III		Tw.IV		Total		Tw.I		Tw.III		Tw.IV	
	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W
I. Transaksi Berjalan	3.511	724	4.283	4.709	3.499	13.215	2.815	-8.513	-1.156	-1.293	-1.146	-2.481	-3.348	-3.150										
A. Barang	43.806	11.301	16.797	17.823	16.961	62.672	14.755	9.968	10.156	11.300	46.269	9.289	10.034	9.289										
- Ekspor	232.835	66.770	75.174	77.836	72.759	292.538	66.817	61.552	63.400	65.851	257.681	61.698	62.055	67.158										
- Impor	-189.029	-55.468	-58.377	-60.213	-55.808	-229.866	-52.062	-51.584	-53.304	-54.481	-211.411	-52.409	-52.021	-57.868										
1. Barang Dagangan Umum	44.330	11.516	17.258	18.679	17.543	64.995	15.091	10.452	10.578	11.776	47.897	9.574	10.588	10.588										
- Ekspor, iib	231.316	66.468	74.918	77.591	72.534	291.511	66.630	61.344	63.210	65.648	256.832	61.493	61.779	66.887										
- Impor, iib	-186.477	-54.952	-57.661	-58.911	-54.962	-226.515	-51.539	-50.892	-52.832	-53.872	-208.336	-51.916	-51	-56.927										
a. Nonlogas	57.804	17.210	24.444	25.160	22.969	89.773	19.004	15.153	15.963	17.694	67.814	15.086	15.203	14.760										
- Ekspor, iib	218.116	62.655	70.067	73.196	68.554	274.471	62.967	57.692	59.528	61.945	241.902	58.011	57.895	63.243										
- Impor, iib	-160.311	-45.445	-45.623	-48.035	-45.566	-184.699	-43.953	-42.500	-43.565	-44.519	-174.179	-42.925	-42.654	-48.484										
b. Migas	-12.965	-6.694	-7.187	-6.481	-6.415	-24.777	-3.913	-4.701	-3.585	-5.919	-19.917	-5.512	-6.617	-4.439										
- Ekspor, iib	13.201	3.813	4.851	4.395	3.960	17.039	3.673	3.682	3.682	3.802	14.840	3.481	3.922	3.644										
- Impor, iib	-26.166	-9.507	-12.038	-10.676	-9.396	-41.817	-7.586	-3.883	-9.067	-9.721	-34.757	-8.993	-8.539	-9.083										
2. Barang Lainnya	-1.033	-214	-461	-1.056	-992	-2.323	-336	-484	-422	-386	-1.627	-266	-662	-1.031										
- Ekspor, iib	1.519	352	255	245	225	1.028	187	208	250	203	849	236	276	270										
- Impor, iib	-2.552	-516	-716	-1.301	-817	-3.351	-523	-692	-672	-689	-2.476	-491	-628	-1.301										
B. Jasa - Jasa	-14.599	-4.335	-4.972	-5.260	-5.391	-19.957	-4.481	-4.687	-3.895	-4.919	-17.783	-1.148	-5.112	-4.152										
- Ekspor	13.951	3.974	5.521	6.608	7.105	23.208	7.488	8.044	9.345	8.728	33.606	6.892	9.005	10.884										
- Impor	-28.550	-8.308	-10.493	-11.868	-12.496	-43.165	-11.970	-12.631	-13.240	-13.548	-51.388	-12.840	-14.177	-15.036										
C. Pendapatan Primer	-31.961	-7.734	-9.004	-9.931	-8.634	-35.303	-9.905	-9.321	-8.669	-9.103	-35.998	-8.944	-9.636	-8.864										
- Penemuan	6.739	1.543	2.012	1.993	1.982	7.530	1.792	1.995	1.991	2.127	7.865	2.301	2.255	2.540										
- Pembayaran	-38.699	-9.277	-11.016	-10.924	-11.616	-42.833	-10.697	-11.316	-10.619	-11.230	-43.863	-11.246	-11.892	-11.404										
D. Pendapatan Sekunder	6.264	1.492	1.461	1.277	1.573	5.803	1.447	1.427	1.252	1.239	5.366	1.322	1.468	1.577										
- Penemuan	10.804	3.313	3.458	3.438	3.729	13.938	3.644	3.823	3.801	3.968	15.255	3.969	4.238	4.286										
- Pembayaran	-4.540	-1.821	-1.997	-2.161	-2.156	-8.135	-2.197	-2.396	-2.548	-2.749	-9.890	-2.647	-2.771	-2.709										
II. Transaksi Modal	80	7	14	26	429	476	2	10	20	19	50	2	4	10										
- Penemuan	80	7	14	26	429	476	2	10	20	19	50	2	4	10										
- Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
III. Transaksi Finansial	12.492	-2.020	-1.706	-5.608	177	-9.157	-1.180	-0.072	498	15.610	9.510	2.073	2.989	6.571										
- Aset	-13.715	-7.933	-5.785	-9.805	-2.906	-26.229	-4.822	-5.334	-4.469	-3.940	-19.081	-8.201	-6.324	-11.151										
- Kewajiban	26.207	5.913	4.079	3.998	3.083	17.073	9.102	7.62	3.851	14.856	28.571	7.128	6.283	17.722										
1. Investasi Langsung	17.286	4.649	6.596	3.440	3.383	18.067	4.486	3.989	2.709	3.384	14.568	4.597	2.144	5.236										
a. Aset	-3.927	-1.286	-1.367	-2.149	-1.833	-6.635	-1.860	-1.498	-1.952	-1.788	-7.097	-1.824	-2.211	-3.303										
b. Kewajiban	21.213	5.935	7.963	5.589	5.216	24.702	6.346	5.487	4.661	5.171	21.665	6.421	4.355	7.539										
2. Investasi Portofolio	5.098	-3.182	-3.814	-3.118	-1.716	-11.831	3.001	-2.641	-3.034	-4.880	2.206	-1.788	3.190	9.953										
a. Aset	-1.778	-3.377	-1.300	-1.622	-747	-3.045	-1.266	-818	-568	-235	-2.897	-1.300	-1.055	-1.247										
b. Kewajiban	6.883	-1.805	-2.314	-1.497	-969	-8.585	4.268	-1.822	-2.476	5.115	5.104	-489	4.245	10.800										
- Sektor publik ²	-616	-3.485	-3.007	-1.199	801	-6.889	4.539	-146	-1.574	-6.087	8.916	-1.007	7.192	9.395										
- Sektor swasta ³	7.479	1.679	692	-298	-1.770	304	-251	-1.676	-902	-6.882	-3.812	518	-2.947	1.405										
3. Derivatif Finansial	333	137	-86	9	-11	48	205	-83	-83	99	167	-421	393	333										
4. Investasi Lainnya	-10.212	-3.623	-4.602	-5.938	-1.479	-15.842	-3.512	-6.338	-229	2.648	-7.432	-4.460	-2.768	-3.551										
a. Aset	-9.486	-5.591	-3.329	-6.163	-791	-15.884	-2.365	-3.670	-1.996	-2.059	-10.091	-6.352	-3.138	-4.884										
b. Kewajiban	-726	1.968	-1.283	225	-687	242	-1.147	-2.668	1.767	4.716	2.858	1.862	370	-427										
- Sektor publik ²	4.933	1.311	-394	-304	1.791	2.405	561	-358	-222	3.090	3.021	1.071	1.314	916										
- Sektor swasta ³	-5.659	-657	-869	-628	-2.478	-2.162	-1.728	-2.311	1.978	1.827	-433	821	-944	-983										
IV. Total (I + II + III)	16.083	-1.288	2.591	-873	4.104	4.835	6.997	-5.755	-1.744	9.736	7.415	-4.582	-284	4.432										
V. Salisi Perhitungan Bersih	-2.622	-528	-202	-431	626	-535	-480	203	282	-1.119	-1.114	-1.418	-273	1.435										
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	13.461	-1.817	2.389	-1.304	4.730	3.999	6.517	-7.372	-1.462	8.617	6.301	-5.970	-567	5.867										
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait⁴	-13.461	1.817	-2.389	1.304	-4.730	-3.999	-6.517	7.372	1.462	-8.617	-6.301	5.970	567	-5.867										
A. Transaksi Cadangan Devisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B. Kredit dan Pinjaman IMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
C. Eksploitatif Finansial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Memorandum:																								
- Posisi Cadangan Devisa	144.905	139.129	136.379	130.782	137.233	137.233	145.189	137.541	134.856	146.384	146.384	140.390	140.177	149.922										
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Uang Luar Negeri Pemerintah	6.8	7.0	6.4	5.7	5.9	5.9	6.2	6.0	6.0	6.5	6.5	6.2	6.1	6.4										
- Transaksi Berjalan (% PDB)	3.0	0.23	1.27	1.39	1.06	1.00	0.85	-0.71	-0.33	-0.38	-1.16	-0.73	-0.95	-0.60										

Catatan
1) Berdasarkan BPMI, namun penggunaan tanda "+" and "-" mengikut BPMI
2) Terdiri dari Pemerintah dan Bank Sentral
3) Terdiri dari Bank dan Non Bank
4) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit
*angka sementara **angka sangat sementara

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia.

Realisasi Triwulan III 2024.

NILAI TUKAR

C. SISTEM MONETER INTERNASIONAL

Berdasarkan perkembangan Sistem Moneter Internasional sejak berlakunya *Bretton Woods System* tahun 1947, pada umumnya dikenal tiga macam sistem penetapan kurs valas (*forex rate*), yaitu:

1. Sistem kurs tetap atau stabil (*fixed exchange rate system*)
2. Sistem kurs mengambang atau berubah (*floating exchange rate system*) yang terdiri atas :
 - a. *Freely floating Rate* atau *clean float*
 - b. *Managed float* atau *dirty float*
3. Sistem kurs terkait (*pegged exchange rate system*)

D. FIXED EXCHANGE RATE

Tanggal 27 Desember 1945, *Articles of Agreement* ini ditandatangani oleh 29 negara. Berdasarkan *Articles of Agreement* tentang IMF atau yang dikenal sebagai *Bretton Woods System* yang berlaku efektif sejak tanggal 01 Maret 1947 hingga 15 Agustus 1971 (Dekrit Nixon) telah ditetapkan suatu Sistem Moneter Internasional (SMI) dengan didasarkan pada standar emas artinya bahwa setiap mata uang negara anggota IMF dikaitkan & konvertibel dengan emas (*gold exchange standard*). Dalam hal ini sebagai standar ditetapkan bahwa uang dolar AS senilai \$35 ekuivalen dengan satu ounce atau 28,3496 gr emas. Dengan

demikian, \$1 ekuivalen dengan 28,3496/35 gr emas. Disamping itu USD juga digunakan sebagai “numeraire” atau standar kesatuan hitung dimana mata uang negara anggota IMF lainnya dikaitkan (*pegged*) dengan USD. Dengan sistem *pegged* ini maka secara tidak langsung setiap mata uang anggota IMF dikaitkan dengan emas.

E. FLOATING EXCHANGE RATE

Pada tanggal 19 Maret 1973, secara praktis mulai berlaku system kurs mengambang (*generalized floating*) karena negara – negara anggota *European Community* memberlakukan mata uang mereka dengan kurs mengambang terhadap USD.

Floating Exchange Rate adalah sistem kurs mengambang yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas.

Sistem kurs mengambang ini dibagi atas :

1. Sistem kurs mengambang secara murni atau *clean float (freely floating system)*, yaitu penentuan kurs valas di bursa valas terjadi tanpa campur tangan pemerintah.
2. Sistem kurs mengambang terkendali atau *dirty float (managed float system)*, yaitu penentuan kurs valas di bursa valas terjadi dengan campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valas melalui berbagai

kebijakannya di bidang moneter, fiskal dan perdagangan luar negeri.

Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Indonesia mengganti Sistem Moneter dari *Managed Exchange Rate* menjadi *Freely Floating Exchange Rate* pada tanggal 14 Agustus 1997, sebelum meletus Krisis Moneter tahun 1997/1998.

F. PEGGED EXCHANGE RATE SYSTEM

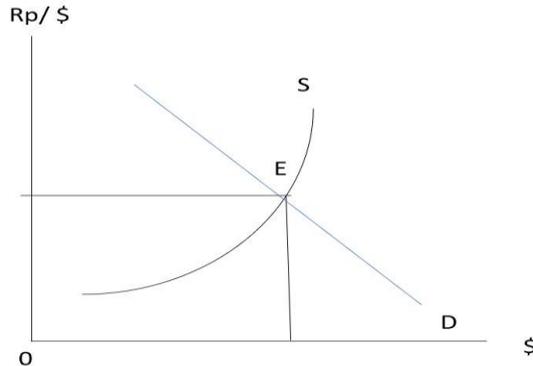
Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem antara lain diterapkan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan mata uangnya dengan mata uang Prancis (FRF) dan beberapa negara lain yang mengaitkan nilai tukar mata uang dengan GBP, USD dan SDR. Selain negara – negara Afrika, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 juga menjalankan *pegged system* ini yang dikenal dengan '*snake system*' yang kemudian diubah menjadi *European Monetary System* (EMS). Dalam *snake system* dan EMS setiap mata uang anggota EEC dikaitkan nilainya dengan *European Currency Unit* (ECU) dan dapat berfluktuasi dalam batas 2,25% diatas atau dibawah kurs tengah.

G. PASAR VALUTA ASING

Valuta Asing (valas) atau *foreign exchange* (forex) atau *foreign currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral.

Total valas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara yang pada umumnya disebut juga sebagai cadangan devisa negara tersebut yang dapat diketahui dari posisi *Balance of Payment* (BOP) atau neraca pembayaran internasionalnya. Makin banyak valas atau cadangan devisa yang dimiliki pemerintah atau penduduk suatu negara maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional.

Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem dimana perusahaan, perorangan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) & penjualan atau penawaran (*supply*) atas valas atau forex.



Gambar 12.1 Kurs Ekuilibrium

Sumber: Case. Fair. Oster, Principles of Macroeconomics, 13th Edition

Kurs Ekuilibrium terjadi pada titik E, dimana kuantitas permintaan dari suatu mata uang asing (D) sama dengan kuantitas penawaran mata uang tersebut (S) . Permintaan berlebih terhadap \$ (kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran) akan menaikkan harga \$, maka \$ akan **terapresiasi** terhadap Rupiah. Sebaliknya jika penawaran \$ berlebih akan menurunkan harga \$, maka \$ akan **terdepresiasi** terhadap Rupiah

Apresiasi mata uang adalah kenaikan harga satu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya, **Depresiasi** mata uang adalah penurunan harga satu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya.

H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar antara lain :

1. Faktor Fundamental
2. Faktor Teknis
3. Faktor Psikologis
4. Faktor Spekulasi

Jika keempat faktor tersebut di atas diuraikan lebih lanjut, maka akan diperoleh rincian dua belas faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi kurs valas sebagai berikut:

1. Supply dan Demand Foreign Currency
2. Posisi Balance of Trade dan Balance of Payment
3. Tingkat Inflasi (PPP Theory)
4. Tingkat Bunga (IRP Theory)
5. Tingkat Pendapatan Nasional
6. Pengawasan Pemerintah
7. Intervensi Pemerintah
8. Ekspektasi
9. Spekulasi
10. Issue/ rumor
11. Kepercayaan Masyarakat Dalam Negeri dan Luar Negeri
12. Politik

BAGIAN 13

EKONOMI TERBUKA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN EKONOMI TERBUKA

Ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara mengizinkan perdagangan bebas dengan negara lain, baik melalui ekspor (penjualan barang/jasa ke luar negeri) maupun impor (pembelian barang/jasa dari luar negeri). Dalam ekonomi terbuka, aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada produksi dan konsumsi domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan pasar internasional. Ekonomi terbuka biasanya diukur melalui komponen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan formula berikut:

$$PDB = AE = C + I + G + (EX - IM)$$

Keterangan: AE = Pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*), C = Konsumsi rumah tangga, I = Investasi, G = Pengeluaran pemerintah, EX = Ekspor, IM = Impor, EX – IM = Neraca perdagangan (*trade balance*).

Ekspor diasumsikan sepenuhnya otonom dan impor adalah

$$IM = mY$$

Nilai m merupakan kecenderungan batas mengimpor ($MPM = \text{marginal propensity to import}$) dengan batasan nilai yaitu $0 \leq m < 1.0$. Juga dapat ditulis

$$\frac{\Delta IM}{\Delta Y} = m$$

Nilai m menjelaskan bahwa perubahan impor yang disebabkan oleh perubahan 1 satuan dari Y atau PDB.

Pengganda ekonomi (*economic multiplier*) menggambarkan seberapa besar perubahan dalam pendapatan nasional akibat perubahan dalam pengeluaran agregat (investasi, belanja pemerintah, atau ekspor). Dalam perekonomian terbuka, angka pengganda dipengaruhi oleh konsumsi domestik, perpajakan, dan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

Di keseimbangan, pendapatan nasional (Y) sama dengan permintaan agregat:

$$Y = C + I + G + (EX - IM)$$

Substitusi fungsi konsumsi dan impor:

$$Y = (C_0 + c(Y - T)) + I + G + EX - mY$$

Susun ulang persamaan:

$$Y - cY + mY = C_0 + cT + I + G + EX$$

$$Y(1 - c + m) = C_0 + cT + I + G + EX$$

Sehingga pendapatan nasional (Y) menjadi:

$$Y = \frac{C_0 + cT + I + G + EX}{1 - c + m}$$

Dari sini, angka pengganda (k) dalam perekonomian terbuka adalah:

$$k = \frac{1}{1 - c + m}$$

Terdapat dua komponen yang mempengaruhi angka pengganda ekonomi terbuka yaitu c dan m . Semakin besar c (MPC), semakin besar angka pengganda. Semakin besar m (MPM), semakin kecil angka pengganda karena lebih banyak pendapatan digunakan untuk impor, bukan beredar dalam ekonomi domestik

Pengganda dalam perekonomian terbuka lebih kecil dibandingkan dalam perekonomian tertutup karena adanya kebocoran melalui impor.

Angka pengganda ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi, atau ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi efeknya bergantung pada seberapa besar kebocoran ke impor.

Dalam ekonomi terbuka, selain kecenderungan batas mengkonsumsi (MPC = *marginal propensity to consume*), juga mempertimbangkan MPM.

Rumus dasar pengganda dalam perekonomian terbuka (α):

$$\alpha = \frac{1}{1 - (MPC + MPM)}$$

Contoh 1. Jika diketahui MPC = 0,8 (artinya 80% dari pendapatan tambahan digunakan untuk konsumsi), dan MPM =

0,2 (artinya 20% dari pendapatan tambahan digunakan untuk impor), maka angka pengganda (α) dapat dihitung:

$$\alpha = \frac{1}{1 - (0.8 - 0.2)} = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

Artinya, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran (G) sebesar Rp 200 triliun, maka total pendapatan nasional (Y) akan meningkat sebesar $(200 \times 2,5) = 500$ triliun.

Jika diketahui pajak terhadap pendapatan, maka angka pengganda berubah menjadi

$$\alpha = \frac{1}{1 - (MPC \times (1 - t) + MPM)}$$

Contoh 2. Jika diketahui $MPC = 0,8$ dan $MPM = 0,2$ dan pajak (t) sebesar 10%, maka angka pengganda dapat dihitung:

$$\alpha = \frac{1}{1 - [0.8 \times (1 - 0.1) - 0.2]} = \frac{1}{0.48} = 2.0833$$

Besar angka pengganda yang diperoleh dari Contoh 1 dan Contoh 2 2,5 dan 2,08333 menggambarkan seberapa besar penurunan besar angka pengganda jika dikenakan pajak. Dalam perekonomian terbuka, angka pengganda dipengaruhi oleh konsumsi domestik, perpajakan, dan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

B. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau sumber daya antara negara-negara. Perdagangan ini terjadi karena adanya keunggulan komparatif, di mana suatu negara dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain.

Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo menjelaskan bahwa negara harus mengkhususkan diri memproduksi barang yang menghasilkan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan cara ini, negara-negara dapat saling menguntungkan dari perdagangan internasional.

Contoh:

Misalkan ada dua negara, Negara A dan Negara B. Negara A lebih efisien dalam memproduksi barang elektronik (misalnya smartphone) dibandingkan dengan Negara B. Sebaliknya, negara B lebih efisien dalam memproduksi barang pertanian (misalnya beras) dibandingkan dengan Negara A.

Keunggulan Komparatif menjelaskan bahwa Negara A sebaiknya fokus pada produksi barang elektronik dan mengekspornya ke Negara B, sementara Negara B fokus pada produksi beras dan mengekspornya ke Negara A. Meskipun kedua negara bisa memproduksi barang-barang tersebut, perdagangan memungkinkan keduanya mendapatkan lebih banyak barang

dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka mencoba memproduksi semuanya sendiri.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto negara:

1. Preferensi konsumen untuk barang luar negeri dan domestik
2. Harga barang domestik dan luar negeri
3. Nilai tukar di mana mata uang asing diperdagangkan terhadap mata uang domestik
4. Pendapatan konsumen domestik dan luar negeri
5. Biaya transportasi
6. Peraturan Pemerintah

Dalam perekonomian terbuka,

$$(1) \quad S = I + NCO$$

Tabungan nasional = Investasi dalam negeri + Arus modal keluar neto, Penawaran (S) dana pinjaman berasal dari tabungan nasional (S), dan permintaan dana pinjaman berasal dari investasi dalam negeri (I), dan arus ke luar modal neto (NCO).

Ketika $NCO > 0$, maka terjadi arus ke luar modal neto. Pembelian modal neto di luar negeri, menambah permintaan akan dana pinjaman yang dihasilkan di dalam negeri

Demikian jug a jika $NCO < 0$, arus masuk modal neto, sumber modal yang berasal dari luar negeri, dan akan mengurangi permintaan akan dana pinjaman yang dihasilkan di dalam negeri.

C. PENTING PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional memberikan peran penting untuk meningkatkan tingkat produktivitas suatu negara dibandingkan dengan usaha sendiri. Berikut disajikan beberapa mafaat dari perdagangan internasional.

1. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Konsep ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibanding negara lain.

Contoh:

- a. Indonesia unggul dalam produksi kelapa sawit karena iklim tropisnya.
- b. Jepang lebih unggul dalam produksi mobil karena teknologi dan tenaga kerja yang lebih terampil.
- c. Jika Indonesia mencoba membuat mobil sendiri dengan skala besar, biayanya akan lebih tinggi dibandingkan mengimpor dari Jepang.

Dengan perdagangan, kedua negara bisa saling menguntungkan: Indonesia mengekspor minyak sawit dan mengimpor mobil dari Jepang.

2. Efisiensi dan Spesialisasi

Jika suatu negara berusaha memproduksi semua kebutuhannya sendiri, itu akan menghambat efisiensi. Spesialisasi memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.

Contoh:

- a. Negara dengan sumber daya alam melimpah (seperti Arab Saudi dengan minyak) lebih baik fokus mengekspor minyak dibanding memproduksi semua barang sendiri.
- b. Negara dengan tenaga kerja terampil (seperti Jerman dalam industri mesin) lebih efisien dalam memproduksi peralatan industri dibanding menanam gandum.

Jika semua negara mencoba swasembada penuh, produksi akan menjadi lebih mahal dan kurang efisien.

3. Perbedaan Sumber Daya Alam dan Faktor Produksi

Tidak semua negara memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja dengan keterampilan yang sama.

Contoh:

- a. Brasil cocok untuk produksi kopi karena iklimnya.
- b. Norwegia memiliki banyak perikanan laut.
- c. Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, sehingga bergantung pada perdagangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan.

Tanpa perdagangan, negara dengan sumber daya terbatas akan kesulitan memenuhi kebutuhan penduduknya.

4. Skala Ekonomi (*Economies of Scale*)

Jika negara hanya memproduksi untuk kebutuhan domestik, produksinya sering kali tidak mencapai skala ekonomi yang optimal.

Contoh:

- a. Jika AS hanya membuat pesawat Boeing untuk konsumsi domestik, biaya produksi per unit akan lebih tinggi. Namun, dengan ekspor ke banyak negara, biaya produksi bisa ditekan.

Dengan perdagangan, perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah besar dan menurunkan biaya produksi per unit.

5. Inovasi dan Transfer Teknologi

Perdagangan memungkinkan negara mendapatkan teknologi dan inovasi dari negara lain.

Contoh:

- a. Negara berkembang bisa mengadopsi teknologi pertanian dari negara maju untuk meningkatkan produktivitas.
- b. Indonesia mengimpor teknologi komunikasi dari negara seperti Korea Selatan untuk mempercepat digitalisasi.

Tanpa perdagangan, inovasi akan lambat dan kemajuan teknologi akan terbatas.

6. Konsumsi yang Lebih Beragam

Perdagangan memungkinkan masyarakat menikmati berbagai produk yang tidak bisa diproduksi secara lokal.

Contoh:

- a. Indonesia tidak bisa menghasilkan anggur dalam jumlah besar, tetapi bisa mengimpor dari Prancis atau Australia.
- b. Orang Jepang bisa menikmati kopi dari Brasil yang tidak bisa ditanam di negaranya.

Tanpa perdagangan, pilihan barang akan terbatas dan harga cenderung lebih mahal.

D. SURPLUS NERACA PERDAGANGAN

Tabel 13.1. di bawah ini memperlihatkan pergerakan PDB Indonesia selama lima tahun dimulai dari tahun 2019 – 2023. Urutan 6 dan 7 memperlihatkan ekspor dan impor barang dan jasa. Selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode waktu tertentu merupakan neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan terjadi ketika nilai ekspor melebihi nilai impor, yang menunjukkan bahwa suatu negara menjual lebih banyak barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan yang dibeli dari luar negeri. Surplus ini sering kali dilihat sebagai indikator kesehatan ekonomi karena mencerminkan kekuatan sektor produksi domestik dan daya saing di pasar internasional.

Salah satu penyebab utama terjadinya surplus neraca perdagangan adalah adanya keunggulan komparatif dalam sektor tertentu. Jika suatu negara memiliki sumber daya alam, teknologi, atau keahlian di bidang tertentu, ia dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Contohnya, negara yang kaya akan sumber daya alam tertentu, seperti minyak atau mineral,

dapat mengekspor barang tersebut dengan harga kompetitif, mendorong ekspor yang lebih tinggi. Selain itu, inovasi dalam teknologi dan efisiensi produksi juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan surplus neraca perdagangan adalah kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan seperti pengurangan tarif, subsidi untuk industri tertentu, atau perjanjian perdagangan bebas yang membuka akses pasar ke negara lain. Selain itu, situasi ekonomi global yang mendukung, seperti permintaan yang tinggi dari negara mitra dagang, juga berkontribusi pada peningkatan ekspor. Semua faktor ini secara bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya surplus neraca perdagangan.

Tabel 13.1 Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,936,399.5	5,780,223.4	5,896,661.8	6,187,943.9	6,486,253.9
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,027.4	130,306.5	132,411.9	139,903.6	153,656.6
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	855,963.0	874,145.6	911,319.7	870,558.2	896,196.4
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,597,664.1	3,419,181.6	3,549,218.8	3,686,573.7	3,848,716.0
5	Perubahan Inventori	129,953.8	51,334.1	62,709.1	70,749.2	127,672.4
6	Ekspor Barang dan Jasa	2,275,488.3	2,083,941.8	2,458,849.1	2,858,016.5	2,895,835.1
7	Impor Barang dan Jasa	2,046,244.2	1,686,003.8	2,105,117.1	2,420,793.8	2,380,948.9
8	Diskrepansi Statistik	63,903.5	69,870.1	214,006.4	317,296.6	274,012.1
Produk Domestik Bruto		10,949,155.4	10,722,999.3	11,120,059.7	11,710,247.9	12,301,393.6

Keterangan: *) angka sementara, **) angka sangat sementara. LNPRT = Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga. Diskrepansi Statistik merupakan angka penyeimbang

(perbedaan antara PDB menurut lapangan usaha dengan PDB menurut pengeluaran).

Sumber: BPS (2024)

Kontribusi ekspor dan impor dalam pendekatan pengeluaran agregat merupakan dua komponen penting dalam menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Ekspor mencerminkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual ke luar negeri, yang menambah total permintaan agregat dan secara langsung meningkatkan PDB. Ketika ekspor meningkat, produsen domestik mendapatkan pendapatan lebih tinggi, yang dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kapasitas produksi nasional. Ekspor juga berperan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan dan meningkatkan cadangan devisa, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian suatu negara.

Sebaliknya, impor merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri, yang mengurangi nilai PDB karena tidak termasuk dalam produksi domestik. Meskipun impor dapat memberikan manfaat seperti akses terhadap bahan baku, teknologi, dan barang konsumsi yang tidak tersedia di dalam negeri, peningkatan impor yang lebih besar dari ekspor dapat menyebabkan defisit perdagangan yang berisiko melemahkan nilai tukar mata uang domestik.

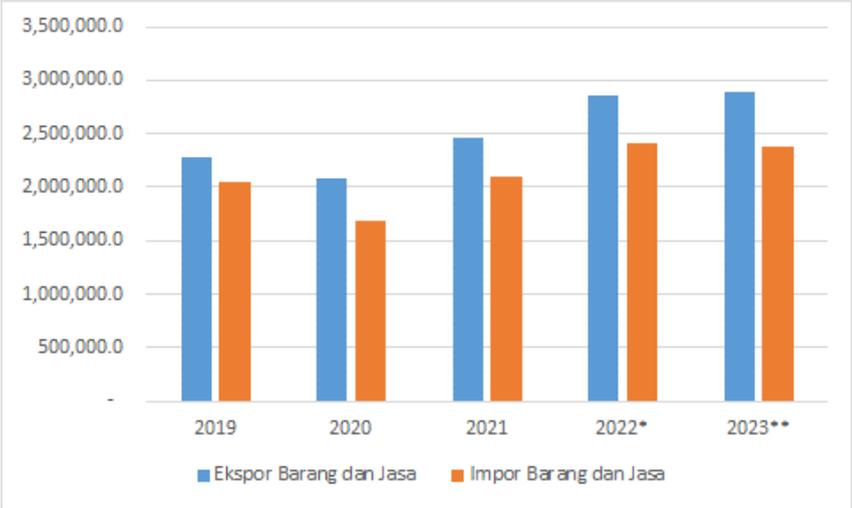
Tabel 13.2 Distribusi PDB Menurut Jenis Pengeluaran Atas
 Dasar Harga Konstan 2010 (Persentase), 2019–2023

No.	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54.2	53.9	53.0	52.8	52.7
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.8	8.2	8.2	7.4	7.3
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32.9	31.9	31.9	31.5	31.3
5	Perubahan Inventori	1.2	0.5	0.6	0.6	1.0
6	Ekspor Barang dan Jasa	20.8	19.4	22.1	24.4	23.5
7	Impor Barang dan Jasa	18.7	15.7	18.9	20.7	19.4
8	Diskrepansi Statistik	0.6	0.7	1.9	2.7	2.2
Produk Domestik Bruto		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data Diolah

Melalui Gambar 13.1 di bawah ini memperlihatkan histogram ekspor dan impor selama lima tahun yang memperlihatkan bagaimana kinerja perdagangan suatu negara dan bagaimana keseimbangan antara kedua komponen tersebut mempengaruhi neraca perdagangan. Jika suatu negara mengalami surplus neraca perdagangan, artinya nilai ekspor secara konsisten lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Dalam histogram, hal ini terlihat dari batang ekspor yang selalu lebih panjang atau lebih tinggi dibandingkan batang impor dalam setiap tahun yang ditampilkan. Tren surplus ini menunjukkan bahwa negara mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan dari perdagangan internasional dibandingkan dengan pengeluarannya untuk barang dan jasa dari luar negeri, yang dapat memperkuat cadangan devisa dan stabilitas ekonomi.

Kondisi surplus perdagangan dalam lima tahun juga mencerminkan daya saing ekspor yang kuat, baik dari segi peningkatan produksi, diversifikasi produk, maupun permintaan global yang tinggi terhadap barang dan jasa domestik. Faktor seperti keunggulan komparatif, inovasi, serta kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor dapat berperan dalam mempertahankan tren surplus ini.



Sumber: Data Diolah

Gambar 13.3 Pergerakan Ekspor dan Impor Tahun 2019-2023

BAGIAN 14

KRISIS EKONOMI GLOBAL

A. KRISIS EKONOMI

Dalam catatan sejarah ekonomi dunia, serangkaian krisis keuangan yang dialami berbagai negara secara signifikan dan gejala destruktif telah merusak sendi-sendi perekonomian negara-negara tersebut. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat ekstrim akibat krisis keuangan.

Great Depression adalah krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1929 dan berlangsung hingga akhir tahun 1930-an. Ini dianggap sebagai krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dunia modern. Depresi ekonomi tahun 1929-1939 dan krisis pertengahan tahun 1990-an hingga tahun 2001 menelan korban beberapa negara, seperti Meksiko mengalami krisis pada tahun 1994-1995, sementara negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina mengalami krisis yang cukup parah pada tahun 1997 dan 1998.

B. DEPRESI BESAR (1929-1939)

Depresi hebat (great depression) merupakan periode depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1929 hingga 1940-an. Ini disebut sebagai depresi terbesar yang pernah membuat Amerika Serikat

benar-benar mengalami kebangkrutan. Depresi ini merambah ke seluruh aspek kehidupan seperti tatanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang sudah dibangun bertahun-tahun sebelum krisis.

Depresi hebat berawal dari kegiatan di pasar saham Amerika Serikat. *Buying on margin* ialah sistem pembelian saham dimana para investor saham (spekulator) hanya membayar paling sedikit sepuluh persen dari nilai saham, dan selebihnya meminjam dari pialang (broker) atau bank.

Selama beberapa bulan, aksi spekulasi rakyat Amerika Serikat di Bursa Efek New York (New York Stock Exchange, NYSE) semakin meningkat, bersama dengan harga saham yang semakin tinggi. Penjualan saham di NYSE meningkat dari 236 juta saham pada tahun 1923 menjadi 451 juta pada tahun 1926, sedangkan harga per saham yang semula 108 dolar menjadi 166 dolar.

Jumlah pinjaman meningkat dari 3 milyar mulai bulan Juni 1927 hingga September 1929, aksi pinjam spekulator kepada bursa saham New York dan bankers meningkat dari 3,5 milyar dolar menjadi 8,5 milyar dolar. Sementara itu volume perdagangan di NYSE mengalami peningkatan dari 451 juta pada tahun 1926 menjadi 577 juta dolar pada tahun 1927. Pada saat harga saham semakin tinggi, semakin banyak pengusaha yang tertarik untuk turut serta dalam aktivitas ini. Untuk mendapatkan modal lebih banyak guna membeli saham, mereka meningkatkan produksi mereka, dan keuntungan tersebut dipertaruhkan di pasar saham.

Hal ini mengakibatkan terjadinya produksi berlebih, sementara permintaan terhadap barang-barang, berkurang sehingga harga-harga bergerak turun. Produksi berkurang, yang menyebabkan perusahaan memecat tenaga kerjanya. Banyaknya pengangguran menyebabkan peredaran uang di pasar berkurang dan berkurangnya kredit bank, yang kemudian menyebabkan berkurangnya pembangunan pabrik-pabrik dan rumah-rumah. Akhirnya permintaan produksi kembali berkurang, dan terjadi depresi. Proses terjadinya Depresi Hebat ini dikenal dengan *The downward spiral of deflation*.

Pada awal Oktober 1929, harga saham di NYSE kembali turun, pada tanggal 21 Oktober 1929, terjadi *bank on run*, yaitu aktivitas penjualan saham secara besar-besaran karena ketakutan akan terjadinya penurunan yang lebih besar. Pada tanggal 24 Oktober 1929, total jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 13 juta saham, dengan harga yang rendah. Pada sore harinya J.P. Morgan & Company dan beberapa bank menyediakan dana mencapai 240 juta dolar untuk membeli saham, demi menjaga kestabilan pasar.

Depresi berlangsung bertahun-tahun dan tidak hanya merusak kehidupan ekonomi Amerika saja, tetapi juga merubah kehidupan sosial dan politik rakyat Amerika Serikat yang telah terbentuk dalam tahun-tahun sebelumnya.

C. KRISIS KEUANGAN ASIA (1997-1998)

Krisis keuangan Asia dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997 dan menyebar ke seluruh Asia Timur dan meluas sampai Amerika Latin dan Eropa Timur pada tahun 1998. Krisis dimulai saat permintaan akan dollar jatuh pada kurs 26 Baht per dollar, yang sangat melebihi pasokan. Baht Thailand terdepresiasi hingga 25 % terhadap Dollar Amerika Serikat dan menimbulkan inflasi sehingga menghambat daya saing internasional, berimbas pada ekspor yang menurun.

Thailand kemudian dirugikan oleh penutupan 58 lembaga keuangan non-bank karena bangkrut. Krisis mata uang ini menjalar ke bursa saham, dengan turunnya harga saham, yang diakibatkan oleh tingkat bunga tinggi sebagai reaksi kebijakan pemerintah dalam mengetatkan likuiditas. Krisis moneter yang menular sangat cepat terutama di kawasan Asia Pasifik, memaksa negara-negara kawasan meminta bantuan kepada *International Monetary Fund* atau IMF yang diharapkan dapat membantu keluar dari krisis. Amerika Serikat dan Jepang langsung turun tangan di Indonesia. Alasannya adalah mereka lebih takut jika krisis di Indonesia akan berdampak pada regional.

Dunia internasional, sangat khawatir dengan krisis kawasan ini, khususnya Amerika. Akhirnya perbankan di Korea Selatan, Indonesia dan Thailand ambruk dan banyak bank yang tutup. Sektor riil juga mengalami mendapat pukulan hebat, banyak

perusahaan tutup dan pengangguran meluas di negara-negara tersebut. Krisis ekonomi ini mengejutkan karena fundamental ekonomi Asia dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia.

D. KRISIS KEUANGAN GLOBAL (2008)

Krisis berikutnya adalah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009. Banyak pengamat yang menyatakan krisis 2008 ini adalah krisis finansial terburuk dalam sejarah perekonomian dunia dalam delapan puluh tahun terakhir pasca *great depression* 1930. Saking hebatnya krisis ini para ekonom dunia menyebutnya sebagai *the mother of all crises*. Krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang berdampak pada krisis sektor finansial yang lebih dalam. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika Serikat, tetapi juga dirasakan di berbagai negara-negara dunia lainnya dan termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi Amerika mula-mula karena ada dorongan untuk konsumsi. Konsumerisme pada rakyat melebihi kemampuan penghasilan yang diperolehnya. Pelaku pasar uang terbiasa dengan utang untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan kartu kredit. BNP Paribas, sebagai salah satu bank terbesar di dunia, memberitakan pembekuan beberapa surat berharga yang

berhubungan dengan kredit properti yang memiliki ketidakpastian tinggi di Amerika Serikat.

Subprime mortgage adalah istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk atau belum pernah melakukan peminjaman, sehingga digolongkan sebagai kredit berisiko tinggi. Penyaluran *subprime mortgage* di Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat sebesar US\$ 200 miliar pada 2002 hingga US\$ 500 miliar di tahun 2005.

Puncaknya adalah pada 15 September di mana Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya dan menyusul kegagalan di pasar *subprime mortgage*. Lehman diketahui telah mengalami kerugian mencapai US\$ 60 miliar karena eksposur di pasar *subprime mortgage*. Hal tersebut membuat pasar finansial dunia dilanda kepanikan dan indeks Dow Jones ditutup merosot hingga 504,48 poin. Harga minyak juga ikut terdampak dan turun di bawah US\$ 100 per barel. Sementara emas sebagai *safe haven* langsung meningkat menjadi US\$ 787 per ons.

Krisis subprime mortgage sangat cepat menyebar hingga lintas sektoral dan lintas negara karena pemegang *mortgage backed securities* (MBS) tersebar luar di berbagai belahan dunia. Pasar saham Amerika Serikat menurun drastis dengan nilai yang tersapu akibat krisis mencapai 8 triliun selama periode 2007-2009. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan pengangguran terus meningkat hingga mencapai 10 persen pada Oktober 2009.

E. KRISIS EKONOMI YUNANI (2010)

Menurut pengamat, secara ekonomi sebelum bergabung dengan *Eurozone* pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran. Setelah mengadopsi Euro sebagai mata uang, pengeluaran publik justru semakin meningkat. Selain itu, Yunani lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Pengeluaran pemerintah Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan negara anggota *Eurozone* yang lain.

Krisis Yunani berawal dari akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata mencapai sebesar 6% dari PDB selama 30 tahun. Yunani nampaknya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam kebijakan defisitnya, sehingga defisit anggaran mencapai dua kali lipat dari ketentuan Uni Eropa (UE) yang maksimum ditetapkan sebesar 3%. Sementara itu pasar obligasi di dalam negerinya yang masih sangat terbatas. Untuk itu Yunani menjual surat utang Negara (SUN)-nya kepada investor di Prancis, Swiss, dan Jerman. Sebagai dampak akumulasi defisit, Saat itu defisit Yunani mencapai 13,6% dari PDB Tingginya defisit Yunani terjadi dampak dari lemahnya disiplin anggaran serta buruknya administrasi perpajakan. Hal ini tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun manipulasi pembukuan. Ketentuan batas maksimum defisit UE dilanggar dengan memanipulasi pembukuan. Dalam sistem pembukuan dan anggaran berbasis kas, yang digunakan di Yunani, tidak mengantisipasi risiko fiskal karena dalam anggaran tidak memuat informasi mengenai pengeluaran

contingency. Akibatnya pada saat SUN jatuh tempo pada April dan Mei 2010 ini, kewajiban pembayaran utang sebesar 20 miliar euro mengalami gagal bayar.

Atas kegagalan di atas, pemerintah Yunani secara resmi meminta bantuan secara formal kepada UE dan International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis hutang yang sedang melanda negeri para dewa tersebut. IMF menyepakati akan mengucurkan dana bantuan darurat sebesar USD 160 miliar. Namun kesepakatan ini harus dibayar mahal oleh Yunani.

Sebagai imbalan bagi dana talangan itu, Yunani setuju untuk mengurangi APBNnya sebesar USD 43 miliar dalam masa tiga tahun, dengan tujuan untuk mengurangi defisit menjadi di bawah 3% dari GDP menjelang tahun 2014. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas finansial Yunani dan pemerintahan di seluruh Eropa.

Dengan menggunakan teori Complex Interdependence dalam melihat Uni Eropa dan IMF sebagai *lender of last resort*, kegagalan kebijakan *bailout* pertama oleh Uni Eropa dan IMF dalam mengatasi krisis finansial Yunani dikarenakan terlalu kompleksnya permasalahan *bailout* terhadap Yunani.

F. PANDEMI COVID-19 (2020-2022)

Pandemi COVID-19 di Cina pada Januari 2020 mulanya dianggap sebagai masalah lokal (walaupun dampak ekonomi globalnya diakui segera), penyebaran virus ke bagian lain dunia pada bulan Februari dan Maret 2020 mulai menjadi masalah besar. Krisis global dengan skala dan sifat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seperti yang diamati oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, dunia kini menghadapi ujian global paling serius sejak Perang Dunia Kedua. Covid-19 yang sedang terjadi menyebabkan krisis yang sangat besar bagi ekonomi global. Hal yang paling penting adalah pandemi COVID-19 bersamaan dengan jatuhnya pasar saham, jatuhnya harga minyak dan perang harga minyak, yang secara umum merupakan penyebab awal dari resesi.

Masalah penting lainnya yaitu seberapa cepat perekonomian akan pulih setelah diterapkannya social distancing, physical distancing, karantina, dan pembatasan wilayah atau lock down. Pandemi saat ini dan konsekuensinya dapat menyebabkan perlambatan dalam globalisasi atau bahkan menghasilkan proses deglobalisasi.

Dalam satu ilustrasi, dunia akan mengalami episode deglobalisasi, dengan pengurangan 10% pada dimensi lunak dan pengurangan 9% pada dimensi ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, terutama pada negara tujuan ekspor dan melemahnya harga komoditas dapat memberikan tekanan pada ekspor. Hal

yang serupa terjadi pada layanan ekspor, terutama pada jasa perjalanan atau pariwisata (Sugianto, 2020). Berdasarkan *Bureau of Labor Statistics*, tingkat pengangguran AS pada bulan Maret yaitu 4,4% ke level tertinggi sejak Agustus 2017.

Pandemi COVID-19 bukan hanya hasil dari globalisasi. Namun juga memiliki efek yang luar biasa tentang globalisasi dalam aspek terpentingnya,

G. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN

Kebijakan untuk mengatasi krisis global harus bersifat holistik dan terkoordinasi, melibatkan berbagai sektor dan negara. Kombinasi antara kebijakan fiskal, moneter, sosial, dan lingkungan yang tepat dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial di tingkat global.

Pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta harus aktif dan komit dalam menjalankan kebijakan untuk mengatasi krisis global. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari krisis yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Krisis global yang dimaksud bisa berupa krisis keuangan, krisis kesehatan, perubahan iklim, atau krisis geopolitik. Adapun kebijakan yang dapat diambil pemerintah adalah:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berfokus pada pengelolaan anggaran pemerintah melalui pengeluaran dan pendapatan negara.

- a. Stimulus Fiskal:
- b. Pemotongan Pajak:
- c. Peningkatan Bantuan Sosial:

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

- a. Penurunan Suku Bunga:
- b. Quantitative Easing (QE):
- c. Intervensi Mata Uang:

3. Kebijakan Perdagangan Internasional

- a. Penghapusan Tarif dan Hambatan Perdagangan:
- b. Kerjasama Ekonomi Regional:.
- c. Diversifikasi Pasar Ekspor:

4. Kebijakan Sosial

- a. Perlindungan Tenaga Kerja:.
- b. Investasi di Sektor Kesehatan dan Pendidikan:
- c. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan
Memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

5. Kebijakan Lingkungan

- a. Transisi ke Energi Terbarukan: Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon:
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

6. Kerjasama Internasional

- a. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, WTO): Mendapatkan bantuan keuangan dan teknis.
- b. Diplomasi Multilateral
- c. Bantuan Kemanusiaan

H. INDONESIA DAN KRISIS GLOBAL

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai krisis global yang pernah terjadi, seperti Great Depression (1929-1939), Krisis Keuangan Asia (1997-1998), Krisis Keuangan Global (2008), Krisis Ekonomi Yunani (2010), hingga Pandemi COVID-19 (2020-2022).

1. Depresi Besar (1929-1939)

Pada masa ini, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, sehingga kebijakan ekonomi lebih dikendalikan oleh pemerintah kolonial.

- a. Kebijakan Tanam Paksa dan Ekspor Komoditas Pertanian untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial.
- b. Pengetatan anggaran dan pemangkasan upah pekerja untuk mengatasi defisit ekonomi.
- c. Devaluasi mata uang Gulden untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Namun, dampaknya sangat buruk bagi masyarakat pribumi yang semakin miskin dan kehilangan pekerjaan.

2. Krisis Keuangan Asia (1997-1998)

Krisis ini merupakan salah satu krisis terberat yang dihadapi Indonesia, yang menyebabkan nilai tukar Rupiah anjlok drastis.

Kebijakan yang diambil:

- a. Intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah.
- b. Paket Bailout dari IMF (International Monetary Fund) sebesar \$43 miliar untuk memulihkan ekonomi.
- c. Restrukturisasi Perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- d. Pemotongan Subsidi BBM dan Pangan untuk mengurangi beban APBN.
- e. Reformasi Politik dan Ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan investor asing.

Hasilnya: Meski butuh waktu lama, ekonomi Indonesia berangsur pulih, namun terjadi pergantian rezim dari Orde Baru ke Reformasi.

3. Krisis Keuangan Global (2008)

Krisis ini dipicu oleh kegagalan sistem keuangan di Amerika Serikat yang berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kebijakan yang diambil:

- a. Kebijakan Stimulus Fiskal melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
- b. Penurunan Suku Bunga oleh Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan likuiditas di pasar.
- c. Penguatan Cadangan Devisa untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah.
- d. Penguatan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi domestik.

Hasilnya: Indonesia mampu keluar dari krisis lebih cepat dibanding negara lain, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di atas 4,5%.

4. Krisis Ekonomi Yunani (2010)

Meski krisis ini lebih berpusat di Eropa, Indonesia tetap mengambil langkah antisipatif untuk melindungi perekonomian domestik.

Kebijakan yang diambil:

- a. Diversifikasi Pasar Ekspor dari negara-negara Eropa ke negara-negara Asia.
- b. Penguatan Cadangan Devisa dan Stabilitas Rupiah oleh Bank Indonesia.
- c. Reformasi Fiskal dan Pengurangan Defisit Anggaran.

Hasilnya: Dampak krisis ini terhadap Indonesia relatif kecil karena ketahanan ekonomi yang lebih kuat pasca reformasi 1998.

5. Pandemi COVID-19 (2020-2022)

Krisis ini adalah yang paling kompleks, karena berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Kebijakan yang diambil:

- a. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695 triliun.
- b. Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa, dan Kartu Pra Kerja untuk membantu masyarakat terdampak.
- c. Kebijakan Relaksasi Kredit UMKM dan subsidi bunga pinjaman.
- d. Program Vaksinasi Massal untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- e. Pemberian insentif pajak dan stimulus bagi industri manufaktur.

Hasilnya: Ekonomi Indonesia mengalami resesi pada tahun 2020, tetapi berhasil bangkit dengan pertumbuhan positif pada tahun 2021. Berikut ini adalah tabel ringkasan kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi krisis global

Tab 14.1 Kebijakan Mengatasi Krisis Global

Krisis Global	Kebijakan Utama Indonesia	Hasil yang Dicapai
Depresi Besar (1929-1939)	Devaluasi Gulden dan ekspor komoditas	Dampak buruk pada rakyat pribumi

Krisis Asia (1997-1998)	Bailout IMF, reformasi perbankan, BLT	Pemulihan bertahap, reformasi politik
Krisis Global (2008)	Stimulus fiskal, penurunan suku bunga, dukungan UMKM	Pertumbuhan tetap positif
Krisis Yunani (2010)	Diversifikasi ekspor, reformasi fiskal	Dampak minimal
Pandemi COVID-19 (2020-2022)	Program PEN, bantuan sosial, vaksinasi massal	Pemulihan ekonomi bertahap

Sumber : Dihimpun dan diolah penulis dari berbagai sumber

BAGIAN 15

ISU-ISU KONTEMPORER DALAM EKONOMI MAKRO

A. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKONOMI MAKRO

Globalisasi menjadi fenomena yang mendominasi perkembangan ekonomi makro di berbagai negara. Integrasi ekonomi global membawa perubahan signifikan terhadap dinamika perdagangan, arus modal, dan kebijakan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi perdagangan, inovasi teknologi, serta peningkatan mobilitas tenaga kerja. Namun dampaknya tidak selalu positif karena globalisasi juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap pasar luar negeri, serta fluktuasi yang lebih tajam dalam sektor keuangan dan moneter (Stiglitz, 2021).

Perdagangan internasional yang semakin terbuka akibat globalisasi memungkinkan negara memperoleh keuntungan dari keunggulan komparatif masing-masing. Negara berkembang dapat mengekspor barang serta jasa dengan biaya produksi relatif efisien, sementara negara maju dapat memanfaatkan teknologi dan modal yang lebih kuat. Namun fenomena ini juga menyebabkan persaingan yang semakin ketat di tingkat global yang dapat berdampak pada industri dalam negeri yang kurang kompetitif. Dalam beberapa kasus negara berkembang mengalami deindustrialisasi prematur

karena tak sanggup berkompetisi terhadap produk impor yang jauh relatif murah (Rodrik, 2020).

Selain perdagangan, arus modal internasional juga meningkat secara signifikan dalam era globalisasi. Investasi asing langsung (FDI) dan portofolio keuangan memberikan akses terhadap modal bagi negara yang membutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor industri. Namun peningkatan aliran modal ini juga memiliki risiko tersendiri. Ketergantungan terhadap investasi asing dapat menyebabkan volatilitas ekonomi yang tinggi, terutama ketika investor global menarik modal dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Krisis keuangan yang terjadi di beberapa negara berkembang sering dikaitkan dengan arus modal yang tidak stabil akibat globalisasi (Reinhart & Rogoff, 2021).

Globalisasi juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi, baik dalam skala domestik maupun internasional. Negara dengan tingkat industrialisasi tinggi cenderung memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan negara yang masih bergantung pada sektor primer. Selain itu dalam skala nasional kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang mempunyai akses pada pendidikan dan teknologi terhadap yang tidak semakin melebar. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi kebijakan ekonomi makro dalam memastikan distribusi yang lebih merata dan inklusif (Piketty, 2020).

Dampak globalisasi terhadap kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi yang semakin terintegrasi, kebijakan suku bunga dan nilai tukar sebuah negara selain ditentukan aspek dalam negeri, juga oleh kondisi ekonomi global. Bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan moneter karena dampaknya selain dirasakan secara domestic, juga pada pasar dunia. Kebijakan fiskal menghadapi pula tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang (Blanchard, 2022).

Seiring globalisasi, peran teknologi dalam ekonomi makro juga semakin meningkat. Digitalisasi mengubah cara bisnis beroperasi, mempercepat arus informasi, dan menciptakan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun transformasi digital ini juga membawa tantangan seperti disrupsi dalam pasar tenaga kerja di mana otomatisasi dan kecerdasan buatan menggantikan banyak pekerjaan konvensional. Hal ini menuntut pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi agar tidak terjadi pengangguran struktural yang berkepanjangan (Autor, 2021).

Dalam aspek lingkungan, globalisasi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim serta eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Mobilitas barang dan jasa yang meningkat menyebabkan konsumsi energi lebih besar yang meningkatkan emisi karbon. Negara dengan kebijakan lingkungan yang longgar sering menjadi tujuan

investasi bagi industri yang ingin menghindari regulasi ketat di negara asal. Oleh karena itu diperlukan koordinasi global dalam mengatasi dampak lingkungan dari globalisasi, termasuk penerapan kebijakan perdagangan yang lebih berkelanjutan (Sachs, 2020).

Isu tenaga kerja juga menjadi aspek penting dalam globalisasi ekonomi makro. Dengan semakin terbukanya pasar tenaga kerja internasional, banyak perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah dari negara berkembang untuk menekan biaya produksi. Hal ini menciptakan ketidakstabilan di negara maju, di mana pekerja domestik menghadapi persaingan ketat dari pekerja asing dengan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain migrasi tenaga kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan *brain drain* di negara asal, di mana tenaga kerja berkualitas lebih memilih bekerja di luar negeri karena insentif ekonomi yang lebih menarik (Docquier & Rapoport, 2020).

Meskipun memiliki berbagai tantangan, globalisasi juga membuka peluang bagi negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui berbagai forum internasional seperti G20, WTO, dan IMF. Organisasi ini berperan dalam menetapkan aturan perdagangan yang lebih adil serta menciptakan sistem keuangan global yang lebih stabil. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan proteksionisme di beberapa negara yang mengancam kelangsungan kerja sama ekonomi internasional. Kebijakan tarif dan peningkatan hambatan perdagangan

menghambat pertumbuhan ekonomi global dan memperburuk ketidakpastian ekonomi makro (Krugman, 2021).

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, globalisasi tetap menjadi faktor utama dalam perkembangan ekonomi makro modern. Negara harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi melalui kebijakan ekonomi adaptif dan inovatif. Strategi yang mengedepankan keseimbangan antara integrasi ekonomi global dan perlindungan kepentingan domestik menjadi kunci utama mengatasi masalah globalisasi pada masa kini. Diperlukan pendekatan ekonomi makro yang selain mempunyai orientasi terhadap pertumbuhan, juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Stiglitz, 2019).

B. INFLASI DAN TANTANGAN STABILITAS HARGA

Inflasi adalah suatu masalah kritical pada ekonomi makro yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kebijakan moneter, serta stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan daya beli, ketidakpastian ekonomi, dan ketidakseimbangan dalam sektor keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai faktor seperti gangguan rantai pasokan global, kenaikan harga komoditas, serta kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif telah berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan inflasi di berbagai negara (Bernanke et al., 2022).

Peningkatan inflasi sering berakar pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan produksi, harga cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi akibat peningkatan belanja konsumen, ekspansi kredit, atau kebijakan fiskal yang agresif. Gangguan rantai pasokan seperti kelangkaan bahan baku, krisis energi, atau konflik geopolitik juga memicu kenaikan harga secara luas sehingga memperburuk kondisi inflasi (Goodhart & Pradhan, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam mengendalikan inflasi adalah memastikan kebijakan moneter yang diberlakukan bank sentral tetap efektif. Pada kondisi inflasi tinggi, bank sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan agregat. Namun kebijakan ini sering berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan biaya pinjaman, serta potensi resesi. Oleh karena itu bank sentral harus menemukan keseimbangan antara menekan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mishkin, 2021).

Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal berperan krusial pula pada pengendalian inflasi. Pengurangan defisit anggaran serta pengelolaan belanja negara yang lebih efisien dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Namun dalam praktik kebijakan fiskal sering menghadapi tantangan politik kompleks. Pemerintah mungkin enggan memangkas belanja publik atau menaikkan pajak

karena alasan sosial dan ekonomi, terutama dalam kondisi krisis ekonomi atau menjelang pemilihan umum (Alesina et al., 2021).

Faktor eksternal juga berperan dalam menentukan tingkat inflasi di suatu negara. Globalisasi membuat perekonomian nasional semakin terintegrasi dengan pasar internasional sehingga guncangan harga di satu negara dapat berdampak luas di negara lain. Misalnya kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi di berbagai negara yang memicu inflasi global. Kerja sama internasional menjadi penting dalam mengatasi tekanan inflasi yang bersumber faktor eksternal (Obstfeld, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi pola inflasi dalam ekonomi makro. *E-commerce* dan otomatisasi produksi meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan yang dapat menekan harga barang dan jasa. Namun digitalisasi juga membawa tantangan baru seperti meningkatnya dominasi perusahaan teknologi besar yang dapat mempengaruhi struktur pasar dan mekanisme harga. Oleh karena itu pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Rogoff, 2020).

Ketimpangan ekonomi juga dapat memperburuk dampak inflasi terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Inflasi yang tinggi cenderung lebih merugikan masyarakat berpenghasilan rendah

karena mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan energi. Ketika harga naik kelompok ini mengalami penurunan daya beli signifikan, sementara kelompok berpenghasilan tinggi memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menghadapi kenaikan biaya hidup. Kebijakan ekonomi makro dengan orientasi terhadap inklusivitas sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif inflasi terhadap kelompok rentan (Stiglitz, 2022).

Ketidakpastian inflasi juga berdampak pada keputusan investasi dan bisnis. Dalam kondisi inflasi yang tidak stabil, perusahaan menghadapi kesulitan merencanakan produksi dan investasi jangka panjang. Nilai mata uang yang berfluktuasi akibat inflasi juga dapat mengurangi daya saing ekspor suatu negara. Kepastian dalam kebijakan ekonomi dan komunikasi yang transparan dari bank sentral menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan kepercayaan pasar (Blanchard, 2023).

Dalam menghadapi tantangan inflasi beberapa negara telah mengadopsi kebijakan inflasi tertarget di mana bank sentral menetapkan sasaran inflasi tertentu sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan moneter. Pendekatan ini terbukti efektif dalam beberapa kasus, tetapi juga memiliki keterbatasan, terutama ketika inflasi dipicu oleh faktor eksternal di luar kendali bank sentral. Koordinasi kebijakan moneter, fiskal, serta regulasi sektor keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga jangka panjang (Woodford, 2022).

Inflasi tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam ekonomi makro yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati dan terkoordinasi. Dengan memahami aspek yang menentukan inflasi beserta implikasinya pada beragam sektor perekonomian, pemerintah dan bank sentral dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkungan ekonomi global yang semakin kompleks, kebijakan adaptif dan berbasis data menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan inflasi di masa depan (Gopinath, 2023).

C. KRISIS KEUANGAN DAN RESESI EKONOMI

Krisis keuangan dan resesi ekonomi merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah ekonomi global, sering menimbulkan dampak luas terhadap berbagai sektor. Krisis keuangan biasanya ditandai dengan gejolak dalam sistem perbankan dan pasar keuangan, sementara resesi ekonomi mengacu pada kontraksi signifikan dalam aktivitas ekonomi suatu negara yang berlangsung selama beberapa kuartal. Faktor yang berkontribusi terhadap krisis keuangan dan resesi ekonomi sangat kompleks, melibatkan kebijakan ekonomi, ketidakseimbangan dalam sektor keuangan, serta faktor eksternal seperti guncangan global (Reinhart & Rogoff, 2021).

Penyebab utama krisis keuangan adalah ketidakseimbangan sektor perbankan dan keuangan. Kegagalan perbankan dalam mengelola risiko kredit dapat menyebabkan peningkatan besaran pinjaman bermasalah yang meruntuhkan kestabilan finansial. Contohnya adalah krisis keuangan global 2008 yang dipicu oleh kredit perumahan *subprime* di Amerika Serikat. Ketika banyak rumah tangga gagal membayar pinjaman, sistem keuangan global mengalami tekanan berat, mengakibatkan kebangkrutan lembaga keuangan besar dan penurunan tajam dalam pasar saham global (Brunnermeier, 2020).

Selain masalah di sektor keuangan, kebijakan moneter dan fiskal yang tidak tepat juga dapat memperburuk krisis ekonomi. Jika bank sentral gagal mengendalikan likuiditas dalam perekonomian atau pemerintah mengadopsi kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan, ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat. Sebagai contoh hiperinflasi yang terjadi di Venezuela dalam dekade terakhir merupakan akibat dari kombinasi kebijakan moneter ekspansif yang tidak terkendali, ketergantungan pada ekspor minyak, serta krisis politik yang berkepanjangan (Hanke, 2019).

Resesi ekonomi sering terjadi sebagai konsekuensi dari krisis keuangan berkepanjangan. Dalam kondisi resesi pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat pengangguran meningkat, dan investasi menurun. Hal ini memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah menunjukkan resesi ekonomi dapat berlangsung pada durasi beragam bergantung respons

kebijakan pemerintah dan efektivitas langkah pemulihan ekonomi (Summers, 2022).

Dampak resesi selain dirasakan sektor keuangan dan industri, juga rumah tangga. Dalam situasi resesi, daya beli masyarakat menurun karena upah stagnan dan lapangan pekerjaan berkurang. Akibatnya konsumsi rumah tangga melemah yang memperdalam kontraksi ekonomi. Ketika perusahaan mengalami penurunan permintaan cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja yang semakin memperburuk dampak sosial dari resesi (Krugman, 2023).

Untuk mengatasi krisis keuangan dan resesi ekonomi, pemerintah dan bank sentral biasanya mengadopsi berbagai kebijakan pemulihan. Kebijakan moneter ekspansif seperti menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas di pasar, sering digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain kebijakan fiskal, seperti meningkatkan belanja publik dan memberikan stimulus ekonomi juga menjadi strategi penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko inflasi lebih besar (Blanchard & Pisani-Ferry, 2021).

Selain kebijakan domestik, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam menangani krisis ekonomi. Organisasi semisal Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia sering berperan memberikan bantuan keuangan dan rekomendasi kebijakan bagi negara yang mengalami krisis. Contohnya adalah

bantuan keuangan yang diberikan kepada Yunani selama krisis utang Eropa untuk mencegah kebangkrutan negara tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi regional (Obstfeld, 2020).

Faktor eksternal seperti pandemi *COVID-19* juga menunjukkan bagaimana krisis keuangan dan resesi dapat terjadi secara global. Pandemi menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan, menurunkan konsumsi, dan memaksa banyak negara menerapkan kebijakan pembatasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Krisis ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan langkah stimulus besar-besaran guna mencegah resesi lebih dalam (Baldwin & Mauro, 2020).

Meskipun pemulihan ekonomi pascakrisis sering memerlukan durasi panjang, terdapat langkah yang bisa diambil dalam meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis di masa depan. Penguatan regulasi sektor keuangan, diversifikasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat membantu mengurangi risiko sistemik yang dapat memicu krisis ekonomi. Investasi dalam sektor pendidikan dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara (Rajan, 2021).

Krisis keuangan dan resesi ekonomi merupakan tantangan besar dalam ekonomi makro yang dapat berdampak luas terhadap publik. Pemahaman komprehensif mengenai aspek penyebab krisis, kebijakan efektif dalam penanganannya, dan strategi jangka

panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat penting. Dengan kebijakan tepat dan kerja sama global solid, dampak negatif dari krisis keuangan dan resesi dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dalam jangka panjang (Cecchetti & Schoenholtz, 2022).

D. PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MAKRO

Dalam dekade terakhir ekonomi digital telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi pendorong utama transformasi ekonomi global. Digitalisasi mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, menciptakan model bisnis baru, serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap ekonomi makro, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kebijakan moneter, hingga distribusi kekayaan. Dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas, berbagai negara menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang (Brynjolfsson & McAfee, 2020).

Dampak utama perkembangan ekonomi digital adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses bisnis, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan

efisiensi dalam rantai pasokan global. Perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* mampu mengoptimalkan operasional dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Peningkatan efisiensi ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global (Reenen, 2021).

Selain meningkatkan produktivitas, ekonomi digital juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Munculnya sektor ekonomi berbasis digital seperti *e-commerce*, teknologi finansial (*fintech*), dan industri kreatif digital membuka peluang kerja bagi jutaan individu di seluruh dunia. Platform seperti Amazon, Tokopedia, gojek dan Shopee telah menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meraih pemasaran semakin meluas tanpa perlu tergantung toko fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi besar memberdayakan masyarakat dan meningkatkan inklusi ekonomi (Manyika et al., 2020).

Meskipun ekonomi digital membawa banyak manfaat, ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam aspek ketimpangan ekonomi. Digitalisasi cenderung mempercepat kesenjangan antara individu dan perusahaan yang mempunyai akses pada teknologi dengan yang tidak. Dalam banyak kasus pekerja dengan keterampilan digital tinggi mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki keterampilan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar

dapat beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi digital (Autor, 2021).

Dampak ekonomi digital terhadap kebijakan moneter juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi makro. Munculnya mata uang digital dan teknologi *blockchain*, seperti *bitcoin* dan *ethereum*, menantang peran tradisional bank sentral dalam mengatur kebijakan moneter. Transaksi berbasis mata uang kripto dapat mengurangi kontrol bank sentral terhadap aliran uang dalam perekonomian yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu banyak negara mulai mengembangkan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai respons terhadap fenomena ini (Bordo & Levin, 2022).

Perkembangan ekonomi digital juga berdampak pada sistem perpajakan. Banyak perusahaan digital multinasional seperti Google, Apple, dan Amazon, beroperasi lintas batas tanpa keberadaan fisik yang jelas di suatu negara. Hal ini menyebabkan tantangan dalam pengenaan pajak terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Sebagai solusi berbagai negara dan organisasi internasional, seperti OECD mulai menerapkan kebijakan pajak digital untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara (Zucman, 2020).

Ekonomi digital mempengaruhi pola konsumsi dan perdagangan global. Dengan kemudahan akses internet, konsumen kini dapat

membeli barang dan jasa dari negara lain dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. *E-commerce* lintas negara semakin meningkat, menciptakan dinamika baru dalam perdagangan internasional. Sementara itu industri manufaktur juga mengalami transformasi dengan konsep *smart factory* yang mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) serta AI dalam menaikkan efisiensi produksi (Baldwin, 2021).

Dari sisi kebijakan ekonomi pemerintah di berbagai negara menghadapi tantangan menciptakan regulasi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa menghambat inovasi. Regulasi mengenai perlindungan data, keamanan siber, serta hak konsumen dalam ekonomi digital menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Uni Eropa telah menerapkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dalam memberi perlindungan data pribadi pemakai pada era digital. Regulasi semacam ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengatur ekonomi digital secara berkelanjutan (McKinsey & Company, 2021).

Perkembangan ekonomi digital juga berkontribusi terhadap ekonomi berbasis *gig* atau *gig economy* di mana individu dapat bekerja secara fleksibel melalui platform digital seperti Uber, Gojek, dan Upwork. Meskipun model kerja ini menawarkan fleksibilitas dan peluang bagi banyak orang, ada pula kekhawatiran mengenai hak pekerja dan jaminan sosial yang belum sepenuhnya terlindungi. Oleh karena itu pemerintah perlu merancang kebijakan

ketenagakerjaan yang sesuai dengan ekosistem kerja digital agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga (Schwellnus et al., 2020).

Ke depan ekonomi digital diprediksi akan terus berkembang dengan semakin luasnya adopsi teknologi baru seperti AI, komputasi awan, dan jaringan 5G. Negara yang mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan perkembangan ini akan memiliki peluang lebih besar meningkatkan daya saing global. Oleh karena itu investasi pada infrastruktur digital, pembangunan SDM, serta regulasi yang mendorong inovasi akan menjadi faktor kunci mengatasi tantangan ekonomi digital masa depan (Brynjolfsson & McAfee, 2020).

Ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap ekonomi makro, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga kebijakan moneter dan perpajakan. Meskipun terdapat tantangan, seperti ketimpangan ekonomi dan regulasi yang belum matang, potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar. Dengan kebijakan tepat, ekonomi digital dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan perekonomian secara inklusif serta berkesinambungan pada masa mendatang (Autor et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, H. L. (2022). *Principles of Macroeconomics*. S. Chand Publishing.
- Alesina, A., Favero, C., & Giavazzi, F. (2021). *Austerity: When It Works and When It Doesn't*. Princeton University Press.
- Amarodin, Muchamat. 2014. Peran Ekonomi Makro Dan Mikro Di Indonesia. Eksyar, Volume 01, Nomor 02, Desember 2014: 197 – 214.
- Angelini, N., dan N. Cetorelli, (2003), "The Effects of Regulatory Reform on Competition in the Banking Industri", *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 35, No. 5, pp. 663-684
- Anta, C (2019). Inside "An Introduction to The Principles of Morals and Legislation" By Jeremy Bentham. *Online International Journal of Philosophy with Peer Review*. Year XIV No 28. DOI: 10.7413/18281567154
- Arsyad, Rahmat. 2020. *Modul Pengantar Ekonomi Makro*. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti.
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia Dan Pembangunan Hukum Di Bidang Moneter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3), 393–411.
- Astuty Sri. et al. (2023). *Ekonomi Moneter*. Tahta Media Group.
- Autor, D. (2021). *The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines*. MIT Press.

- Autor, D., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2022). The China Shock Revisited: Lessons for Trade and Labor Markets. *Journal of Economic Perspectives*, 36(1), 123–149.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Pendapatan Nasional Indonesia 2019-2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/26/e130010589c151f394538d2c/pendapatan-nasional-indonesia-2019-2023.html>
- Baldwin, R. (2021). *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*. Oxford University Press.
- Baldwin, R., & Mauro, B. (2020). *Economics in the Time of COVID-19*. CEPR Press.
- Bank Indonesia, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia. Realisasi Triwulan III 2024.
- Becker, G. (2017). *Economic theory*. Routledge.
- Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (2022). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. *Journal of Economic Perspectives*, 36(2), 45–68.
- Blanchard O. 2009. "Where Are We in the Global Crisis?" Carnegie Endowment. diakses tanggal 20 Maret 2025, pukul 01.30AM
- Blanchard, O. (2022). *Macroeconomics in Times of Crisis: Lessons from the Past and a Roadmap for the Future*. Princeton University Press.
- Blanchard, O. (2023). *Fiscal Policy under Low Interest Rates*. Brookings Institution.

- Blanchard, O., & Pisani-Ferry, J. (2021). The Policy Response to the COVID-19 Crisis. Brookings Papers on Economic Activity.
- Bordo, M. D., & Levin, A. T. (2022). Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy. NBER Working Paper.
- Brunnermeier, M. K. (2020). The Resilient Society. Princeton University Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2020). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). Principles of Economics (8th ed.). Pearson Education.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2010). Principles of economics (10th ed.). Pearson.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2010). Principles of economics (13th ed.). Pearson.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). Principles of macroeconomics. Pearson.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). Principles of macroeconomics. Pearson.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). Principles of Macroeconomics, Thirteenth Edition, Global Edition, Pearson.
- Case, K.E., Fair, R.C., & Oster, S.M. (2020). Principles of Macroeconomics. 13th Global Edition. Pearson Education Inc.
- Case. Fair. Oster, Principles of Macroeconomics, Global Edition, 13th Edition

- Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2022). Money, Banking, and Financial Markets. McGraw-Hill Education.
- Coddington, A. (2013). Keynesian economics. Routledge.
- Colander, D. C. (2017). Economics. McGraw-Hill.
- Coppock, L., & Mateer, G. D. (2017). Principles of macroeconomics (p. 720). WW Norton.
- Damanik, D et al. (2022). Ekonomi Makro. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Darmawan, Didit. 2018. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Pertama. Surabaya: Revka Petra Media.
- Docquier, F., & Rapoport, H. (2020). Globalization, Brain Drain, and Development. Journal of Economic Perspectives, 34(3), 1–22.
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (1987). Macroeconomics (4th ed.). McGraw-Hill.
- Dornbush, R., Fisher, S., & Startz. (2018). Macroeconomics. Thirteenth Edition. New York. Published by McGraw-Hill Education.
- Goodhart, C., & Pradhan, M. (2021). The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival. Cambridge University Press.
- Goodwin, N., Harris, J., Nelson, J., Roach, B., & Torras, M. (2019). Principles of economics in context. Routledge.
- Gopinath, G. (2023). Inflation Dynamics in a Post-Pandemic World. IMF Working Paper.

- Greenlaw, S. A., Shapiro, D., & MacDonald, D. (2022). Principles of economics 3e. OpenStax.
- Hady, Hamdy, Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional, Buku Kedua.
- Hanke, S. H. (2019). The Downfall of the Venezuelan Economy: Hyperinflation and Economic Collapse. *Cato Journal*, 39(3), 487–512.
- Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.
- Havrylchyk O. 2006."Efficiency of the Polish banking industry: Foreign versus domestic banks", *Journal of Banking and Finance*, Vol. 30, No.7. pp:1975-1996.
- Inoua, S. M., & Smith, V.L (2019). Classical Economic Lost and Found. *The Independent Review*, 25(1), 79 – 90. <https://law-journals-books.vlex.com/vid/classical-economics-lost-and-869939621>
- Irvine, I., Ambler, S., & Curtis, D. (2017). Principles of Macroeconomics. Lyryx Learning Incorporated.
- Januar Hafidz dan Rieska Indah Astuti, (2013). "Tingkat Persaingan dan Efisiensi Intermediasi Perbankan Indonesia", *Bank Indonesia Working Paper*, Desember.
- Karl E. Case, Ray C. Fair , Sharon M. Oster. 2018. Principles of Macroeconomics. Pearson 13th edition
- Kates, Steven. (2020), *Classical Economic Theory and The Modern Economy*. Edward Elgar Publishing. DOI: <https://doi.org/10.4337/9781786433572>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, (2025) , Informasi APBN 2024, Direktorat Jenderal Anggaran
- Keohane, Robert O., 1984, *After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy*, University Press. Princeton
- Kolang, Al Rhega Caesar Grestiano (2024). Prinsip Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan keterlibatannya terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2, Desember, Hal 188 – 201. DOI: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.578>
- Krugman, P. (2021). *The Return of Economic Nationalism: Implications for Global Trade*.
- Krugman, P. (2023). *Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future*. W.W. Norton & Company.
- Kunawangsih, Tri P., Pracoyo, A., Handri. 2016. *Ekonomika Makro Sebuah Pengantar*; LPFE Usakti, Jakarta.
- Kurz, Heinz, D and Salvadori, Neri (2003). *Understanding Classical economic, studies in long-period theory*. Routledge Pub, 11 New Fetter Lane, London ECAP 4EE.
- Latumaerissa Julius R. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Lestari, E. P. (2011). Intensitas Perdagangan Dan Keselarasan Siklus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 163–186.

- Lubis, Andi F. 2012. "Market Power Perbankan Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vo. 14, No. 3, Januari, hal. 235-255
- Lynn, Matthew. 2011. *Bust: Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis*. London: John Wiley & Sons.
- Mankiw, N Gregory, *Macroeconomics*, Tenth Edition.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2024). *Principles of Economics*, Tenth Editions, Cengage.
- Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2020). *Economics*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Pengantar Ekonomi*, Ed.2, Jilid 1, Jakarta: Erlangga .
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. "Principles of Economics", 6th edition, South-Western, Cengage Learning, printed in Canada
- Manyika, J., Lund, S., & Bughin, J. (2020). *Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation*. McKinsey Global Institute.
- Mardiasmo, D., & Suhardjanto, H. (2023). "Fiscal Policy, Economic Growth, and Public Debt in Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 20(1), 99-110.
- Matthew, Higgins,; Klitgaard, Thomas. 2011. "Saving Imbalances and the Euro Area Sovereign Debt Crisis. *Current Issues in Economics and Finance* (Federal Reserve Bank of New York)

pada http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci17-5.pdf

- McKinsey, & Company. (2021). *The Future of Work in the Age of Automation*. McKinsey Global Institute.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Pearson.
- Mishkin, F. S. (2021). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (13th ed.). Pearson.
- Muharir dan Haryono (2023). Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus.
- Nag, S. (2023). *Principles of Macroeconomics*. Fanshawe College Pressbooks.
- Nainggolan, L.E et al. (2021). *Ekonomi Moneter*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nopirin, 1994, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter*. Edisi ke-4. BPFY. Yogyakarta Rahardja.
- Obstfeld, M. (2020). *Global Shocks and the U.S.* NBER Working Paper.
- Obstfeld, M. (2022). *Globalization and Inflation: The Role of External Shocks*. NBER Working Paper.

- Parkin, M. (2018). *Ekonomi, Buku 2: Makro*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Parkin, Michael. (2019). *Economics. Thirteenth Edition*. Pearson Education Limited.
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Prasetyo, E. (2023). "The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia: An Empirical Analysis." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 123-145.
- Prawoto, Nano. 2019. *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Purnamaningrum, T. K., Pracoyo, A., & Hasan, H. (2015). *Ekonomika Mikro Sebuah Pengantar*. LPFE Universitas Trisakti.
- Putra Rendy A. et al., (2024). *Kebijakan Operasional Moneter dan Analisis Makro Ekonomi*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2 No. 6. Hal. 731-734.
- Qothrunnada, Kholida. 2021. *Mengenal Circular Flow Diagram dalam Kegiatan Ekonomi*. Detikedu.
- Rahardja, P. & Manurung, M. (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. 2006. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, S. (2023). "Evaluating the Role of Government Expenditure in Economic Growth: Evidence from Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-30.

- Rajan, R. G. (2021). *The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind*. Penguin Books.
- Rasyid, A et al. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Reenen, J. (2021). *Innovation and Economic Growth: The Role of Digitalization*. Brookings Papers on Economic Activity.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2021a). *The Aftermath of Financial Crises: Lessons for Economic Policy*. NBER Working Paper.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2021b). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Richard, B., & Tomiura, E. (2020). *Trade-impact-COVID-19*. In *Thinking ahead about the trade impact of COVID-19*. <https://repository.graduateinstitute.ch/record/298220>
- Rodrik, D. (2020). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
- Rogoff, K. (2020). *The Digitalization of Money: Implications for Inflation and Financial Stability*. *Journal of Monetary Economics*, 116, 10–30.
- Sachs, J. D. (2020). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sari, Imelda. 2020. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika.
- Schwellnus, C., Geva, A., & Pak, M. (2020). *Gig Economy and the Future of Work*. OECD Economics Department Working Papers.

- Setiawan, B. (2023). "Tax Policy Reforms and Their Impact on Economic Growth in Indonesia." *Indonesian Journal of Taxation*, 5(2), 75-89.
- Shapiro, D., MacDonald, D., & Greenlaw, S. A. (2024). *Principles of Macroeconomics 3e*. Vk Publications.
- Sibarani, Juan Charlos, Arnold Prabowo, dan Bonaraja Purba (2023). Peran teori Klasik Dalam Pembentukan Pemikiran Ekonomi Modern. *Madani: Jurnal ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, Nomor 11, Halaman 246 – 252. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251158>
- Sikdar, S. (2020). *Principles of Macroeconomics*. Oxford University Press.
- Smith, Matthew. (2023). Adam Smith on Growth and Economic Development, *History of Economic Review*, 86:1, 2 – 15. DOI: 10.1080/10370196.2023.2243741.
- Spihoven, Antoon (1996). Jean – Baptiste Say (1767 – 1832): Between the Labor theory of value and Utility. *International Journal of Social Economics* • July. DOI: 10.1108/03068299610122399
- Statistik, B. P. (2021). *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2020*.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company, 3(5), 167–179.
- Stiglitz, J. E. (2021). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. *Journal of Economic Perspectives*, 35(4), 89–112.

- Stiglitz, J. E. (2022). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
- Sudarmanto et al. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta
- Summers, L. H. (2022). *Secular Stagnation and Economic Recovery*. *American Economic Review*, 112(4), 987–1003.
- Suparmoko, M. (2002). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. BPF.
- Suparmoko, M. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Keenam. Penerbit BPF UGM. Yogyakarta.
- Suparmono. 2018. *Pengantar Ekonomi Makro Teori, Soal, dan Penyelesaiannya*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Superadmin. 2023. *Peran Pelaku Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi yang Perlu Kamu Tahu*. Pijarbelajar.id.
- Suryahadi, A., Ridho, A. I., & and Suryadarma, D. (2020). *Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- The History of Economic Thought. <https://www.hetwebsite.net/het/profiles/say.htm>

- Tri Kunawangsih Purnamaningrum, Antyo Pracoyo, Handri Hasan (2016). *Ekonomika Makro Sebuah Pengantar*. Jakarta: LPFE Universitas Trisakti.
- Warjiyo. Perry. (2004). *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Pusat Studi dan Kebank sentralan BI, Jakarta.
- Warsito, T. (2023). Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1942–1956. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.592>
- Woodford, M. (2022). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.
- Zucman, G. (2020). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1



Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M.

Dosen tetap di Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Menamatkan Program Sarjana (S1) di Universitas Trisakti Jakarta Program Studi Ekonomi Pembangunan, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Trisakti Jakarta Program Studi Magister Manajemen dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta. Pengalaman

mengajar mata kuliah Makroekonomika Pengantar, Mikroekonomika Pengantar, Pengantar Ilmu Ekonomi, Makroekonomika I, Mikroekonomika I, Matematika Ekonomi, Ekonomika Moneter dan Ekonomi Internasional

Penulis Bagian 2



Dr. Sumiyarti, ME

Seorang dosen tetap Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Lahir di Bantul, 22 Januari 1969. Pendidikan program Sarjana (S1) diselesaikan dari Prodi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi ke Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terakhir

menamatkan Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Beberapa artikel telah diterbitkan dengan bidang kajian ekonomi

makro, pembangunan ekonomi regional, perdagangan internasional, keberlanjutan, baik pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Buku yang diterbitkan diantaranya adalah Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Suatu Kajian Empiris, Metode Kuantitatif untuk Ekonomi dan Bisnis, Prinsip-prinsip Ekonomi, Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi, Buku Ajar Ekonometrika, Dasar-dasar Ekonomi, Buku Ajar Ekonomi Mikro
E-mail: sumiyarti.fe@trisakti.ac.id; sumiyarti69@gmail.com

Penulis Bagian 3



Dr. Astrid Maria Esther, S.E, M.M adalah Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta., Lahir di Jakarta , 12 November 1965. Anak tunggal dari pasangan P. van den Bos dan Wiesje. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta (S.Ekonomi) dan Program Magister (S2) pada Universitas yang (M.Keuangan) sera Sarjana (S3) dari Program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Sustainable Development Studies dari Universitas Trisakti- National Colorado University Amerika Serikat. Pemegang Sertifikasi Digital Marketing BNSP. Dan berbagai penelitian telah dilakukan dan dipublikasi (Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional bereputasi SCOPUS & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 4



Dini Hariyanti, Dr. M. E.

Seorang Penulis dan Dosen pada Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Penulis menamatkan pendidikan program studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (S1) di Universitas Trisakti. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia. Strata Tiga (S3) di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis mengajar mata kuliah Mikroekonomika dan Makroekonomika Pengantar, Makroekonomika I dan II pada S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Trisakti, Mata kuliah Makroekonomika Lanjutan, Ekonomi Regional dan Wilayah dan Metodologi Penelitian di Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti serta mata kuliah Ekonomika Lanjutan pada S3 konsentrasi Manajemen Strategic, *Management Sustainability Development* dan Akuntansi di Program studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti.

Penulis Bagian 5



Sri Yani Kusumastuti, S.E., M.Si

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pengalaman mengajar Mikroekonomika, Statistika, Ekonometrika, Metodologi Penelitian, Ekonomi Digital, dan Analisa Big Data. Banyak menulis artikel di

bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan. Menjadi Editor di beberapa buku, antara lain: *Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis: suatu kajian empiris (2002)*, *Desain eksperimental: aplikasi dalam riset ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi (2011)*. Penulis buku *Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (2018)*. penulis berbagai buku ajar dan buku referensi, dan artikel ilmiah di berbagai jurnal.

Penulis Bagian 6



Dr. Nuraini Chaniago, MM

Seorang Penulis dan Dosen Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Trisakti. Lahir di Jakarta pada 30 September 1968, memiliki latar belakang pendidikan yang komprehensif di bidang ekonomi. Menyelesaikan gelas sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti (FEB-USakti) pada tahun 1992, dilanjutkan dengan gelar Magister Manajemen dari institusi yang sama pada tahun 1998. Puncak pencapaian akademis diraih dengan memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan fokus pada Kebijakan Publik pada tahun 2021. Karir akademis dimulai pada tahun 1994 sebagai dosen tetap di FEB-USakti. Selain mengajar, juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Syariah di FEB-USakti dari tahun 2015 hingga 2020, sebelum dipromosikan menjadi Ketua Program Studi yang sama pada tahun 2020, posisi yang masih diemban hingga saat ini.

Penulis Bagian 7



Dr. Harmaini, SE, MSI, GRCE

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Talang, 20 Mei 1961 Sumbar. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Abu Bakar (Alm) dan Ibu Rosmaniar. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan menyelesaikan program Doctor (S3) di Universitas Trisakti prodi Ilmu Ekonomi konsentrasi di bidang Islamic Economic Finance (IEF).

Penulis Bagian 8



Dr. Agustina Suparyati, SE, ME, GRCE

Seorang penulis, peneliti, Jurnalis dan Dosen pada Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Sleman, Yogyakarta, 1 Agustus 1967. Menamatkan jenjang pendidikan Program Sarjana Srata 1 di Universitas Gadjah Mada, Program Pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia dan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di Universitas Padjajaran Bandung. Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Editor in Chief di Jurnal Media Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis telah menyusun berbagai buku ajar, book chapter dan artikel yang dipublikasikan jurnal nasional maupun internasional.

Penulis Bagian 9



Dr. Lavlimatria Esya, MSi

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulusan dari Pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas, Padang, Sumatra, Indonesia, Prodi IESP, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, Indonesia, Prodi IESP dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Pengalaman mengajar Makro (Islam dan Konvensional), Moneter (Islam dan Konvensional) dan Perbankan Syariah. Penulis juga memiliki sertifikat berskala nasional, diantaranya Sertifikat (Asesor) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan *Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced-level Executive* (GRCE). Penulis juga mempunyai artikel ilmiah yang telah terpublikasikan diberbagai jurnal.

Penulis Bagian 10



Tri Kunawangsih Purnamaningrum

dilahirkan di Purwokerto tahun 1968. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pendidikan S3 diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak tahun 1992 hingga sekarang menjadi dosen tetap di FEB Universitas Trisakti Jakarta. Mengajar di program S1 dan S1 Terapan, PPBP (Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan) BCA, S2, S3. Tahun 2008-2014, menjadi

Direktur di *Trisakti Education and Business Institute* (TRIEBI)

Trisakti. Buku yang pernah diterbitkan berjudul Pengantar Ekonomi Mikro, Ekonomika Makro Sebuah Pengantar, Metode Penelitian Kuantitatif, Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi, The Journey of Pantun.

Penulis Bagian 11



Dr. Ida Busnetty, MM

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini juga aktif sebagai praktisi pada bidang *Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM*, Lahir di Bukittinggi, 16 November 1967. Anak bungsu dari enam bersaudara, pasangan Bustamam dan Nurhayati. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang dan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) pada Universitas Trisakti Jakarta. Berbagai Penelitian dan Pengabdian telah dilakukan dan dipublikasi (Buku ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional bereputasi SCOPUS & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 12



Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2 pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Trisakti, dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis pernah mengajar di Trisakti School of Management (TSM) sejak

tahun 1999 sampai 2019. Sebagai Dosen, Penulis mengampu mata kuliah Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonomika Internasional, Matematika Ekonomi, Ekonomi Manajerial, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, dan Ekonomi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan. Disamping menjadi Dosen, Penulis juga sebagai Owner usaha kuliner “Rendang Ni Os” sejak tahun 2009. Berbagai penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan dan dipublikasi (ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 13



Dalizano Hulu, S.E, M.E, CRM, CRP

Memperoleh S1 Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan dari Universitas HKBP Nommensen, Medan. Selanjutnya S2 Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Kompeten di bidang Manajemen Risiko di peroleh CRM (*Certified Risk Management*) dari *Quint Wellington Redwood*, Australia. Selanjutnya CRP (*Certified Risk Professional*) dari BNSP, LSP-PM (Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal), Jakarta. Sekarang Dosen Tetap di Prodi Manajemen, Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Kota Tangerang Selatan. Mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonometrika, Matematika Bisnis, Statistik Bisnis, Manajemen Investasi, Lembaga Keuangan dan Pasar Modal, Manajemen Risiko, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Operasi.

Penulis Bagian 14

Dr. Endri Sentosa. SE.MM

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI dan juga dosen Trisakti School of Management (TSM) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Andalas Padang, prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2 dan S3 di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Prodi Manajemen. Disamping dosen penulis juga praktisi di bidang perbankan, *public relations*, dan *journalist*. Sebagai dosen penulis pengampu mata kuliah antara lain, Ekonomi Manajerial, Ekonomi Mikro dan Makro, Perekonomian Indonesia, Manajemen Strategik, Strategi Pemasaran, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu Terpadu, SKB, Pasar Modal dan Seminar Manajemen Pemasaran. Penulis juga sempat terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai sekretaris DPC salah satu partai politik di Kota Tangerang Selatan. Dalam aktivitas kampus penulis pernah di tugaskan dalam program *joint lecture* antara FEB UPI YAI dan Misamis University of Philipina. Banyak sudah hasil penelitian dan pengabdian yang dihasilkan penulis dan tersimpan di *Google Scholar*.

Penulis Bagian 15



Loso Judijanto, SSi, MM, MStats

adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia.

Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com

**SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
NO:500/BC-SPI/IV/2025**



Penghargaan Sebesar-besarnya kami berikan kepada

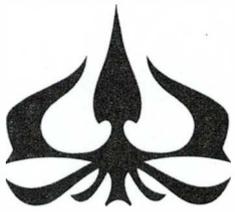
Dr. Harmaini,. S.E., M.Si

Atas kontribusinya sebagai Penulis Buku
dengan nomor ISBN : **978-623-514-589-1**
di penerbit Sonpedia Publishing Indonesia dengan judul:
Ekonomika Makro Pengantar

Jambi, 18 April 2025



Pimpinan Redaksi



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS – UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A – Jl. Kyai Tapa No.1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 (Hunting)

E-mail : feb@trisakti.ac.id

Website: https://feb.trisakti.ac.id

UNIVERSITAS TRISAKTI

Direct: +62-21 5644271

SURAT TUGAS

Nomor : 59 /DL/3.03/FEB/IV/2025

- Dasar :
1. SKR Nomor : 177/SKR/BSDM/USAKTI/IX/1997 tanggal 15-08-1997 ketentuan keikutsertaan karyawan Usakti dalam pertemuan ilmiah.
 2. SKR Nomor : 40/USAKTI/SKR/III/1998 tanggal 27-02-1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Beban Tugas Institusional Dosen Biasa Usakti.
 3. Berdasarkan Surat Disposisi dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Nomor : 0359/FEB tanggal 22 April 2025.

dengan ini Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

MENUGASKAN

Kepada :

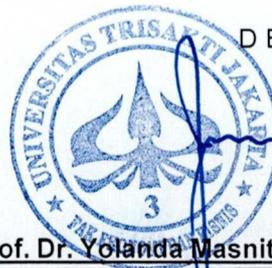
No	Nama	NIK	Jabatan Akademik
1.	Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM	2808	Lektor 300
2.	Dr. Sumiyarti, SE. ME, CFR	2014	Lektor 200
3.	Dr. Astrid Maria Esther, SE, MM	1986	Lektor 200
4.	Dr. Dini Hariyanti, ME, GRCE	2010	Lektor 300
5.	Sri Yani Kusumastuti, SE, M.Si	1936	Lektor 200
6.	Dr. Nur'aini Chaniago, SE. MM	2102	Lektor 200
7.	Dr. Harmaini, SE. M.Si, GRCE	2088	ASA 150
8.	Dr. Agustina Suparyati, SE. ME, GRCE	2016	Lektor 200
9.	Dr. Lavlimatria Esya, MSi, GRCE	2209	Lektor Kepala 400
10.	Dr. Tri Kunawangsih P., M.Si, GRCE	1988	Lektor Kepala 400
11.	Dr. Ida Busnety, MM	1989	Lektor Kepala
12.	Dr. Osni Erza, SE. MM, GRCE	2092	Lektor 200

Sebagai Penulis Kontributor dalam kegiatan Kolaborasi Penulisan Buku Referensi Ekonomika Makro Pengantar yang diselenggarakan oleh PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta kepada yang bersangkutan dapat memberikan laporan kepada Wakil Dekan I.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 April 2025



DEKAN,

Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, CMA, CPM

SDM/3752	WD I/1954

Disampaikan kepada Yth. :

- Nama-nama Terlampir

Tembusan :

1. Ka. Prodi EP FEB USAKTI
2. Ka. Prodi ME FEB USAKTI
3. Ka. Prodi DIV Keuangan FEB USAKTI
4. Ka. Prodi DIII Syariah FEB USAKTI
5. Kasubag. Adm SDM FEB USAKTI



Lembar Disposisi

No. Agenda : 0359/FEB

Tanggal : 22/4/2025

Diterima dari : Sri Yani Kusumastuti

Kode Klasifikasi :

No. Surat : -

Tgl. Surat : 21/4/2025

Lampiran :

Perihal/Isi Ringkas : Permohonan ST Kolaborasi Penulisan Buku

Kepada Uth. Wakil Dekan I

- Mohon Persetujuan
- Mohon Tanda Tangan
- Mohon Instruksi/Petunjuk selanjutnya
- Mohon Saran/Komentar
- Untuk Informasi Bapak/Ibu/Sdr.
- Sesuai Intruksi Bapak/Ibu/Sdr.
- Sesuai Pembicaraan sebelumnya
- Mohon Diumumkan

- Mohon Segera Dilaksanakan
- Mohon Bantuannya
- Mohon Dicatat lalu Dikembalikan
- Mohon Disimpan dalam File
- Mohon Konsep Jawaban
- Mohon Jawaban Segera
- Mohon Bicara dengan Saya
- Didistribusikan / Digandakan

Nota :

Ka. SDM

u/ dibuatkan S.T

Th
husein 22/4/25 - 22/4/25

Jakarta, 21 April 2025

Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Surat Tugas
Kolaborasi Penulisan Buku

Kepada Yth.

Ibu Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM CIRR, CMA, CPM (Asia)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan Kolaborasi Penulisan **BUKU REFERENSI EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR** yang diadakan oleh PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Anggota IKAPI: 006/JBI/2023), maka bersama ini kami:

1. Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M	NIK: 2808
2. Dr. Sumiyarti, ME	NIK: 2014
3. Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M	NIK:
4. Dr. Dini Hariyanti, ME	NIK: 2010
5. Sri Yani Kusumastuti, S.E, M.Si	NIK: 1936
6. Dr. Nuraini Chaniago, M.M	NIK: 2102
7. Dr. Harmaini, S.E, M.Si	NIK: 2088
8. Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE	NIK: 2016
9. Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	NIK: 2209
10. Dr. Tri Kunawangsih Purnamaningrum, MSi, GRCE	NIK: 1988
11. Dr. Ida Busnetty, M.M	NIK:
12. Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE	NIK:

Berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai penulis kontributor. Mohon kiranya Ibu dapat menerbitkan Surat Tugas-nya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,



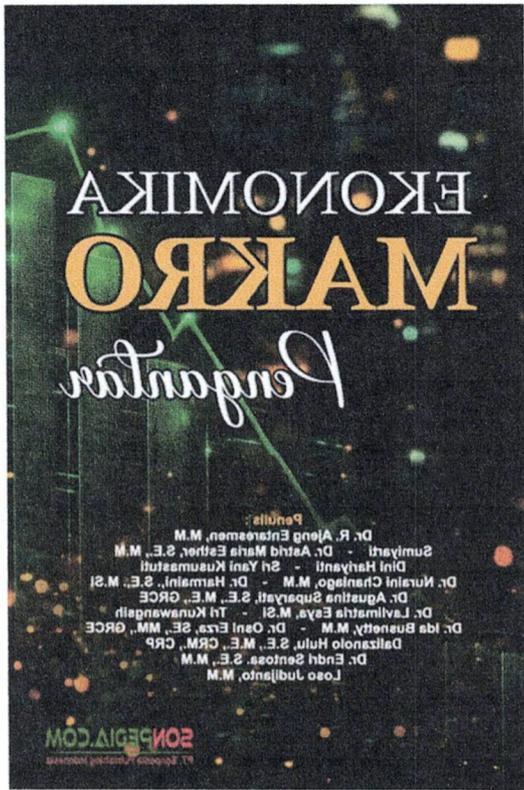
(Sri Yani Kusumastuti, SE, MSi)

Ketua
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan,



(Dr. Syofriza Syofyan, ME)

Lampiran:



EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

Penulis :

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M
Sumiyarti
Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M
Dini Hariyanti
Sri Yani Kusumastuti
Dr. Nuraini Chaniago, M.M
Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE
Dr. Lavlimatria Esiya, M.Si
Tri Kunawangsih
Dr. Ida Busnetty, M.M
Dr. Osi Erza, SE., MM., GRCE
Dalizanolu Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP
Dr. Endri Sentosa, S.E., M.M
Loso Judijanto, M.M

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

Penulis :

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M
Sumiyarti
Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M
Dini Hariyanti
Sri Yani Kusumastuti
Dr. Nuraini Chaniago, M.M
Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE
Dr. Lavlimatria Esiya, M.Si
Tri Kunawangsih
Dr. Ida Busnetty, M.M
Dr. Osi Erza, SE., MM., GRCE
Dalizanolu Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP
Dr. Endri Sentosa, S.E., M.M
Loso Judijanto, M.M

ISBN : 978-623-514-589-1

Editor :

Sepriano

Penyunting :

Inayah Uzma

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku-sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

Penulis Bagian 1



Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M.

Dosen tetap di Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Menamatkan Program Sarjana (S1) di Universitas Trisakti Jakarta Program Studi Ekonomi Pembangunan, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Trisakti Jakarta Program Studi Magister Manajemen dan menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta. Pengalaman mengajar mata kuliah Makroekonomika Pengantar, Mikroekonomika Pengantar, Pengantar Ilmu Ekonomi, Makroekonomika I, Mikroekonomika I, Matematika Ekonomi, Ekonomika Moneter dan Ekonomi Internasional

Penulis Bagian 2



Dr. Sumiyarti, ME

Seorang dosen tetap Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Lahir di Bantul, 22 Januari 1969. Pendidikan program Sarjana (S1) diselesaikan dari Prodi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi ke Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terakhir menamatkan Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Beberapa artikel telah diterbitkan dengan bidang kajian ekonomi

makro, pembangunan ekonomi regional, perdagangan internasional, keberlanjutan, baik pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Buku yang diterbitkan diantaranya adalah Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Suatu Kajian Empiris, Metode Kuantitatif untuk Ekonomi dan Bisnis, Prinsip-prinsip Ekonomi, Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi, Buku Ajar Ekonometrika, Dasar-dasar Ekonomi, Buku Ajar Ekonomi Mikro
E-mail: sumiyarti.fe@trisakti.ac.id; sumiyarti69@gmail.com

Penulis Bagian 4



Dini Hariyanti, Dr. M. E.

Seorang Penulis dan Dosen pada Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Penulis menamatkan pendidikan program studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (S1) di Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia, Strata Tiga (S3) di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis mengajar mata kuliah Mikroekonomika dan Makroekonomika Pengantar, Makroekonomika I dan II pada S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Trisakti, Mata kuliah Makroekonomika Lanjutan, Ekonomi Regional dan Wilayah dan Metodologi Penelitian di Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti serta mata kuliah Ekonomika Lanjutan pada S3 konsentrasi Manajemen Strategic, *Management Sustainability Development* dan Akuntansi di Program studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti.

Penulis Bagian 3



Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M adalah

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta., Lahir di Jakarta , 12 November 1965. Anak tunggal dari pasangan P. van den Bos dan Wiesje. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta (S.Ekonomi) dan Program Magister (S2) pada Universitas yang (M.Keuangan) sera Sarjana (S3) dari Program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Sustainable Development Studies dari Universitas Trisakti- National Colorado University Amerika Serikat. Pemegang Sertifikasi Digital Marketing BNSP. Dan berbagai penelitian telah dilakukan dan dipublikasi (Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional bereputasi SCOPUS & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 5



Sri Yani Kusumastuti, S.E., M.Si

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pengalaman mengajar Mikroekonomika, Statistika, Ekonometrika, Metodologi Penelitian, Ekonomi Digital, dan Analisa Big Data. Banyak menulis artikel di

bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan. Menjadi Editor di beberapa buku, antara lain: *Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis: suatu kajian empiris (2002)*, Desain eksperimental: aplikasi dalam riset ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi (2011). Penulis buku Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (2018). penulis berbagai buku ajar dan buku referensi, dan artikel ilmiah di berbagai jurnal.

Penulis Bagian 6



Dr. Nuraini Chaniago, MM

Seorang Penulis dan Dosen Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Trisakti. Lahir di Jakarta pada 30 September 1968. memiliki latar belakang pendidikan yang komprehensif di bidang ekonomi. Menyelesaikan gelas sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti (FEB-USakti) pada tahun 1992, dilanjutkan dengan gelar Magister Manajemen dari institusi yang sama pada tahun 1998. Puncak pencapaian akademis diraih dengan memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan fokus pada Kebijakan Publik pada tahun 2021. Karir akademis dimulai pada tahun 1994 sebagai dosen tetap di FEB-USakti. Selain mengajar, juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Syariah di FEB-USakti dari tahun 2015 hingga 2020, sebelum dipromosikan menjadi Ketua Program Studi yang sama pada tahun 2020, posisi yang masih diemban hingga saat ini.

Penulis Bagian 7



Dr. Harmaini, SE, MSI, GRCE

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Talang, 20 Mei 1961 Sumbang. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Abu Bakar (Alm) dan Ibu Rosmaniar. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan menyelesaikan program Doctor (S3) di Universitas Trisakti prodi Ilmu Ekonomi konsentrasi di bidang Islamic Economic Finance (IEF).

Penulis Bagian 8



Dr. Agustina Suparyati, SE, ME, GRCE

Seorang penulis, peneliti, Jurnalis dan Dosen pada Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Sleman, Yogyakarta, 1 Agustus 1967. Menamatkan jenjang pendidikan Program Sarjana Srata 1 di Universitas Gadjah Mada, Program Pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia dan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di Universitas Padjajaran Bandung. Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Editor in Chief di Jurnal Media Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis telah menyusun berbagai buku ajar, book chapter dan artikel yang dipublikasikan jurnal nasional maupun internasional.

Penulis Bagian 9



Dr. Lavlimatria Esya, MSi

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulusan dari Pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas, Padang, Sumatra, Indonesia, Prodi IESP, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, Indonesia, Prodi IESP dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pengalaman mengajar Makro (Islam dan Konvensional), Moneter (Islam dan Konvensional) dan Perbankan Syariah. Penulis juga memiliki sertifikat berskala nasional, diantaranya Sertifikat (Asesor) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan *Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced-level Executive* (GRCE). Penulis juga mempunyai artikel ilmiah yang telah terpublikasikan diberbagai jurnal.

Penulis Bagian 10



Tri Kunawangsih Purnamaningrum
dilahirkan di Purwokerto tahun 1968. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S3 diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak tahun 1992 hingga sekarang menjadi dosen tetap di FEB Universitas Trisakti Jakarta. Mengajar di program S1 dan S1 Terapan, PPPP (Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan) BCA, S2, S3. Tahun 2008-2014, menjadi Direktur di *Trisakti Education and Business Institute* (TRIEBI)

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

249

Trisakti. Buku yang pernah diterbitkan berjudul Pengantar Ekonomi Mikro, Ekonomika Makro Sebuah Pengantar, Metode Penelitian Kuantitatif, Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi, The Journey of Pantun.

Penulis Bagian 11



Dr. Ida Busnetty, MM
Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini juga aktif sebagai praktisi pada bidang *Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM*. Lahir di Bukittinggi, 16 November 1967. Anak bungsu dari enam bersaudara, pasangan Bustamam dan Nurhayati. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang dan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) pada Universitas Trisakti Jakarta. Berbagai Penelitian dan Pengabdian telah dilakukan dan dipublikasi (Buku ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional bereputasi SCOPUS & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 12



Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE
Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2 pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Trisakti, dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis pernah mengajar di Trisakti School of Management (TSM) sejak

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

250

tahun 1999 sampai 2019. Sebagai Dosen, Penulis mengampu mata kuliah Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonomika Internasional, Matematika Ekonomi, Ekonomi Manajerial, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, dan Ekonomi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan. Disamping menjadi Dosen, Penulis juga sebagai Owner usaha kuliner "Rendang Ni Os" sejak tahun 2009. Berbagai penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan dan dipublikasi (ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal internasional & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025039949, 18 April 2025

Pencipta

Nama : **Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M, Sumiyarti dkk**
Alamat : Jalan. Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006, Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M, Sumiyarti dkk**
Alamat : Jalan. Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006, Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan :

Buku

Judul Ciptaan :

EKONOMIKA MAKRO PENGANTAR

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

18 April 2025, di Kota Jambi

Jangka waktu perlindungan :

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan :

000880210

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M	Jalan. Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Sumiyarti	Jalan Jayawijaya IV Perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok 7 No. 11. RT 17. RW 12 Tambun Selatan, Kab. Bekasi
3	Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M	Angsana III nomor. 7 Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
4	Dini Hariyanti	Cluster Bukit Padma Indah Residence Blok A4 No 28, Bukit Indah - Sarua Ciputat, Kota Tangerang Selatan
5	Sri Yani Kusumastuti	Jalan. Banjar Baru I No. 28, Perumahan Gresik Kota Baru Manyar, Kab. Gresik
6	Dr. Nuraini Chaniago, M.M	Jln. Mawadah 12 Blook N5 no 2 islamic Village karawaci Tangerang Curug, Kab. Tangerang
7	Dr. Harmaini, S.E., M.Si	Jl. Temu giring RT 02 RW 08 No. 23 Kayu Putih Pulogadung Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur
8	Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE	Jl Batu Ampar 1 No 29 RT 11 RW 2 Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur
9	Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	Jalan Erlangga Raya Blok E No. 16 Perumahan Pondok Timur Indah II Mustikajaya, Kota Bekasi
10	Tri Kunawangsih	Pesona Orlando RA 1 No 5, Kota Wisata Jalan Utama, Ciangsana, Gunung Putri Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur
11	Dr. Ida Busnetty, M.M	Jln Mawaddah XI blok JXI No 4 Islamic Village Kelapa Dua Tangerang Kelapa Dua, Kab. Tangerang
12	Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE	Puri Kartika Lama Ciledug, Kota Tangerang
13	Dalizanolo Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP	Jalan. Sadar No. 50, RT. 02 / RW. 03 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
14	Dr. Endri Sentosa. S.E., M.M	Jalan. Benda Permai Vi, Blok C30- No7 RT01/13 Pamulang Permai 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan
15	Loso Judijant, M.M	Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020 Medansatria, Kota Bekasi

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M	Jalan. Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Sumiyarti	Jalan Jayawijaya IV Perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok 7 No. 11. RT 17. RW 12 Tambun Selatan, Kab. Bekasi
3	Dr. Astrid Maria Esther, S.E., M.M	Angsana III nomor. 7 Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat

4	Dini Hariyanti	Cluster Bukit Padma Indah Residence Blok A4 No 28, Bukit Indah - Sarua Ciputat, Kota Tangerang Selatan
5	Sri Yani Kusumastuti	Jalan. Banjar Baru I No. 28, Perumahan Gresik Kota Baru Manyar, Kab. Gresik
6	Dr. Nuraini Chaniago, M.M	Jln. Mawadah 12 Blook N5 no 2 islamic Village karawaci Tangerang Curug, Kab. Tangerang
7	Dr. Harmaini,. S.E., M.Si	Jl. Temu giring RT 02 RW 08 No. 23 Kayu Putih Pulogadung Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur
8	Dr. Agustina Suparyati, S.E., M.E., GRCE	Jl Batu Ampar 1 No 29 RT 11 RW 2 Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur
9	Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	Jalan Erlangga Raya Blok E No. 16 Perumahan Pondok Timur Indah II Mustikajaya, Kota Bekasi
10	Tri Kunawangsih	Pesona Orlando RA 1 No 5, Kota Wisata Jalan Utama, Ciangsana, Gunung Putri Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur
11	Dr. Ida Busnetty, M.M	Jln Mawaddah XI blok JXI No 4 Islamic Village Kelapa Dua Tangerang Kelapa Dua, Kab. Tangerang
12	Dr. Osni Erza, SE., MM., GRCE	Puri Kartika Lama Ciledug, Kota Tangerang
13	Dalizanolo Hulu, S.E., M.E., CRM., CRP	Jalan. Sadar No. 50, RT. 02 / RW. 03 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
14	Dr. Endri Sentosa. S.E., M.M	Jalan. Benda Permai Vi, Blok C30- No7 RT01/13 Pamulang Permai 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan
15	Loso Judijant, M.M	Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020 Medansatria, Kota Bekasi

